

# KASYAF

Jurnal Populer Pemikiran Ekonomi Islam

Volume 4 Tahun 3 / 2021

## Membangun Budaya, Menyingkiri Kleptokrasi



- Prof. Didik J Rachbini dan Riza Annisa Pujarama • Prof. Syed Farid Alatas
- Prof. Faisal Afiff • Ong Hok Ham • Prof. Habibul Haque Khondker • Ali Audah
- Medrial Alamsyah • Tere Liye • Firman Jatnika • Yayan Satyakti
- Naqiya Syahidati dan Alya Afifah • Darmawan Sepriyossa



Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Padjadjaran

ISSN: 2715-2588





9 772715 258007

# Daftar Isi

1. Daftar Isi .....	1
2. Muqaddimah .....	3
Syaiful Rahman Soenaria	
3. Ekonomi Politik Korupsi dan Kleptorasi .....	5
Didik J Rachbini & Riza Annisa Pujarama	
4. <i>A Sociology of Corruption: Reexamining the Contributions of Syed Hussein Alatas</i> .....	11
Habibul Haque Khondker	
5. Kepimpinan Masyarakat dan Bebalisme: Pemikiran Syed Hussein Alatas .....	20
Syed Farid Alatas	
6. Memberantas Korupsi .....	24
Ali Audah	
7. Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa .....	26
Ong Hok Ham	
8. Penyebar Islam di Indonesia Adalah Ulama Terbaik Pada Zamannya: Perspektif Perdagangan Internasional .....	29
Yayan Satyakti	
9. Cara Pandang Piketty Meneropong Kesenjangan Ekonomi .....	33
Naqiya Syahidati dan Alya Afifah	
10. Keluar Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya: Tentang “Political Corruption in Indonesia”-nya Todung Mulya Lubis .....	38
Firman Jatnika	
11. Tere Liye Memandang Korupsi: Kita Memang Bangsa Pemuja Korupsi dan Pelakunya .....	40
Tim KASYAF	
12. Mengikis Budaya Korupsi Melalui Birokrasi Berbasis Ruang dan Manajemen Berbasis Kinerja .....	52
Medrial Alamsyah	

13. <b>Pancasila dan Social Market Economy</b> .....	58
Faisal Afiff	
14. <b>Syair Perahu dari Hamzah Fansuri</b> .....	64
Syaiful Rahman Soenaria	
15. <b>KPK: Lembaga yang (Dibuat) Mati Muda</b> .....	67
Darmawan Sepriyossa	

Jurnal Kasyaf diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (PUSDI EBI FEB UNPAD), adalah media informasi dan komunikasi masalah sosial, ekonomi, dan bisnis dalam perspektif Islam, dengan konten utama tulisan pemikiran populer, ringkasan hasil penelitian, serta gagasan orisinal. Redaksi mengundang semua komponen masyarakat untuk berkontribusi tulisan. Tulisan dalam Jurnal Kasyaf tidak selalu mencerminkan pendapat PUSDI EBI FEB UNPAD. Redaksi dapat mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. ©Hak cipta dilindungi Undang Undang.

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran:  
**Erie Febrian**

Dewan Redaksi:

Ketua: **Syaiful Rahman Soenaria**

Anggota:

**Darmawan Sepriyossa, Erie Febrian, Kurniawan Saefullah, Dadan Gunawan Muhammad Syawal, Satya Rinaldi, Hary Mulia Rachman, Uken Junaedi, Firman Jatnika**

Pelaksana Redaksi:

**Adil Teguh Wijaya**

Alamat: Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40133, Indonesia. Telp.: +62-812-1936-197

Email: [pusdi.ebi.feb@unpad.ac.id](mailto:pusdi.ebi.feb@unpad.ac.id)      Website: [www.pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id](http://www.pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id)



# Muqaddimah

*“Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An Nahl ayat 90)*

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (Q.S. Annisa ayat 58)

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya bagi Allah, Penguasa ruang dan waktu, kepada-Nya kita mohonkan ridho dan perlindungan untuk keberlanjutan Indonesia yang adil dan beradab. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, teladan tiada henti dalam tata kelola diri, organisasi dan masyarakat serta rujukan utama dalam konsistensi sikap dan perbuatan yang *amanah* dan *shiddiq*.

Dengan gembira kami sajikan ke hadapan pembaca, *Kasyaf* volume 4 yang terbit di tengah upaya bangsa Indonesia untuk mengonversi COVID-19 dari pandemi menjadi endemi. Dengan endemi berarti virus COVID-19 akan tetap bersama kita untuk beberapa tahun ke depan, namun sebagai bangsa kita sudah punya kapasitas untuk mengendalikannya baik secara preventif maupun kuratif. Kunci keberhasilan untuk itu adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*amanah* dan *shiddiq*) di samping modal sosial dalam bentuk disiplin masyarakat dan solidaritas sosial.

Tata kelola dan modal sosial itulah yang juga menjadi kunci untuk mengatasi budaya korupsi dan kleptokrasi di Indonesia saat ini. Redaksi berpandangan bahwa budaya korupsi adalah masalah mendasar bangsa Indonesia, di samping ketimpangan sosial dan ketergantungan tinggi kepada kekuatan ekonomi asing.

Ketiga masalah mendasar tersebut di atas saling terkait. Ketimpangan sosial membuat pengawasan masyarakat terhadap perilaku oligarki politik dan ekonomi menjadi lemah, memungkinkan oligarki untuk semakin intensif melakukan praktik korupsi dan kleptokrasi, bahkan menyuburkan *money politics*. Dengan demikian perang terhadap korupsi sesungguhnya harus mengagendakan upaya mengatasi ketimpangan sosial sebagai peta jalan (*road map*)-nya. Kemudian perilaku koruptif dari oligarki juga membuat ketergantungan kepada kekuatan ekonomi asing menjadi bertahan, karena kemandirian ekonomi bangsa akan mengganggu perburuan rente dari oligarki.

Korupsi tidak sekadar fenomena pelanggaran hukum, melainkan juga gejala budaya yang sakit. Gejala budaya yang berorientasi hasil dan bukan proses, pragmatisme yang dominan menekan idealisme, fokus tujuan *to have* ketimbang tujuan *to be*, diperparah dengan tata kelola pemerintahan yang lemah dan solidaritas sosial yang permisif terhadap kemunkaran, membuat peluang praktik korupsi dilakukan siapa saja yang berkuasa.

Untuk itu solusinya tidak cukup penegakkan hukum, melainkan sebuah strategi kebudayaan. Bangsa Indonesia seperti apa yang ingin kita bangun di tahun 2045 saat Indonesia berusia 100 tahun? Dalam kacamata manajemen risiko, budaya korupsi memberi probabilitas tinggi dan dampak signifikan untuk kehancuran bangsa Indonesia secara mental, kemudian secara kapasitas organisasi dan terakhir secara eksistensi.

Edward Gibbon dalam karya monumentalnya, “*The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*” berpendapat bahwa kejatuhan kekaisaran Romawi di barat maupun di timur bukanlah karena bangsa Visigoth dan umat Islam, melainkan karena hilangnya moralitas publik dan *virtue ethics* dalam kebudayaan masyarakat Romawi lebih dari 100 tahun sebelum kehancuran eksistensinya.

*Kasyaf* volume 4 ini menyajikan beberapa artikel menarik yang membedah fenomena korupsi dan kleptokrasi di

Indonesia, seraya menawarkan solusi tata kelola (diri, organisasi, sosial) dan modal sosial sebagai unsur utama dari strategi kebudayaan (Prof. Didik J Rachbini & Riza Annisa Pujarama, Prof. Habibul Haque Khondker, Prof. Syed Hussein Alatas, Prof. Syed Farid Alatas, Ali Audah, Ong Hok Ham, Tere Liye, Medrial Alamsyah).

Kemudian Prof. Faisal Afiff menyajikan pandangan tentang Social Market Economy di Jerman, Yayan Saktiyati menyampaikan perspektif Islam dari perdagangan internasional. Firman Jatnika dan Naqya Syahidati-Alya Afifah menampilkan resensi buku, masing-masing buku Todung Mulya Lubis dan Prof. Thomas Piketty.

Terakhir, setelah sajian Syair Perahu karya Hamzah Fansuri, Darmawan Sepriyossa menutup rangkaian artikel *Kasyaf* volume 4 dengan epilog tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai orang beriman, kita tidak pernah putus berharap kepada Allah akan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagaimana Pak Sudjatmoko pernah menyampaikan: “Optimisme harus mengalahkan realitas.”

Selamat membaca. Wassalamualaikum wr.wb.

Syaiful Rahman Soenaria

# **Ekonomi Politik Korupsi dan Kleptorasi**

Didik J Rachbini & Riza Annisa Pujarama \*)



*Setelah dua dekade revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil dilakukan pada masa Jokowi, yang merupakan peristiwa hebat dan “sangat sukses”. Ini merupakan bukti tercapainya misi untuk melemahkan KPK dari berbagai sendi di dalam sistem pemberantasan korupsi. Pertarungan baik dan buruk untuk melemahkan dan mempertahankan KPK terjadi sejak masa Presiden SBY belasan tahun lalu terutama dari para politisi, partai dan parlemen karena kepentingannya terganggu. Tetapi upaya tersebut selalu gagal karena penolakan rakyat sangat keras dan presiden tidak pernah menyetujui.*

## **Pendahuluan**

Ilmu ekonomi sejatinya harus mengembangkan dua dimensi, yakni ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Dengan mengembangkan kesetaraan dan keseimbangan terhadap keduanya, maka dampak kegiatan ekonomi yang buruk bisa dihindarkan semaksimal mungkin.

Sejauh ini, ilmu ekonomi positif yang terus berkembang, sementara ilmu ekonomi normatif tertinggal jauh di belakang. Ilmu ekonomi positif merupakan suatu teori untuk menganalisa bagaimana ekonomi berjalan dan menjelaskan aneka fakta tentang ekonomi yang berlaku di dunia nyata.

Ilmu ekonomi normatif mengajarkan bagaimana seharusnya ekonomi berjalan dengan landasan norma dan nilai-nilai serta kelembagaan yang semestinya. Ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi misalnya, yang seharusnya berujung pada nilai baik dari ekonomi, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Nilai-nilai di dalam ilmu ekonomi normatif tersebut juga berasal dari nilai-nilai masyarakat, bangsa, undang-undang dan juga nilai-nilai religius, yang mengajarkan kebaikan umatnya.

Nilai dan norma yang baik tersebut semestinya menjadi substansi nilai kebaikan dalam bidang ilmu ekonomi. Kutipan ayat ini bisa memberikan nilai yang baik untuk topik ekonomi politik kleptokrasi dalam makalah ini:

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188)*

Permasalahan ekonomi, kesenjangan, korupsi dan sistem kleptokrasi bertumbuh subur salah satunya terjadi karena ketidakseimbangan antara ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Praktik prinsip-prinsip ilmu ekonomi positif tidak menyertakan nilai-nilai normatif kebaikan dan kemanfaatan untuk umat manusia. Mahasiswa dan sarjana ekonomi di dalam kelas dan bahkan hampir seluruh hidupnya merekam dan mengamalkan ilmu ekonomi positif dan sangat kurang memahami ilmu ekonomi normatif, terutama yang berkaitan dengan nilai, norma, hukum. Dengan demikian, persoalan ekonomi berkembang seperti bebas nilai sehingga tidak memberi kontribusi banyak terhadap keadilan dan pemerataan ekonomi.

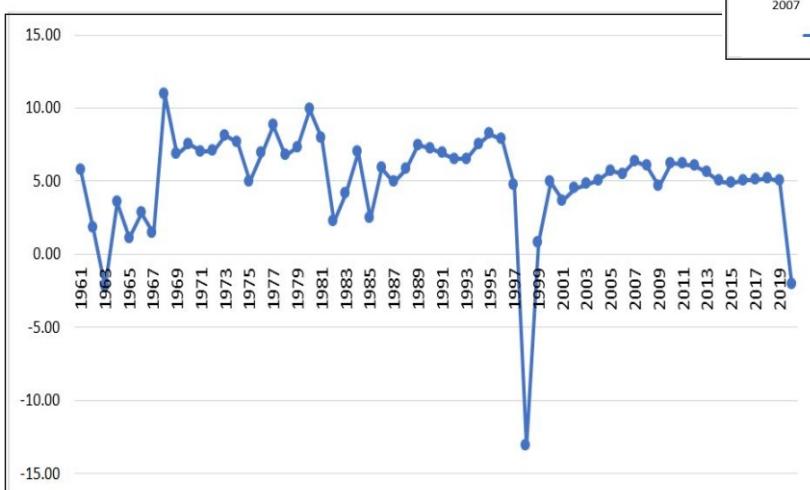
\*) Didik J Rachbini, guru besar ilmu Ekonomi dan pendiri INDEF  
Riza Annisa Pujarama, peneliti dan Ekonom INDEF

## Ekonomi Indonesia

Perumbuhan ekonomi Indonesia selama 3-4 dekade terakhir ini mengalami pertumbuhan yang tinggi dan berselingan dengan pertumbuhan tingkat moderat. Selama itu, ada dua krisis ekonomi yang menghantam ekonomi Indonesia, yakni krisis 1998 dan krisis 2008. Krisis tahun 1998 merupakan krisis besar, yang menghancurkan pilar-pilar ekonomi dan sosial politik sehingga Indonesia harus dan terpaksa melakukan reformasi di segala bidang. Krisis ekonomi 2008 juga sama kadarnya, tetapi tidak menyebar luas menjadi krisis ekonomi total dan krisis sosial politik lainnya.

Sampai akhirnya, ekonomi bertumbuh di atas 6 persen pada masa SBY dengan sentuhan kebijakan pemulihan secara bertahap. Ada keberuntungan juga dimana harga-harga komoditas meningkat karena permintaan dunia naik sehingga mendorong ekonomi tumbuh cukup tinggi.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

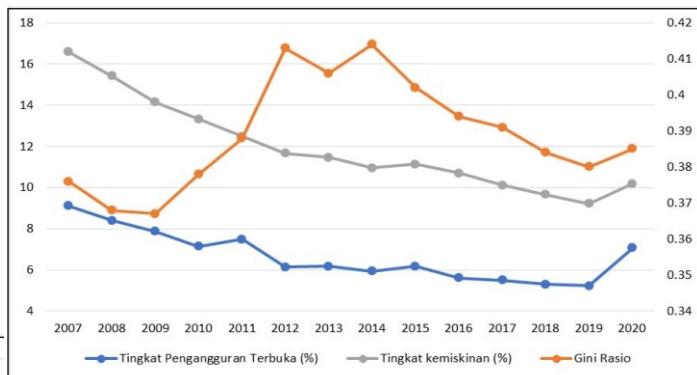


Sumber : BPS, diolah

Terakhir, ekonomi juga masuk ke dalam krisis lagi karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi terus melambat bahkan mengalami resesi di 2021 karena pandemi covid-19 sebagai penyebab utama, bahkan satu-satunya. Sebelum pandemi terjadi performa ekonomi Indonesia terus mengalami perlambatan. Guncangan ekternal di 2019 akibat perang dagang dan turunnya harga komoditas mempengaruhi aliran modal, neraca perdagangan, dan nilai tukar membuat Indonesia tertatih-tatih untuk menjaga pertumbuhan di angka 5 persen.

Angka gini rasio bergerak turun. Angka ini masih relatif tinggi, yakni sekitar 3,8 selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 angkanya memburuk karena faktor pandemi covid-19 ini. Tetapi ukuran angka Gini sebenarnya belum mencerminkan kondisi kesenjangan, yang sebenarnya karena angka tersebut diukur dari pengeluaran rumah tangga. Lagi pula, dalam survei lebih banyak bias menyasar golongan bawah dan menengah saja tanpa mampu menyasar golongan elit atau *super rich*.

Grafik 2. Pengangguran, Kemiskinan, dan Gini Rasio

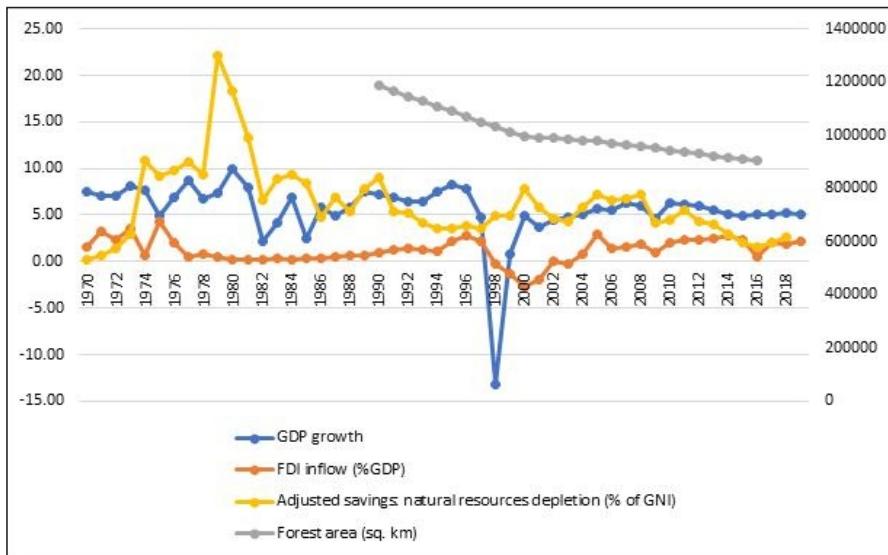


Sumber : BPS, diolah

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebagai kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan ini relatif lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya sehingga bisa dikatakan bukan suatu prestasi khusus. Kalau dikatakan kemiskinan paling rendah sepanjang sejarah ekonomi Indonesia, hal itu berlebihan bahkan menyesatkan. Kebijakan menurunkan kemiskinan lebih rendah kemampuannya dibandingkan periode sebelumnya sehingga penurunan tingkat kemiskinan relatif lebih lambat. Pada masa covid-19 tingkat kemiskinan meningkat lebih tinggi lagi.

Dampak dari pandemi covid-19 adalah peningkatan pengangguran dari sekitar 7 juta orang menjadi 10 juta orang. Ini tidak terhindarkan karena covid-19 benar-benar melumpuhkan sistem produksi nasional, baik industri, pertanian, jasa dan lainnya. Jika diperluas dengan data pengangguran terselubung, maka angka tersebut naik lebih dua kali lipat.

Grafik 3. Aliran Modal Asing Terhadap GDP (%), Luas Hutan, dan Penurunan SDA (% GNI) di Indonesia



Sumber: World Bank (2020)

Di sisi lain, eksplorasi terhadap SDA dan hutan semakin meningkat. Hal ini tanpa diimbangi dengan pengendalian dampak terhadap lingkungan yang baik. Implikasinya adalah meningkatnya frekuensi terjadinya bencana alam dalam negeri terutama bencana banjir dan tanah longsor karena kurangnya daerah resapan air akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan areal perumahan dan destinasi wisata. Pada 2020, BNPB mencatat 1.080 kejadian banjir, 326 kasus kebakaran hutan, dan 577 kejadian tanah longsor.

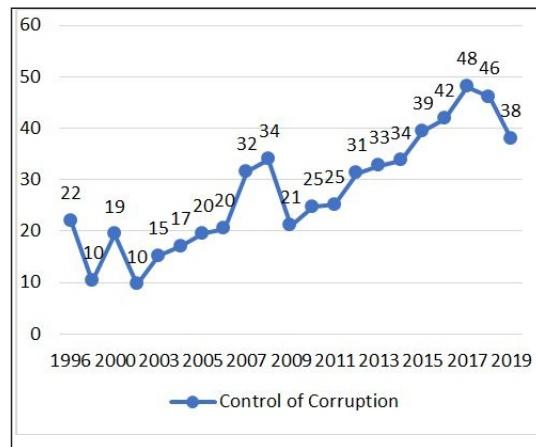
### Korupsi dan Perlemahan KPK

Pada *Corruption Perception Index* 2020 yang dikeluarkan *Transparency International*, peringkat dan nilai Indonesia turun dibandingkan 2019. Gambaran ini menunjukkan kondisi sebenarnya, yang terjadi di Indonesia karena KPK dari waktu ke waktu semakin lemah. Bahkan pada awal pemerintahan Jokowi periode kedua, KPK berhasil dilumpuhkan dengan amandemen Undang-Undang KPK.

Sementara itu, *Worldwide Governance Indicators* yang dikeluarkan *World Bank* juga mencatat penurunan pada peringkat *control of corruption*. *Control of corruption* mencerminkan persepsi tentang sejauh mana kekuasaan publik dijalankan untuk keuntungan

pribadi, termasuk bentuk korupsi kecil dan besar, serta "perebutan" negara oleh elit dan kepentingan pribadi. Semakin tinggi peringkatnya, maka semakin baik.

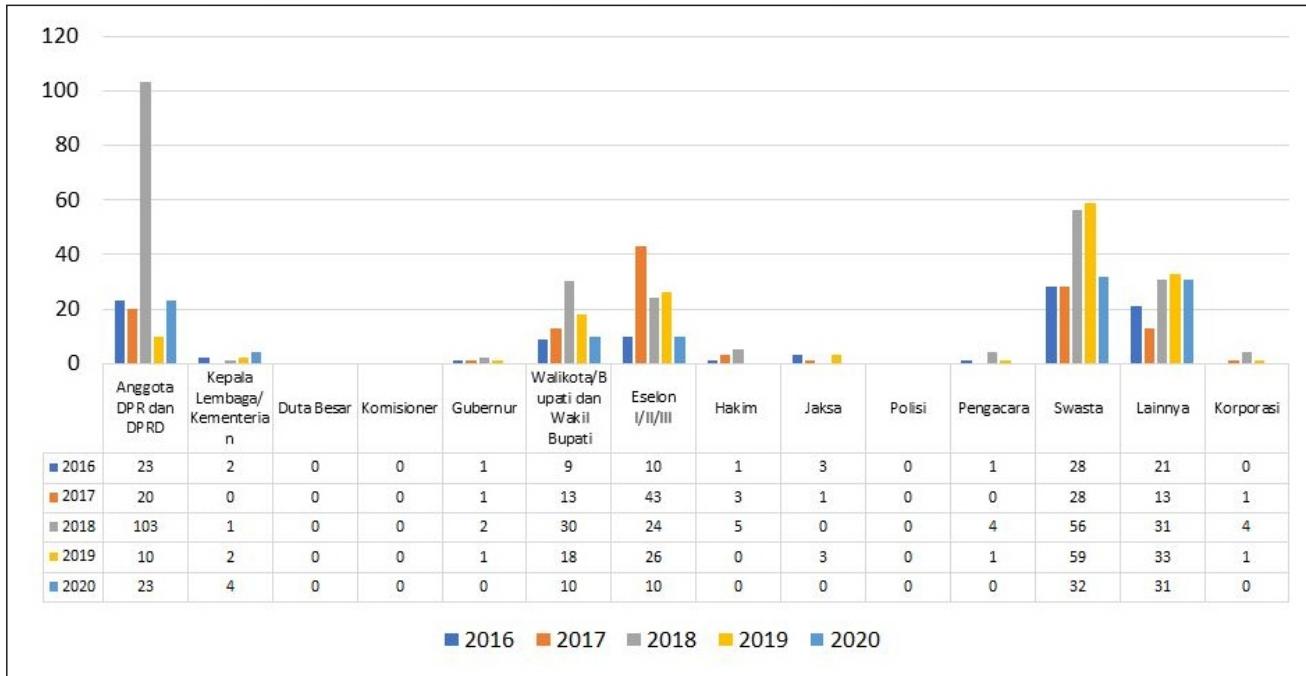
Grafik 4. *Corruption Perception Index*



Sumber : Transparency International

Proses politik pelemahan KPK mendapat tantangan yang besar dengan adanya demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri. Tetapi itu bisa diatasi oleh pemerintah melalui Polri dan juga pengerahan *buzzer*, yang menyasar pada KPK. Penurunan indeks persepsi korupsi ini terjadi karena adanya dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh DPR bersama Presiden. Upaya pelemahan KPK sebelumnya tidak pernah berhasil karena Presiden menolak upaya amandemen Undang-Undang KPK. Tetapi Presiden Jokowi bukan hanya menyetujui tetapi juga mendorong amandemen tersebut.

Grafik 6. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jabatan



Sumber : KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu produk utama reformasi politik 1998. Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] merupakan suatu pencapaian khusus karena hukum pada masa Orde Baru hanya menjadi kepanjangan tangan dan dikooptasi mutlak dalam kekuasaan. KPK berperan sebagai lembaga “extra-ordinary” untuk mengatasi masalah yang “extra-ordinary” pula, yakni korupsi. Perannya selama dua dekade terakhir ini sangat signifikan dimana pejabat-pejabat negara berhasil dirungkus karena menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengambil keuntungan pribadi, kelompok dan kroni di sekitarnya.

Tetapi setelah dua dekade revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil dilakukan pada masa Jokowi, yang merupakan peristiwa hebat dan “sangat sukses”. Ini merupakan bukti tercapainya misi untuk melemahkan KPK dari berbagai sendi di dalam sistem pemberantasan korupsi. Pertarungan baik dan buruk untuk melemahkan dan mempertahankan KPK terjadi sejak masa Presiden SBY belasan tahun lalu terutama dari para politisi, partai dan parlemen karena kepentingannya terganggu. Tetapi upaya tersebut selalu gagal karena penolakan rakyat sangat keras dan presiden tidak pernah menyetujui.

Namun, baru sekarang revisi UU KPK sukses dan sangat berhasil karena lobi partai dan presiden menyetujuinya, meskipun penolakan rakyat sangat keras melalui demonstrasi yang sangat meluas diseluruh negeri. Strategi pelemahan KPK telah berhasil dilakukan pada akhir 2019 dan siapa yang bermain sangat jelas, yakni partai dan presiden. Kesuksesan melemahkan KPK terjadi karena perpaduan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Proses hukum, tangkap tangan yang dilakukan KPK masih terus terjadi sebagai bukti bahwa KPK masih hidup. Tetapi keadaan KPK sudah lemah karena tidak memiliki independensi seperti sebelumnya dimana kekuasaan dapat dengan mudah melakukan intervensi. KPK kini sudah terkooptasi seperti lembaga hukum yang korup pada masa Orde Baru. Peristiwa kemudian membuka kembali Indonesia bisa menjadi negara kleptokrasi dimana kekuasaan mengambil dan mencuri kesejahteraan rakyatnya sendiri.

### Praktik Kleptokrasi

Kleptokrasi diartikan sebagai ‘pemerintahan para pencuri’. Para penguasa bebas melakukan tindakan pencurian aset publik karena tidak ada kelembagaan hukum yang kuat, seperti KPK pada saat didirikannya.

Di dalam sistem Kleptokrasi, pemerintah, pejabat dan penguasa merampok warga

negaranya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Menurut Acemoglu, Robinson, & Verdier (2004), kleptokrasi yang menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat tidak efisien, mengambil alih kekayaan warganya, dan menggunakan hasilnya untuk kepentingan atau konsumsi mereka sendiri. Sementara itu, kepentingan rakyat banyak ditinggalkannya.

Demikianlah sistem itu berjalan ketika kelembagaan dirusak dan dilemahkan seperti KPK pada saat ini. Sementara itu politik memerlukan biaya yang besar sehingga politisi masuk dengan mudah ke dalam sistem kleptokrasi tersebut. Dalam kasus pelemahan lembaga hukum seperti KPK ini, maka teori Lord Acton (1833-1902) berlaku, "*Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.*"

Perlemahan KPK dan pemerintahan yang semakin represif menambah derajat sistem ini menjadi sistem kleptokrasi yang kuat. Regim yang represif dan Kleptokrasi berjalan seiring seperti satu mata uang dengan dua wajah, yang saling melengkapi dan saling menguatkan. Kekuasaan yang represif mulai terlihat tandatandanya ketika kekuasaan pemerintah sebagai lembaga eksekutif sudah tak terbendung dengan disahkannya UU ITE di 2016, yang kemudian diterapkan dengan gegabah untuk memberangus rakyat yang kritis.

Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada awal 2021 memberangus hak budget DPR, sehingga DPR sekarang kehilangan hak konstitusinya atas anggaran. Ini sangat ironis dan fatal sehingga kekuasaan pemerintah eksekutif menjadi sangat kuat dan DPR lemah, yang membuka ruang dan kesempatan menjadi represif.

Gloster-Coates & Quest (2014) berpendapat bahwa kleptokrasi umumnya mengacu pada sistem aturan, yang memberi kesempatan pada korupsi, tindakan korup dan praktik yang sewenang-wenang. Jadi dimana terjadi pemerintahan yang represif, praktik kleptokrasi bertumbuh dengan subur. Keduanya, kekuasaan otoriter dan praktik kleptokrasi berjalan seiring saling menguatkan satu sama lain tetapi rakyat kebanyakan menjadi korbannya.

Kleptokrasi secara umum merupakan suatu bentuk pemerintahan yang sangat merugikan rakyat secara masif dan mendalam. Menurut Praktek kleptokrasi berdampak buruk pada hak asasi manusia terutama hak sosial ekonomi. Hal

ini bertentangan dengan hak sipil dan politik, hak realisasi sosial ekonomi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan, alokasi yang tepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, sementara penyalahgunaannya sering kali mengakibatkan kesulitan dan kerugian yang parah.

Acemoglu, Robinson, & Verdier (2004) berpendapat bahwa kleptokrasi muncul dalam politik dan demokrasi yang dilembagakan dengan lemah, bahkan dirusak sehingga hanya sistem kekuasaan yang dominan. Lembaga formal tidak bekerja secara baik, bahkan rusak dan tidak menempatkan pembatasan yang signifikan pada tindakan politisi atau membuat mereka bertanggung jawab kepada warga negara. Praktek pelaksanaan UU ITE oleh aparat hukum yang bersifat sewenang-wenang, memberangus kritik, anti demokrasi adalah bentuk kekuasaan yang represif, yang kemudian memberi peluang melakukan korupsi masif dan praktik kleptokrasi yang leluasa.

Lebih jauh lagi Acemoglu, Robinson, & Verdier (2004) mengungkapkan bahwa jika menggunakan logika strategi *devide-and-rule*, masyarakat berada di bawah keinginan penguasaan "personal rule". Merskipun ada undang-undang tetapi interpretasinya dijalankan demi kepentingan personal penguasa seperti dalam kasus UU ITE. Metode yang digunakan oleh para kleptokrat untuk mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan yang dilembagakan dengan lemah sekaligus mengejar kebijakan yang merugikan masyarakat.

Kleptokrasi terjadi ketika kelompok produsen, pengusaha atau perwakilan politik mereka lebih berpandangan sempit, mengerahkan kekuasaannya untuk mengambil rente sebanyak mungkin. Prosesnya bisa legal melalui undang-undang dan peraturan, tetapi sejatinya adalah penghisapan kesejahteraan rakyat oleh elit penguasa dan pengusaha. Maka kurang memberi bobot pada keuntungan masa depan di bawah demokrasi. Demokrasi yang berkembang adalah demokrasi elit dimana rakyat cukup dibeli dengan uang pada masa pemilu. Kleptokrasi hidup berdampingan dengan praktik demokrasi dengan politik uang yang masih. Ini terjadi dan terlihat sangat gamblang dalam demokrasi Indonesia.

Kleprokrasi terjadi juga ketika ada lebih banyak bantuan asing kepada penguasa, yang

dapat dia gunakan untuk menuap kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Utang dari luar negeri menjadi sasaran kedua belah pihak, pemberi utang dan kompradornya, seperti terlihat pada *mark up* proyek-proyek bantuan asing tersebut lebih tinggi dari harga seharusnya. Itu berarti ada banyak penghisapan rente ekonomi.

Kleptokrasi juga terjadi ketika ada perijinan eksplorasi sumber daya alam yang lebih besar yang dapat digunakan untuk menuap kelompok-kelompok penting. Perizinan eksplorasi sumberdaya alam di Indonesia di tangah pemerintah daerah dengan maksud untuk desentralisasi. Tetapi ketika kondisi demokrasi lemah dan politik uang marak, maka eksplorasi tersebut bertumbuh tanpa melihat batas kapasitas dan kemampuan lingkungan hidup. KPK melakukan kontrol terhadap hal ini dan banyak kepala daerah yang ditangkap. Ini merupakan indikasi praktik kleptokrasi, yang meluas di daerah.

Indonesia pasca-reformasi 1998 membenahi sistem pemerintahan agar menjadi lebih baik dan lebih transparan. Penguatan pemerintahan ini salahsatunya adalah dengan membentuk lembaga antikorupsi dalam upaya menyelesaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir ini performa korupsi di Indonesia mulai mengalami penurunan. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, sementara tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan sulit diturunkan. Kondisi ini diperparah dengan maraknya korupsi yang terjadi, bahkan dana bantuan sosial untuk penanganan pandemi covid-19 juga dikorupsi.

## Penutup

Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan moderat selama empat dekade terakhir ini. Berbagai cobaan krisis telah menimpa ekonomi Indonesia, yakni krisis 1998 dan krisis 2008. Kini krisis itu datang lagi dalam bentuk dua wajah, yakni krisis ekonomi dan krisis pandemi. Tentu saja ini cobaan yang cukup berat datang dari luar sistem ekonomi Indonesia. Masalahnya menjadi krusial ketika dari dalam juga diterpa masalah korupsi, perburuan rente ekonomi dan praktik kleptokrasi di pusat dan daerah.

Indeks persepsi korupsi Indonesia 2020 yang dikeluarkan *Transparency International* menunjukkan trend menurun dibandingkan tahun 2019. Masalah korupsi tidak justru membaik tetapi memburuk sejalan dengan upaya politik pelemahan KPK yang sukses. Itu berarti peluang praktik korupsi di dalam politik dan kekuasaan semakin terbuka.

Indikator-indikator praktik kleptokrasi di Indonesia menunjukkan sinyal yang semakin kuat. Tidak mudah mengatasinya, tetapi sebenarnya sudah ada panduan normatif Pancasila dan UUD 1945. Kita memiliki peluang untuk keluar dari jerat kleptokrasi atau setidaknya mengurangi dengan cara meningkatkan tata kelola institusi pemerintah sehingga terbuka dan transparan. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam mengawasi Pemerintah.

## References

- (2020). Retrieved from [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org).
- (2021). Retrieved from [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).
- Acemoglu, D., Robinson, J. A., & Verdier, T. (2004). Kleptocracy and Divided And Rule : A Model of Personal Rule. *Journal of the European Economic Association, April-May 2004*, 2(2-3):162-192.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Kriminal 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Politik 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kriminal 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Gloster-Coates, P., & Quest, L. (2014). Kleptocracy : Curse of Development. *International Social Science Review, Vol. 80, No. 1/2 (2005)*, pp. 3-19.
- Nnamuchi, O. (2008). Kleptocracy and Its Many Faces: The Challenges of Justiciability of The Right to Health Care in Nigeria. *Journal of African Law, Vol 52, No.1*, pp.1-42.



# A Sociology of Corruption: Reexamining the Contributions of Syed Hussein Alatas

Habibul Haque Khondker \*)

## Abstract:

This paper examines the problem of corruption not only as a social problem but also as a problem that illustrates certain problems in agenda setting in sociology as an academic discipline. An answer to this question: why corruption remains outside the field of sociology, and who charts the sociological agenda can be found in the works of Professor Syed Hussein Alatas, a prominent Southeast Asian sociologist. He wrote about corruption as far back as in the 1960s. Sociology of corruption is a field that will have his signature. In recent years, a number of new books including an updated version of Professor Alatas; s book have been published. For the economists who are too busy living in the certainty of clean models of abstract quality such messy things as corruption threaten the purity of their models. Gunnar Myrdal in his *Asian Drama*, identified the problem of corruption as a serious bottleneck for Asian development.

The problem persists 40 years since Myrdal's analysis. In a number of countries in the developing world, corruption is the name of the game. It has become a part of the fabric of society. Yet, sociological theorization and analyses are lacking. This paper examines both the problem and its epistemic status in the tradition of sociology of knowledge. . .

*"By nature, the Malay is an idler, the Chinaman is a thief, and the Kling (Tamil) is a drunkard, ver each. in his special class of work, is both cheap and efficient, when property supervised"*  
CG. Warnford-Lock (1907) quoted in Alatas (1977)

*When King Pyrrhus invaded Italy, after he had reconnoitered the armed forces that the Romans had sent out against him, he said, "I don't know who these barbarians are"--for the Greeks called all foreign peoples barbarians -- "but the organization of the army I see before me is not at all barbaric. " The Greeks said the same when Flaminius invaded their country, as did Philip, when he saw from a hill the orderly layout of the Roman camp which had been set up in his kingdom under Publius Sulpicius Galba. These examples illustrate how one must avoid accepting common prejudices: opinions must be judged by means of reason, and not by adopting common opinion. Monatigne. On Cannibals (1580)*

## Introduction:

At random, if one picks a newspaper, say, *The Straits Times* (Singapore) of March 5, 2004 one will read, *inter alia*, stories related to corruption - its absence or presence. "Singapore is still regarded as the least corrupt country in Asia, according to a poll of foreign business executives released yesterday.

On a scale of zero to 10 - with 10 being the worst - expatriates surveyed by the Hong Kong-based Political and Economic Risk Consultancy (Perc) gave Singapore a score of 0.5. Japan was a distant second with 3.5, and Hong Kong was in third place with a score of 3.6. Indonesia, with 9.25, was the worst performer..

\*) Professor, Humanities and Social Sciences, Zayed University, Dubai, UAE

'Fear of punishment acts as an effective deterrent and the (Singapore) Government is very efficient about policing itself,' said Perc in its report. 'The top-down nature of the anti corruption fight in Singapore has worked as well as it has not only because the country's leaders have pushed the campaign, but also because they have personally been beyond reproach."

Singapore, according to Professor Alatas, is not corruption free. But it is one of the crowning achievements of the leadership of Singapore that they ensured the fact that an entire generation grew up not experiencing first hand what corruption is; a generation that did not have to bribe a single cent to get the services that are due to them.

The critics of Singaporean authoritarian style should think again before they invoke the mantra of human rights. Corruption is humiliating for the clients and a violation of their human rights. Preempting corruption contributes to reinstating dignity of the citizenry and their human rights. The cultural argument has some force if it is applied with regard to the responses to corruption. For example, the repressive style of administering rules in China can be understood, if not defended. It may look brutal to the outsiders, especially in the Western eyes, but some drastic measures are needed in a country with a teeming population. We do not have to follow the Chinese style of punishment such as public executions of the corrupt officials. However, one has to consider the simple fact that if the sequence of crime, justice, and punishment is not taken seriously the whole fabric of society will be threatened. If rule of law has to be more than a slogan, certainty, evenness and fairness in the implementation of rules must be ensured.

What is interesting from a sociology of knowledge point of view is not that corruption is rife in many parts of Asia and pretty much under control in Singapore, it is the absence of sociological focus on this seemingly intractable yet ubiquitous problem. Professor Alatas was one of the few scholars along with Myrdal who identified this problem in the 1960s and 1970s. .

My hypotheses are as follows:

1. Sociology in Asia was simply imitating (or aping, by that I mean copying without thinking) the so-called western sociology. In some cases, sociology was transplanted by

the European and American social scientists, in other places local sociologists who were trained overseas came back to teach sociology and applied western sociological problems quite mechanically.

2. Professor Alatas was a lonely voice who remained isolated as he did not share the common paradigm shared by the rest of the social scientific community in Southeast Asia. Even today, an outlier has to face the same fate. It is not the import or relevance of one's views but the topicality of the ideas in terms of dominant paradigms that dictate the acceptability and popularity of themes, topics and research areas in social science. And very often these dominant paradigms are imposed from above from the centers of metropolis.

3. Major events (defined as major by the western governments and media shape intellectual agenda. In the ambit of Cold War, corruption as a social process was not on the priority list of the western governments. A close parallel can be found today. Since the terrorists attack of 9/11, the western world and its allies have suddenly awakened to the reality of Islam as a religion and "Islamic societies".

More research money, publications, publication and research opportunities are now available on this topic than any other areas in social science. This is most unfortunate. The autonomy of intellectual inquiry is under serious challenge. As more researchers undertake research on the spread of Islamism, fundamentalism, political Islam and so on as if it is a form of spreadable disease or virus, a whole new intellectual field will be born or similar areas that remained idle or dormant will return to life. Some old publications will be dusted off and reprints will make it to shelves of the bookstore or libraries.

#### **More Evidence of Corruption:**

Let's look at *The Straits Times* of July 18, 2001 one would read the following: Alleged Corruption: Cops facing sex bribe charges now on trial" (p.H4). Or, let's take the issue of *The Sunday Times* (Singapore) of January 23, 2000 as an example. There are three reports on corruption. One headline reads: "Terengganu BN was corrupt, claims new MB"

(p.31). A report followed on the allegation made by the new administration about the previous administration run by the Barisan

Nasional (BN). The new Chief Minister or Menteri Besar (MB) as the post is known locally from the Islamist party, The Parti Islam (PAS) claimed that "he had evidence that the previous administration was allegedly involved in some irregularities in the award of government contracts".

Another item on the same day's newspaper captions: "Three-Gorges Scandal: Dam project hit by billion-dollar corruption" (p.18). It read: "Officials uncovered a new corruption scandal, this time involving the high-profile Three Gorges Dam project, where five billion yuan (S\$963 million) in relocation funds was embezzled, state media reported."

And on page 5 of the same newspaper there is a story on former German Chancellor Helmut Kohl. The media is rife with corruption. Three Gorges Dam is not the only corruption story from China, the story of corruption in Xiamen, a city in the south-eastern province of Fujian, one of the four Special Economic Zones revealed a new twist.. It was reported that the top leadership in China is worried that so many top politicians may be named in the scandal that it could be even a liability in terms of the Party's credibility. There is a hint of a cover-up (*The Sunday Times* (Singapore) January 30, 2000 p.36). The Finance Minister of Indonesia's three month old democratic government, Mr. Bambang Sudibyo even wondered whether the government has enough power to nail corrupt tycoons tainted by bank-loan scandals (*The Straits Times*, January 28, 2000 p.42).

The media reports - just take the examples of China and Indonesia or Germany - show an intricate relationship between corruption and economics on the one hand and corruption and power politics on the other. The relationship between corruption and politics is interesting because it helps us understand the nature of the state itself. In early July 1999, a controversy erupted in Bangladesh over the corruption report put out by Transparency International, a Bonn based corruption watchdog body. The report ranked Bangladesh as the most corrupt country of the world. Now while the report because of the shaky nature of the data asked to use caution, the anti-government frenzy tended to make it a political football. However, then there was a streak of national pride that led to downplaying the findings of the report.

Ironically, despite media attention, the subject of corruption has received scant attention from the social scientists. Social scientists in the so-called developing countries were too busy pursuing various theoretical models and theories that reeked theoretical fashions of the day were oblivious of the problems that were deeper and complex and were right there at their own backyard..

An answer to this puzzle: why corruption remains outside the field of sociology, and who charts the sociological agenda can be found in the works of Professor Syed Hussein Alatas.. He wrote about corruption as far back as in the early 1960s. Sociology of corruption is a field that will have his signature. In recent years, a number of new books including an updated version of Professor Alatas's book have been published. For the economists who are too busy living in the certainty of clean models of abstract quality that such messy things as corruption threaten the purity of their models. Some economists who seek to engage with the problem, corruption is a rent-seeking behavior. But most who tend to neglect it, it is just another externality.

Gunnar Myrdal in his *Asian Drama*, identified the problem of corruption as a serious bottleneck for Asian development. The problem persists 40 years since Myrdal's analysis, but in a more acute form much more dramatic form. In a number of countries in the developing world, corruption is the name of the game. It has become a part of the fabric of society.

"Corruption is a form of crime and it should be treated as such," commented Professor Syed Hussein Alatas, the foremost sociologist of corruption. While talking to the present author a couple of years ago, he stated that his book *Sociology of Corruption* first published in 1976 is being reprinted by Prentice-Hall. The republication in a way signifies a renewed interest in the subject of corruption, especially, in the wake of the deepening of the financial and economic crises worldwide. Before the crisis hit the Southeast Asian region, there was a misperception shared by both lay public and some academics that there are "bad corruption" and "good corruption". The latter type characterized countries like South Korea and Indonesia where widespread corruption went hand in hand with rapid economic growth. "Bad corruption" preempted economic growth.

That notion is now being seriously challenged. Corruption, like crime, is a threat to society and should be dealt with as such. However, there is no point trying to justify it in terms of levels of political economic development or culture. In terms, corruption raises the cost of doing business. As a recent commentary in Economist argued that it follows the style of protection racket of the Mafia. The rate of protection fees keeps increasing to a point where it becomes unbearable for the system. Corruption is corrosive and all efforts must be made to stamp it out..

My first encounter with Prof Alatas took place in 1987 when I wrote a paper titled "How to Think About Corruption in Bangladesh". A sociology colleague asked me to send Prof Alatas, Head of Malay Studies Department at NUS a copy which I did and then met him.

His remarks were encouraging but he asked me to look at actual cases of corruption in Bangladesh. We were talking about corruption way before Bangladesh came to be known as no. 1 in the Transparency International CPI. During that conversation Prof Alatas raised the issue of hegemony of western knowledge. He gave me the example of a western (let's say an American economist who visits Singapore for a year write a book, Now every one will rush to buy read the book and accept everything unquestioningly but if we write a book after several years of experience in USA people will look at it as a joke.

Of course, there are scales and degrees of corruption. The response of corruption must be proportionate. But there is no point going about viewing corruption as a lubricant in a rusty system. Again Professor Alatas's point is worth recalling. For him, not that a society or administration can be completely free from corruption, the point is how the leadership, the centre of power, responds to it. The key issue here is tolerance. A country like Singapore has a very low tolerance of corruption. In most developing countries the levels of tolerance vary from very high to moderate. Professor Alatas uses the phrase "tidal corruption" to refer to the situation in some of the developing countries. "It is one that floods the entire state apparatus including the centre of power, immersing everything in its path. It multiplies the number of perpetrators more rapidly than any other type of criminal behaviour, paralyzing the administrative machinery and dampening the

enthusiasm of sincere and capable civil servants" (1990:990).

"The present Singapore society is a fertile source for reflecting on the problem of corruption. We mean by the problem of corruption not the mere existence of corruption, here and there. This is present in Singapore. Crime is present everywhere but it is not the same as the control of authority by criminal elements. When we say there is no problem of corruption in Singapore we mean that the authority is not dominated and manipulated by corrupt elements; that it is possible for a generation to go through life without having to bribe government servants in their transactions with the authority; that taxes are properly collected; that the courts are not at the service of the corrupt; that the police perform their duty without bribes; and so do other services for the public." (Alatas, 1989:985).

Yet once in a while international media raise the issue of nepotism in Singapore. In an interview in Davos, Switzerland with Mr. William Safire of the New York Times Mr. Lee Kuan Yew, the architect of modern Singapore, provided some perspective on the charge of nepotism, which is clearly a form of corruption. In answer to the question of Mr. Safire whether Mr. Lee's son be the Deputy Prime Minister if he were not his son, Mr. Lee replied: "If he were not my son, he would be the Prime Minister." No one questions the credentials of Singapore's Deputy Minister and many would agree with Mr. Lee's claim.

Alatas sought to conceptualize corruption historically, by questioning a simple-minded Marxist explanation. In his words: "The economic system of (its) ASEAN countries is capitalism. The degree and manifestation of corruption in Thailand, the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore differs greatly. In Thailand, The Philippines, and Indonesia, corruption is rampant. In Malaysia it is not rampant, and in Singapore it is hardly noticeable. The differentials development of corruption in these countries cannot be explained by the capitalist system. Furthermore, capitalism in Western European countries is not associated with corrupt governments. Consequently, here capitalism by itself cannot be the cause of widespread corruption.

This type of widespread corruption I have called tidal corruption. It is one that floods the entire state apparatus including the center of

power, immersing everything in its path. It multiplies the number of perpetrators more rapidly than any other type of criminal behaviour, paralyzing the administrative machinery and dampening the enthusiasm of sincere and capable civil servants. (1990)

The inadequacy of the historical-context approach as presented by Marxists and certain functional sociologists is apparent from their failure to explain both corruption as a universal phenomenon affecting all complex social systems in all ages and its different manifestations within the same system at different times. The Marxist analysis does not descend to a level sufficiently microscopic to see the operation of hitherto neglected organisms. It is at this level of analysis that we find the significant causes of corruption, the most immediate and decisive, the leadership and their cliques. (990).

Alatas provided a conceptualization of corruption that aimed at universality (1986:21). He finds a close parallel between corruption in Latin America and corruption in Southeast Asia. He sincerely values the importance of empirical data with regard to corruption. His main comment on my paper "How to think About Corruption In Bangladesh" was that I need to provide more empirical data, more cases of concrete corruption. He recognizes the problem of doing empirical research on corruption because the data are not readily available..

When Prof Alatas and I had these conversations, Transparency International was yet unborn. TI was set up only in 1999 based in Berlin. Alatas has no aversion of so-called Western research method, what he emphasizes is taking the context or milieu into account. Nor is he happy with the idea that some corruption such as bribe is good as a lubricant for business. He takes exception to Weiner's politics of scarcity thesis. Alatas conceptualizes corruption by drawing upon the work of Wang An Shih (1021 - 1086), the great Chinese reformer. For Wang, corruption was rooted in bad laws and bad men. Alatas finds Wang's analysis "extremely instructive". Wang classified human beings into two groups, the morally mediocre and the morally high. .

Changes of fortune did not affect the latter. The danger comes when the moral mediocrities gained control of government. In the last analysis the two absolute prerequisites against

corruption were power holders of high moral caliber, and rational and efficient laws. Neither could function without the other. Both had to be present for any effort to be successful...

The problems confronted by Wang An Shih in eleventh century China have again emerged under a new guise in contemporary Indonesia and many other Asian countries (Alatas, 1986:6-7).

Ibn Khaldun (1332 - 1406), a scholar and a man of action sought to eliminate corruption in his capacity as a judge but failed. Khaldun considered the root cause of corruption to be the passion for luxurious living within the ruling group. It was to meet the cost of luxurious living that the ruling group resorted to corrupt dealings. (Alatas, 1986:7-8).

Alatas identifies three types of corruption: bribery, extortion, and nepotism. (1986:9). And he refers to Wertheim in that discussion who argued that extortion and embezzlement are important aspects of public corruption. Lest it might give one an impression that Alatas was using his teacher's framework, it is important to remember that the first contribution of Alatas on corruption goes back to a short article that he published in 1956.

In that article, "Some Fundamental Problems of Colonialism" he identified three types of corruption. "One comprises bribery, theft, embezzlement, extortion, and so on. The second is political corruption involving both individuals and groups. This type of corruption usually takes the form of striving for party or individual interests without moral considerations. The third type of corruption is the weakening of the moral impulse expressed by an attitude of comparative indifference towards corruption itself and other vices. Colonialism has helped to generate the second and the third type of corruption in no small degree. (Alatas, 1956: 9-10).

"To allow these countries to drift in the manner of Europe following the Industrial Revolution would be catastrophic. To allow the negative forces released by colonialism to continue unchecked is an invitation to disaster. The only alternative is the execution of a sound and profound planning.... This should be our answer to colonialism, not demagogic, xenophobia, not an empty glorification of the past, or bombastic speeches, not an attitude of

laxity towards truth and virtue, and neglect of the common welfare. Every problem faced by a society in a given time and place, is an intellectual and moral problem and for this reason our attempt to solve the problems created by colonialism must evidently be based on thought, action and moral values. (Alatas, 1956:10).

From above, it becomes clear that Alatas was examining corruption not just as a problem of governance but sought to view it broadly as a social phenomenon which he sought to explain in terms of other "social facts". In providing a macro sociological and historical framework for understanding corruption he introduced the context of colonialism.

However, Alatas's position is not that of nativism, he alerts us to avoid "xenophobia and empty glorification of the past". It is also evident that Alatas is concerned with universal moral values. He does not show any sympathy for a relativistic position. It is his study of corruption that makes him a universalist.

We could go on talking about forms of corruption and the sociological framework that Professor Alatas introduced to study it. But this would be only a partial understanding of the contributions of a sociologist who developed an original insight into the study of society combining historical sociology, structural sociology and a healthy skepticism towards classical sociologists. His use of classical sociology alerts us at once of the usefulness as well as the limitations. His sociological analyses clearly do not reject the contributions of the giants on whose shoulders we stand, but they portray a less imitative approach. It is important to try to understand the sociological contribution of Alatas both in the area of concrete research on practical social issue (i.e., corruption) and theory.

How should we understand social categories? As universal properties; or as particular events? Is there a singular modernity? Or, are their multiple routes to modernity, or multiple variants of modernity? Is there an Asian or Southeast Asian, or Indian tradition of sociology?

Here, it would be pertinent to discuss Alatas's views on the state of social sciences in Asia a subject that he discussed in 1969. "There is only a small minority among Asian social scientists who feel the need to develop an autonomous a creative social science tradition relevant to Asia as well as to the general

development of social sciences. The great majority of them are merely extending the use of the social sciences current in Europe and America without the necessary adaptation which the very scientific consciousness itself, if present, would dictate us to accomplish. There is here not only a cultural lag in the domain of intellectual consciousness, but also an indication that in the world of learning the Asian scholars are still under intellectual domination." (1969:2).

"We need a sociology of social scientists in Asia. We have to subject their scientific thought and activity to an analysis of the kind developed by the sociology of knowledge."

He argued that Asian social science can be interpreted as what the economists call "demonstration effect". "The demonstration effect is actually part of a more general tendency called by psychologists and social anthropologists "diffusion"" Like demonstration effect, "The main drive in assimilation of social science knowledge from the West is the belief in its utility and superiority". Other similarities with demonstration effect are: (a) frequency of contact, (b) weakening or breakdown of previous knowledge or habit, (c) prestige accompanying the new knowledge, (d) that it is not necessarily rational and utilitarian. The spread of social science knowledge in Asian countries takes the form of an uncritical demonstration effect. Alatas points out that even some Western scholars such as Gunnar Myrdal stressed the need for the creation of an autonomous social science tradition in Asia and other developing regions. (1969:3).

An American scholar also pointed out that traditional concepts and theories have lost their relevance. To some extent the current disenchantment with the rate of economic development in many countries is the result of the inadequacy of theoretical frameworks to diagnose the nature of the problem and to prescribe appropriate course of action" (Kapp, quoted in Alatas, 1969:4).

Alatas was not so much concerned with the Western versus Eastern economists, his critique was basically directed against those works that lacked rigour. For example. Alatas took Kuznets to task for offering propositions that were not "empirically verified in a reliable manner" (1969:6) as he compared it against the work of Gerschenkorn. "Unlike the comparative study attempted by Gerschenkorn, based on definite historical cases, utilizing numerous historical data, offering conclusions derived directly from those data, Kuznets' comparative study has

not been very helpful. It does not reveal to us the interplay of variables in the process of development. The general summary conclusions are useful only to the uninitiated." (Alatas, 1969:6). Alatas raised the interesting point that the work on origin of capitalism in the West is based on reference to concrete historical and sociological data, but not the works on Asia by the "absentee foreign scholarship". (1969:7).

In another context, he criticizes Herskovits for viewing entire indigenous tradition of Africa as an undifferentiated single tradition. His second criticism is inadequacy of data or data-driven knowledge. When Herskovit alleges that the Sudanese are not punctual, he, according to Alatas, did not consider that as Muslims they are very punctual with regard to breaking fast or performing Friday prayers, so a Sudanees is not entirely devoid of the sense of punctuality (1969:10). Alatas then refers to a chapter of the Quran "Al-Asr (The Time) and then refers to the Hsiang-yin or incense seal in China as an ingenuous device to measure time. Here he quotes from the Transactions of the American Philosophical Society.

What is striking his breadth of knowledge as well as his originality of ideas and his penchant for interdisciplinary analysis. In another context, he wrote about the need for bringing the social sciences to bear on the interpretation of archeological evidence to build historical knowledge based on data.(1964:31).

The issue of western hegemony was developed in his article on captive social science social science is dominated by the west but then there is a complicity of our acceptance. In an article written in 1969, Alatas stated: "An uncritical imitation pervades almost all the entire domain of the scientific intellectual activity. All its major constituents such as problem setting, analysis, abstraction, generalization, conceptualization, description, explanation and interpretation, each and everyone of them, has been affected by this process of uncritical imitation" (1969:4).

Critique of an uncritical imitation should not be confused with a wholesale rejection of the so-called western social science. In discussing economic development, Alatas enumerates the following "determinants of economic development": (a) the historical sociological, (b) the geographical, (c) the strictly economic, (d) the political (e) the psychological, and (g) the representational aspect, in terms of both positive and negative collective representations" (1965:7). Alatas takes a holistic

position that is not too different from that of Fernand Braudel. He specifically mentions Weber's contribution in this regard, especially the point of collective representation or broadly the cultural factor. His "historico-sociological" factor has close parallel with what Skocpol and other contemporary historical sociologists would call comparative-historical or comparative social structural approach.

The theoretical point is: can we divide the world neatly between the west and the east? No. the geography of east and west keep changing.

Sociological traditions are often centered around national traditions which allows us to speak of a German sociology as opposed to Korean sociology. In the same vein, we often talk about continental sociology, i.e., European versus North American, or Asian sociology. Or one could talk about sociology in ideological terms, at least, that was the sociological milieu within which I had had my first exposure to sociology. Dhaka University sociology department was the oldest sociology department in what became Bangladesh. Unlike sociology in Singapore which was born in the same year as Singapore, the country itself, sociology in Bangladesh predates Bangladesh. Sociology came to Dhaka, thanks to UNESCO, in 1956. Bangladesh was born in 1971. In Dhaka University those days, one marked a clear distinction between Bourgeoisie sociology versus Marxist sociology. Needless to say, all young Bengalis - myself included - belonged to the right kind, i.e., the Marxist camp. In this intellectual tradition of taxonomy, what is the point of looking critically the sociological oeuvre of a single sociologist? This paper clearly bucks the trends and explores the sociological contributions of one sociologist, Syed Hussein Alatas. But why? This paper is an attempt to answer that question.

From WMD to a wider vision of sociological tradition. No, WMD does not mean weapons of mass destruction or deception. This means White, Male Dead aka Weber, Marx and Durkheim. The point is that there are multiple traditions in sociology, sometimes, individuals represent and are carriers of traditions. Young Marx wrote, and Braudel quoted him approvingly, "society is thinking through me". In a Mannheimian sense, it is very important to consider what would now be called, the social embeddedness of knowledge, even if we look at the individual but it is also plausible to look at the individual author as a representative of "embodied history" as opposed to "objectified history" to borrow a phrase from Bourdieu. Sure,

it is impossible to separate the sociology of Syed Hussein Alatas from the biographical and intellectual experience, his training in Holland under Professor Wim F. Wertheim and so on.

But here the main purpose of looking into his work is to see him as an exemplar. There are two broad areas of sociology in his work: studies of corruption for which he was a pioneer; his other contribution was social epistemology, the idea of captive mind. Are these two contradictory positions? No. In his work on role of religion in Asian development, captive mind and so on, he is making a case for what - later on came to be known as multiple modernities. That is, one can be modern without being western to the dismay of modernization theorists for whom modernization was a code word for westernization, more suitable for a post-colonial world. Yet, his approach to corruption is premised on some level of universal and invariant definition of corruption. If we do not start with a clear definition of corruption, and start off with the premise of relativism we could endlessly argue that what is corruption from your point of view is an integral part of my cultural practice. Take the example of anthropologist who came to the Andamans and found that he natives stared helping themselves with his belongings. He understood why previous visitors to the island, the missionaries and so on characterized that islanders as thieves, etc. He began to understand that the absence of private property in their culture is the reason for their behavior. Fine, But this would not work in a modern society.

No court eas will accept this argument from a defense lawyer. Hmong people stole their brides, in modern society that will be interpreted as kidnapping and jail terms will await the hero, the bridegroom.

Universalism is not a problem but the universalism has be true universalism not western science dressed as universalism. We need to engage in a dialogue with the external and the internal. The engagement has to take place at several levels. Between theory and research - concepts and empirical data, between academi and policy makers, between the state and the civil society, between the scientists and the lay public. The more dialogues we have the better off we are. In this dialogue of course, intellectuals have a great role and responsibility.

Prof Alatas has given considerable amount of thought to the question of intellectuals and the role in Asia. Sociology straddles the third culture between science and art. CP Snow's

celebrated two culture theory has outlived its utility. Sociologists as public intellectuals. In his own sociological research and activism, Alatas has demonstrated how these two roles can be fused. His point that political leadership that lacks ideals is an important point. Many of the countries where corruption is minimal are countries characterized by leaders with high moral standings.

In his trail-blazing *The Myth of the Lazy Native*, Alatas stated: "It is the thesis of the book that the image of the indolent native was the product of colonial domination generally in the 19th century when the domination of the colonies reached a high peak and when colonial capitalist exploitation required extensive control of the area" (1977:70).

Edward Said in his *Culture and Imperialism* identified two works: Ranajit Guha's A

Rule of Property for Bengal: An Essay on the idea of Permanent Settlement published in 1963 and S.HI. Alatas's *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos, and Javanese from the 16<sup>th</sup> to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism* published in 1977 as belonging to the genre of post-colonial specialist scholarship. "Both these books, the former by a Bengali political economist, the latter by a Malaysian Muslim Historian and social theorist, show their authors' assiduous archival research and scrupulously up-to-date documentation, argument, and generalization". (Said, 1993:296). ...Alatas's book, as startlingly original in its own way as Guha's, also details how European colonialism created an object, in this case the lazy native, who performed a crucial function in the calculations and advocacies of what Alatas calls colonial capitalism. This native, subjected to astringent rules and an exacting discipline, was meant, in the words of Sinbaldo de Mas, a Spanish official who in 1843 was entrusted with keeping the Philippines as a Spanish colony, to be sustained "in an intellectual and moral state that despite their numerical superiority they may weigh less politically than a bar of gold"; (Alatas, 1977:56); this native was talked about, analysed, abused, and worked, fed with bad food and with opium, separated from his or her natural environment, covered with a discourse whose purpose was to keep him or her industrious and subordinate. Thus says Alatas, "Gambling, opium, inhuman labor conditions, one sided legislation, acquisition of tenancy rights belonging to the people, forced labor, were all in one way or another woven into the fabric of colonial

ideology and given an aura of respectability. Those outside it were derided". (1977:96).

According to Said: "One of the sharpest attacks in Alatas's *The Myth of the Lazy Native* is against those Malaysians who continue to reproduce in their own thinking the colonial ideology that created and sustained the 'lazy native' idea. In passages that recall Fanon's strictures against the national bourgeoisie, Alatas shows how residues of colonial capitalism remain in the thought of the newly autonomous Malays, confining them - those, that is, who have not become self-conscious in methodology and aware of the class affiliations that affect thought - to the categories of 'colonial capitalist thought'. Thus he continues, "The false consciousness distorts the reality. The Malay ruling party inherited the rule from the British without a struggle for independence such as that which took place in Indonesia, India and the Philippines. As such there was also no ideological struggle. There was no intellectual break with British ideological thinking at the deeper level of thought." (1977:152).

Again we turn to Edward Said: "Alatas supplies us with an alternative argument about the meaning of the lazy native, or rather, he supplies us with an argument for why the Europeans succeeded in holding on to the myth for as long as they did. Indeed, he also demonstrates how the myth lives on... The myth of the lazy native is synonymous with domination, and domination is at bottom power. (Said, 1993:307).

"Alatas's work has had two aims: to establish a foundation for a post-colonial methodology of South Asian history and society, and to further the demystifying and deconstructive work suggested in *The Myth of the Lazy Native*." (Said, 1993:308).

I had a brief meeting with Prof Alatas when he was the vice chancellor of UM. He told me that he was writing a pamphlet showing that Islam is not against music. There was a controversy in UM at that time over the performance of a group that the religious right opposed. While at UM, Prof Alatas appointed dean based on their competence measured in universal criterion of achievement rather than ascription. This did not go well with the powers that be.

But Alatas's forte is not compliance, his intellectual boldness emerges from an integrity of character, a force of conviction and an honesty of intellectual integrity. He once commented about Singapore about corruption; An entire generation of Singaporean has grown up without

ever paying a cent in bribe. A bouquet. And brick bat? He once said, Singapore has all the conveniences of a hotel but you cannot call it home. The very similar statement has been echoed by senior cabinet officials in Singapore and in some sense forms the basis of S21 discussion of reinventing Singapore as a home. Alatas's social science has a deep commitment with the moral visions. In this sense there is a close parallel between sociological projects of Robert Bellah and his colleagues who also envision a moral grounding of sociology, a program best exemplified in the works of Bourdieu especially in his later works such as the Weight of the Earth and so on. It is impossible for the social scientists to run away from the moral concerns of the day. And with Montaigne we will plea for reason rather than opinion that must be the yardstick of social scientific analysis. Alatas will agree, I hope.

#### Reference:

- Alatas, SyeHussein (1956) "Some Fundamental Problems of Colonialism" in *Eastern World* (London) November
- (1963) "The Weber Thesis and Southeast Asia" in *Archives de Sociologie des Religions*. 15
- ((1964) "Archaeology, History and the Social Sciences in Southeast Asia", in *Federation Museum Journal*, IX
- (1969) "The Captive Mind in Development Planning: The neglected problems in development studies and the need for an autonomous social science tradition in Asia" paper presented in the The Society for International Development, 11" World Conference, Delhi, November 14-17
- ( 1977) *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of Malays, Filipinos and Javanese from the 16" to the 20" century and its function in the ideology of colonial capitalism*. London: Frank Cass
- (1986) *The Problem of Corruption*. Singapore: Times Book
- (1990) "The Problem of Corruption" in K.S. Sandhu and Paul Wheatley
- (Ed) *Management of Success: The Moulding of Modern Singapore*. Singapore: ISEAS
- ( 1999) *Corruption and the Destiny of Asia*. Petaling Jaya: Prentice-Hall
- Said, Edward (1993) *Culture and Imperialism*. London: Chatto & Windus



## Kepimpinan Masyarakat dan Bebalisme: Pemikiran Syed Hussein Alatas

Oleh : Syed Farid Alatas \*)

*Saya rasa sepanjang kehidupan intelektualnya, Prof. Syed Hussein Alatas khawatir akan dikuasainya masyarakat oleh orang-orang bebal, atau dengan kata lain almarhum melihat tengah adanya revolusi orang-orang bebal (the fools). Di antara ciri-ciri orang-orang bebal adalah ketidakmampuan menganalisis masalah, ketidakmampuan menyelesaikannya jika masalah itu dikemukakan kepadanya, ketidakmampuan mempelajari apa yang diperlukan, ketidakmampuan mempelajari seni belajar, dan—terutama-- tidak mengakui kebodohnya.*

Syed Hussein Alatas, adalah seorang tokoh dan negarawan Malaysia yang dilahirkan di Bogor, Jawa Barat, pada 17 September 1928. Beliau merupakan seorang pendukung kemerdekaan pribadi, kemerdekaan suku serta bangsa. Selain dari itu, beliau menentang rasuah (korupsi) secara intelektual dengan keras.

Kebencianya terhadap amalan rasuah telah menghasilkan beberapa kajian mengenai kejahatan tersebut, yang telah diterbitkan dalam berbagai buku, seperti "The Sociology of Corruption" (1968); "Corruption: Its Nature, Causes and Functions" (1990) dan "Corruption and the Destiny of Asia" (1999). Dari setidaknya tiga judul di atas dari berbagai buku, sekian banyak kajian, makalah dan artikel itu menunjukkan betapa seriusnya penentangan Syed Hussein Alatas (SHA) terhadap korupsi.

Jika diminta untuk merangkum pemikiran Al-Marhum Syed Hussein Alatas, menurut saya, kita boleh mengatakan hal-hal berikut:

1. Masalah utama dalam masyarakat berkembang adalah kemunduran dalam segala bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan.
2. Faktor utama yang menyebabkan terus berlangsungnya keadaan *under-developed* ini (Prof Farid menuliskannya sebagai

:kurang pembangunan—Redaksi Kasyaf adalah lemahnya kepimpinan intelektual. Sejak tahun lima puluhan, beliau telah mengambil perhatian tentang masalah ketiadaan suatu kelompok intelektual yang berfungsi di Malaya (nama sebelum Malaysia—red). Intelektual ditakrif sebagai seseorang yang memikir tentang gagasan-gagasan dan masalah bukan kebendaan dengan menggunakan segala daya upaya akal.

3. Tugas intelektual adalah berpikir, mempertimbangkan masalah-masalah tertentu, dan mencoba untuk sampai kepada penyelesaiannya. Perhatian ayah saya terhadap gejala kelompok intelektual ini pun telah menghasilkan setidaknya sebuah buku yang bertajuk "Intellectuals in Developing Societies" (1977).

Karya ini bertumpu pada tiga persoalan: (i) mengapa kaum intelektual diperlukan dalam masyarakat berkembang; (ii) jenis intelektual seperti apa yang terbaik untuk memenuhi keperluan itu; dan (iii) rintangan apa saja yang mehalangi kemunculan dan berfungsinya kelompok ini.

Masalah-masalah yang seharusnya diperhatikan oleh kelompok intelektual dalam

\*) Guru Besar di Jabatan Sosiologi, Universiti Nasional Singapura (NUS).

konteks masyarakat berkembang, dalam alur pikiran SHA dibagi ke dalam dua bagian, yakni masalah teoretis dan masalah amali atau praktikal.

Masalah teoretis merujuk kepada masalah yang terdapat dalam bidang pengetahuan. Menurut Syed Hussein, masalah utama dalam bidang ini merupakan pikiran yang tertawan (*captive mind*). Menurut teori *captive mind*, pikiran yang tertawan itu bercirikan cara berpikir yang dikuasai (cara) pemikiran Barat. Masalahnya bukan pada pengambilan pemikiran dari Barat saja, melainkan bagaimana pemikiran barat itu diambil tanpa pengupasan terlebih dulu atau bagaimana ilmu yang ditiru dari raja kebudayaan Barat itu dimengerti dan diterima.

Sebab sangat mungkin suatu “*demonstration effect*” saja bisa mengakibatkan peniruan di segala aras kegiatan-kegiatan kesarjanaan-keilmuan, termasuk bagaimana menetapkan masalah, menganalisis, penyeluruhan, pembentukan paham, penggambaran, penguraian, dan penafsiran dilakukan.

Salah satu dari tujuan intelektual, menurut SHA adalah membebaskan diri dari kondisi ketertawanannya pemikiran ini. Suatu cara yang dilakukan Profesor Syed Hussein Alatas, adalah melalui penafsiran baru atas sejarah. Sejarah yang ditafsir ulang, yang merupakan apa yang Edward Said namakan “*revisionary history*”, yaitu penulisan sejarah yang menolak wacana pengaruh dan kekuasaan, yang bisa jadi lebih dari sekadar narasi perlawanan Timur menentang Barat, dan secara cendekia dan konkret mencoba memahami perkembangan akan hal-hal yang beraneka-ragam dan yang seringkali seolah aneh, yang dahulu tidak pernah bisa tercapai oleh mereka yang disebut para sejarawan dunia dan para orientalis ...” (“*Culture and Imperialism*”, London: Chatto & Windus, 1993).

Salah satu contoh karya serupa ini yang dirujuk Said adalah karya ayah saya, “*The Myth of the Lazy Native*” (1977) (“Mitos Pribumi Malas”). Dalam buku ini, beliau mengkritik teori penjajah yang menyatakan bahwa rakyat pribumi pada dasarnya adalah pemalas. Lagi pula, beliau memperlihatkan peranan citra bahwa pribumi Jawa, Melayu dan Filipina dalam kapitalisme penjajah, dan terus berlangsungnya mitos ini di kalangan elit pribumi sendiri.

Di negara-negara Asia lainnya, seperti India dan Filipina, suatu tradisi awal penafsiran sejarah telah ditanamkan di kalangan para cendikiawan. Sesuatu yang masih belum berlaku di negara kita.

Masalah ketertawanannya pikiran ini berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat amali atau praktikal. Masalah-masalah sejenis yang telah diperhatikan dengan cermat oleh Al-Marhum, termasuk ekstremisme keagamaan, pemikiran dan perilaku yang tidak rasional, dan korupsi (rasuah). Karena adanya ketertawanannya pikiran tersebut, pemikiran pun tidak berkembang secara otonom, yang pada gilirannya membuat kalangan cendikiawan pribumi tidak mampu memahami dan menguraikan masalah-masalah yang menghinggapi masyarakatnya; sebaliknya, dengan kondisi itu ia lebih banyak mendatangkan masalah kepada negara.

Beberapa hasil penelitian Almarhum SHA yang cermat tentang ekstremisme keagamaan, pemikiran dan perilaku yang tidak rasional dan korupsi itu memungkinkan adanya beberapa usulan dan rencana solusi yang diharapkan bisa menyelesaikan problematika kemasyarakatan. Sayang, keterbatasan waktu dan kesempatan tidak mengizinkan kami menjelaskan dengan terperinci usulan dan rencana-rencana ini. Tetapi, dalam hierarki faktor-faktor yang yakini Prof. Alatas mampu mengatasi masalah, yang berada di puncaknya adalah persoalan kepimpinan.

Soal ini telah diuraikan beliau dalam beberapa karyanya termasuk, “Kita dengan Islam” (1979) dan “Cita Sempurna Warisan Sejarah” (2001) yang merupakan kuliah umum perdananya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam buku ini dibincangkan empat jenis pemimpin berdasarkan idealitas yang sempurna. Ciri-ciri pemimpin jenis ini kita dapatkan dari tokoh-tokoh sejarah (Islam) seperti Sayyidna Ali (karramallah wajhahu), Khalifah Umar ibn Abd al-Aziz dan Sultan Salah al-Din Ayyubi.

Ini berbeda secara diametral dengan idealitas buruk (dalam naskah asli “cita bencana”—Red) yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh seperti Khalifah Al-Kahir, Sultan Ghiyasuddin Balban dan Muhammad Tughluk. Dalam masyarakat dewasa ini, terdapat jenis pemimpin yang baik, yang dipandu oleh idealitas kesempurnaan, dan juga jenis yang *jadong*, yaitu

sifat-sifat jahat, bodoh dan sompong dan dipandu idealitas yang buruk (cita bencana) tadi.

Dari apa yang dikemukakan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam pemikiran SHA, faktor utama dalam hierarki sebab musabab (hubungan kausalitas) adalah prinsip-prinsip akhlak atau kesusilaan. Umpamanya, dalam tulisan beliau tentang korupsi, Prof. Alatas telah menegaskan bahawa perubahan struktural dalam administrasi negara (pentadbiran kerajaan) tidak akan membawa kesan yang baik jika perubahan itu tidak diiringi dengan terwujudnya pemimpin-pemimpin yang mempunyai prinsip kesusilaan yang tinggi.

Faktor akhlak ini bukan hanya merupakan sesuatu yang penting dalam pemikiran intelektual ayah saya, tetapi juga dalam kehidupan kesehariannya. Seorang alim dari Iran, Allamah Murtadha Mutahhari telah menulis dalam bukunya “Polarisasi Sekitar Watak Ali”, bahwasanya Sayyidna Ali ibni Abi Talib (karramallahu wajhahu) saat memimpin senantiasa mempunyai daya tarik dan daya tolak.

Dari awal sejarah Islam, kita dapati ada segolongan yang berpaling ke arahnya, ada pula yang tidak mempunyai hubungan yang erat dengannya, atau bahkan yang kadang-kadang menyakiti dirinya. Ini mengingatkan kita semua akan hadits Nabi Muhammad SAW:

“Janganlah kamu tanya tentang diri seseorang. Tanyalah siapa saja sahabat-sahabatnya, karena setiap insan itu bergantung kepada jenis manusia yang ada di sekelilingnya.”

Ini berarti setiap insan yang baik akan mendekatkan diri kepada insan yang baik pula. Sebaliknya, insan yang jahat akan cenderung untuk bergaul, bersahabat dan berkelompok dengan orang-orang yang juga berakhhlak rendah.

Golongan yang berpaling dan mendekat kepada ayah saya seringkali terdiri dari mereka yang mempunyai idealitas sempurna atau cita-cita yang luhur. Ini termasuk para cendikia yang seringkali datang ke rumah kami pada pukul 9 malam untuk berdiskusi dan mengobrol sepanjang malam. Sementara saya pun memperhatikan bahwa banyak pula kenalan beliau yang seiring waktu tidak lagi memiliki hubungan yang rapat dan erat dengannya, yang tidak mendekatkan diri mereka kepada almarhum. Seolah-olah, secara alamiah mereka ditolak oleh cita-cita dan idealitas kebenaran yang dicita-citakan almarhum.

Syed Hussein Alatas, yang telah menjadi wakil rektor Universiti Malaya keempat pada tahun 1988, telah ditamatkan pengabdianya pada tahun 1991, usai almarhum dituduh melakukan korupsi oleh beberapa pihak dan diselidiki atas tuduhan tersebut. Al-Marhum Syed Hussein Alatas, keluarga dan kaum kerabatnya percaya bahawa peristiwa ini berlaku sebab beliau enggan bertindak berlawanan dengan prinsip-prinsip akhlak yang ia pegang. Insya-Allah, cerita yang lengkap tentang peristiwa itu akan disampaikan pada waktu mendatang.

Ajaran yang diturunkan ayah saya yang paling penting untuk saya sebagai seorang sarjana dan anak adalah, bahawa akhlak adalah hal yang teramat penting. Ilmu tanpa akhlak ada kemungkinan menjadi bahaya, manakala akhlak tanpa ilmu hanya akan menyebabkan yang tidak mempunyai ilmu akan mencarinya dari sumber yang mungkin kurang sesuai. Watak yang memiliki *makarim al-akhlaq* (watak mulia) senantiasa berani membedakan yang benar dengan yang salah, dan tidak merasa takut kehilangan kekayaan, atau pun kedudukan. Menurut satu hadis Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah mengutus aku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak dan amal.”

Saya rasa sepanjang kehidupan intelektualnya, Prof SHA khawatir akan dikuasainya masyarakat oleh orang-orang bebal, atau dengan kata lain almarhum melihat tengah adanya revolusi orang-orang bebal (*the fools*). Di antara ciri-ciri orang-orang bebal adalah ketidakmampuan menganalisis masalah, ketidakmampuan menyelesaikannya jika masalah itu dikemukakan kepadanya, ketidakmampuan mempelajari apa yang diperlukan, ketidakmampuan mempelajari seni belajar, dan—terutama-- tidak mengakui kebodohnya.

Revolusi orang-orang bebal yang berlaku di banyak masyarakat berkembang sebagian besar disebabkan oleh adanya penjajahan. Pemerintahan penjajah tidak merasa perlu untuk membangun dan menciptakan para administrator bermutu tinggi. Setelah kemerdekaan kekurangan tenaga kerja yang pintar menimbulkan kemunculan orang-orang bebal. Mereka itulah yang kemudian mengekalkan kelompoknya.

Menurut Prof SHA dalam bukunya, “*Intellectuals in Developing Societies*”: Dengan orang-orang bebal ini datanglah nepotisme,

pandangan kolot, politik partai kedaerahen, yang menentukan pemilihan dan kenaikan dalam hierarki kekuasaan administrasi. Orang-orang bebal tidak dapat menguasai keadaan di mana jasa dan kerja keras merupakan kriteria kesuksesan, dan dengan demikian rasuah (korupsi) menjadi ciri-ciri naiknya kekuasaan orang-orang bebal. Di tempat di mana orang-orang bebal berkuasa, maka nilai-nilai mereka lah yang menjadi nilai-nilai masyarakat, dan kesadaran mereka pula yang menjadi kesadaran masyarakat.

Dengan demikian runtuhan akhlak masyarakat kita. Apakah masyarakat kita memiliki pemimpin-pemimpin yang berpengaruh dan yang mempunyai cita-cita ideal untuk melawan keburukan yang ada? Apakah pemimpin serupa itu dapat muncul dan melawan unsur-unsur bebal dan *jadong* dalam masyarakat ? Itulah harapan SHA, dan itu pula harapan rakyat banyak. [ ]



**Masjid Agung Kota Bandung**, didirikan oleh Raden Adipati Wiranatakusumah II atau dikenal sebagai Dalem Kaum. Pendirian Masjid Agung di alun-alun Kota Bandung menandai dibukanya Kota Bandung. Dalem Kaum, Sang Pendiri Kota Bandung, telah membangun kawasan alun-alun sebagai pusat Kota Bandung yang baru dua tahun sebelum Daendels menggagas pengembangan kota Bandung pada tahun 1810. Dalem Kaum juga dikenal sebagai sosok ulama. Watak Kota Bandung yang religius melekat sejak dulu pada diri Sang Pendiri kota tersebut.

Sumber gambar : <https://kumeokmemehdipacok.blogspot.com>



## Memberantas Korupsi\*

Oleh : Ali Audah \*\*)

*Jika ada seseorang yang akan diangkat memangku jabatan tinggi, terlebih dulu harta kekayaan orang itu harus didaftar. Demikian kebijaksanaan Khalifah Umar mengangkat pejabat-pejabatnya. Dan jabatan yang dipegangnya tak boleh lebih dari satu tahun. Apabila tugasnya sudah selesai dan kekayaan orang itu melebihi apa yang terdaftar, maka itu akan dirampas untuk negara.*

Sesudah Ala bin Hadrami wafat, yang oleh Khalifah Umar bin Khattab diangkat sebagai penguasa daerah Bahrain, maka Abu Hurairah yang menyertainya dalam tugas itu ditetapkan sebagai penggantinya.

Pada saat pejabat itu kemudian kembali dan melaporkan adanya kelebihan kekayaan untuk baitulmal sebanyak 400 ribu dinar. Umar bertanya, "Adakah Saudara merugikan orang lain dengan harta itu?

"Tidak."

"Harta Saudara sendiri berapa banyak?"

"Dua puluh lima ribu dirham."

"Dari mana Saudara memperoleh itu?"

"Saya peroleh dari berdagang."

Mendengar itu Khalifah Umar marah.

"Kami menugaskan Saudara sebagai penguasa, bukan sebagai pedagang," kata Khalifah. "Kenapa Saudara memperdagangkan harta umat Islam?"

Kelebihan harta demikian itu oleh Umar dirampas untuk negara dan hanya haknya yang semula dikembalikan. Demikian juga ketika pejabat yang harus bertanggung jawab itu diketahui memiliki beberapa ekor kuda seharga 1.600 dinar, Khalifah yang terkenal tegas itu terkejut sekali, lalu diusutnya hal itu sampai ke akar-akarnya. Dia tak dapat menerima alasan bilamana itu dikatakan sebagai hadiah dari

orang, sebab hadiah demikian itu bukan untuk pribadinya, melainkan untuk jabatannya.

Jika ada seseorang yang akan diangkat memangku jabatan tinggi, terlebih dulu harta kekayaan orang itu harus didaftar.

Demikian kebijaksanaan Umar mengangkat pejabat-pejabatnya. Dan jabatan yang dipegangnya tak boleh lebih dari satu tahun. Apabila tugasnya sudah selesai dan kekayaan orang itu melebihi apa yang terdaftar, maka itu akan dirampas untuk negara. Seorang pejabat dan penanggung jawab harus bersih.

Tetapi sungguh pun begitu segala tindakan itu harus hati-hati dan diteliti sedalam-dalamnya. Seperti kata Quran:

*"Bilamana ada orang fasik datang kepadamu membawa berita, selidikilah sedalam-dalamnya, supaya jangan kamu menjatuhkan keputusan yang salah terhadap sesuatu golongan hanya karena tidak kamu ketahui, lalu kamu akan menyesali perbuatanmu sendiri." (Al-Hujurat [49]:6)*

Cerita korupsi ini dalam sejarah sastra cukup panjang. "Siasat Nama" adalah karya quasi sastra Islam oleh Nizam al-Mulk yang hidup pada abad ke-11, berisikan cerita-cerita pendek, anekdot-anekdot serta nasihat-nasihat bagi setiap pejabat dan penguasa. Kisah Raja Bahram-Gur dan perdana menterinya adalah suatu kasus yang dihadapkan pada masalah korupsi. Raja

\* Diambil dari "Dari Khazanah Dunia Islam", Pustaka Firduus, 1999

\*\*) Almarhum adalah penerjemah dan sastrawan Indonesia terkemuka

Bahram-Gur yang sudah kesal menghadapi masalah korupsi, pergi menyamar dan mengembara seorang diri.

Dilihatnya kemah seorang gembala ternak domba yang sedang tidur dan seekor anjing yang mati digantung. Kemudian diketahuinya bahwa anjing itu korup. Yang pada mulanya mendapat kepercayaan melindungi ternak domba itu, ternyata setiap waktu domba itu dikorbankan kepada seekor serigala betina yang bersedia menyerahkan diri untuk berkelamin dengan anjing penjaga itu, setiap waktu.

Raja Bahram-Gur kembali ke kerajaannya, seolah ia sudah mendapatkan ilham dari gembala itu. "Aku telah memperkuat kedudukan perdana menteriku itu. Selama ia begitu megah dan garang, orang tak akan berani bicara yang sebenarnya," pikir Raja Bahram-Gur. "Aku punya rencana sekarang. Besok kalau dia datang ke Istana, akan kuhina ia di depan para bangsawan. Akan kusuruh tahan dia, akan kusuruh belenggu kakinya. Kemudian orang-orang tahanan itu akan kupanggil dan akan kuusut sebab-sebab apa mereka dipenjara. Kemudian akan kubacakan sebuah pengumuman. Demikian bunyinya:

"Perdana Menteri sudah kupecat dan kuperintahkan dimasukkan ke dalam penjara. Kami tak akan memberikan jabatan lagi kepadanya. Kalau ada orang yang dirugikan olehnya atau punya pengaduan, datanglah dan kemukakan semua itu dengan lidahnya sendiri dan beritahukanlah terus terang supaya kami bisa mengadilinya."

"Kalau rakyat sudah mengetahui semua ini katakanlah kepada kami apa yang sebenarnya. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik dan tak ada yang dirugikan, kami akan mengembalikannya ke tempat semula. Tapi kalau tindakan itu sebaliknya, akan kami jatuhkan hukuman kepadanya."

Sejak itu masuklah laporan-laporan yang semuanya berisi pengaduan mengenai kejahatan Perdana Menteri selama berkuasa. Rakyat dirugikan, uang pajak digelapkan dan kas negara kian menipis. Ternyata kemudian bahwa Perdana Menteri itu memang korup.

Sesudah cukup bukti, Perdana Menteri itu menerima hukumannya yang setimpal. Seluruh kekayaannya dirampas untuk negara. Dia berikut para stafnya yang membantunya mencolong uang negara, dihukum gantung seperti anjing penjaga yang dilihatnya di kemah si gembala.

Dan bebaslah rakyat dari tindakan tirani dan sewenang-wenang. "Apabila ada orang yang ditunjuk menduduki jabatan penting, raja harus menempatkan orang lain yang secara diam-diam mengawasi tingkah lakunya, untuk dilaporkan kepada raja," kata Nizam Al-Mulk menutup ceritanya.

Dan cerita-cerita begini belakangan makin gencar diteruskan dalam berita-berita pers tiap hari. Tapi ini belum sampai pada tindakan. Baru mengumpulkan bahan dan teori-teori. Komisi Empat dibentuk. Komite AntiKorupsi berdiri, mahasiswa dengan berbagai aktivitas bergerak lagi, para pemikir bekerja terus. Dukungan mengalir terus. Tujuan sama, memberantas korupsi. Selanjutnya yang penting adalah tindakan dan tidak berhenti di tengah jalan. [ ]

*Artikel ini ditulis Ali Audah, sastrawan yang dalam periodisasi sastra versi HB Yassin termasuk angkatan 1966, dimuat "Harian Kami", 20 Juni 1970. Belakangan Ali Audah lebih dikenal sebagai penerjemah, tak hanya buku-buku berbahasa Arab sebagaimana dikenal khalayak selama ini. Beliau menerjemahkan biografi Nabi Muhammad tulisan Haikal, begitu pula biografi sahabat Abu Bakar, Umar dan Usman. Kecuali biografi Ali bin Abi Thalib yang ditulisnya sendiri secara langsung. Ali Audah meninggal 2017 lalu.*



## Gaji (dan Korupsi) Sepanjang Masa

Oleh : Ong Hok Ham \*)

Negara modern sering menghadapi kesukaran dana. Apalagi yang tradisional. Sebagian keuangan negara ini diperlukan untuk membiayai alat-alatnya, yakni para pegawai. Dan di situ negara sebenarnya menghadapi kesukaran kedua: menentukan jumlah riil yang sebenarnya diperlukan pejabat itu.

Sebab ada pejabat yang punya tugas politik dan harus hidup dengan gaya tertentu, demi kewibawaannya. Di samping itu di masyarakat seperti Indonesia masih ada persoalan keluarga besar: tidak saja istri dan anak, tapi juga saudara-saudara dan anak buah.

Kerajaan Mataram (abad-abad 16-18), seperti semua kerajaan tradisional Indonesia, mengenal kas kerajaan yang dimiliki sang raja. Dan kedudukan politis dari raja diukur dari hartanya. Tapi harta raja tidak dipakai menggaji para pejabat.

Sebaliknya diusahakan diperbesar guna kepentingan politis dan militer. Pada zaman Mataram, seperti zaman-zaman sebelumnya, memang terlalu sukar menggaji para pejabat, yang mungkin juga bertugas jauh dari pusat. Penyelesaiannya kemudian sama dengan di kebanyakan kerajaan tradisional di seluruh dunia di zaman itu: para pejabat diberi kekuasaan atas rakyat dan dari situ mereka harus dapat makan.

### Jual beli jabatan masa Mataram

Kerajaan Mataram memberikan kepada para pejabatnya sejumlah cacah, yang merupakan kesatuan petani terdiri dari empat orang laki-

laki. Kedudukan finansial, politis dan militer pejabat diukur dari jumlah cacah mereka.

Cacah diberi sebidang tanah (dua bau) dan sebagian dari hasil tanah tersebut diserahkan kepada pejabat. Selain itu sang priyayi berhak menggunakan tenaga bakti cacah untuk keperluan kediaman, pendirian irigasi, jalanan, jembatan, perkebunan, dan seterusnya.

Sering raja menuntut pemegang lungguh (kedudukan, yaitu priyayi yang bercacah tadi) juga memberi upeti kepadanya, disamping menyediakan sebagian tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan di keraton. Tentu kalau ada perperangan, para cacah kena wajib militer.

Di samping itu, setiap kawula yang punya kepentingan berurus dengan pejabat harus menyerahkan upeti atau pelicin. Itu juga sumber penghasilan yang besar - khususnya bagi pejabat pusat. Patih misalnya, yang pada zaman Mataram berhubungan dengan VOC atau pedagang Cina dan Arab. Sering dari sumber ini raja juga menuntut upeti.

Kadang memang ada pejabat yang menjadi sedemikian kaya, sehingga merupakan beban berat sekali bagi rakyat. Dalam hal demikian raja mendenda pejabat itu, bahkan kadang sampai menyita seluruh kekayaannya.

Korupsi juga ditindak. Dan hasil penyitaan kekayaan sang pejabat memang masuk kas raja, namun denda atau sitaan tetap mengancam para pemeras yang terlalu ulung - sebab mereka dapat menimbulkan pemberontakan petani.

\*) Mendiang adalah sejarawan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

Pada akhir abad ke -18, dengan majunya ekonomi keuangan dengan hadirnya VOC dan pedagang lain, jabatan seperti bupati, demang, bekel, dan lain-lain mulai dijual oleh raja atau pemegang lungguh lain. Kebiasaan ini juga dikenal pada kerajaan tradisional Eropa.

Kedudukan bupati di daerah penting misalnya dijual 10.000 real (gulden) atau lebih, dan dibayar sebelum jabatan diduduki. Komersialisasi semacam itu menolong keuangan negara, tapi merupakan beban yang besar bagi rakyat. Sebab semua pengawasan keuangan dari Pusat tentunya jadi lepas sama sekali.

Kedudukan bupati atau demang dan bekel (pengumpul pajak/upeti) pada tingkat bawahannya bahkan dapat dibeli siapa pun. Termasuk keluarga bekas pemberontak atau pedanggang Cina dan swasta Belanda. Yang terakhir itu antara lain menyebabkan pemberontakan Diponegoro.

### Korupsi di tubuh VOC

Di Kerajaan Mataram (Kesunanan, Kesultanan, Mangkunegaran, Pakualaman) sistem penggajian dengan cacah berlangsung sampai kira-kira pertengahan abad ke-19. Mungkin Mangkunegaran yang pertama yang menghapusnya, dan menggaji pegawai dengan uang. Sedang tanah dan cacah digunakan untuk perkebunan dan pabrik gula, yakni sumber gaji tadi. Contoh yang dipakai adalah Hindia Belanda, dan ini bukti bahwa suatu kerajaan tradisional Jawa dapat mengadakan modernisasi.

Biarpun VOC (1602-1800) suatu perseroan dagang, statusnya di Timur adalah semacam negara yang memiliki angkatan perang dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja. Dan biar pun VOC dapat meminjamkan banyak uang kepada raja-raja, dan sebenarnya merupakan cukong terbesar zaman itu bagi para raja Indonesia, khususnya Mataram, ia juga menghadapi kesukaran menggaji pegawaiannya yang terbesar di seluruh Timur.

VOC, seperti semua organisasi politik/ekonomi zaman itu, hanya memberikan gaji normal, sekadar uang pengikat. Seorang gubernur pantai utara Jawa misalnya hanya digaji 80 gulden sebulan-dan meminta gaji tersebut diberikan saja kepada keluarganya yang di Holland.

Karena itu para pejabat VOC, yang seharusnya berdagang demi kepentingan

majikannya, kenyataannya berusaha demi mereka sendiri. Dalam ketentuan memang pejabat VOC dapat berusaha sendiri-setelah berdagang untuk VOC- dan itu disebut morshandel (perdagangan sisa). Namun kapal-kapal VOC yang berangkat dari Jawa memuat demikian banyak barang perdagangan sisa, yakni milik pejabat VOC pribadi, dan hanya sedikit barang resmi.

Selain itu terjadi manipulasi dengan timbangan, harga, penjualan kedudukan, penjualan monopoli seperti candu, garam, dan lain-lain, sehingga para pejabat VOC menjadi kaya raya sedang VOC sendiri makin miskin.

Akhirnya VOC, untuk membiayai kebijaksanaannya, menetapkan pajak pada pejabatnya, dan menjual jabatan bupati, tuan tanah, dan lain-lain, sering sebagai milik turun temurun. Akhirnya VOC bangkrut di abad ke 18.

### H.W Daendles memerangi korupsi

VOC diganti Hindia Belanda. Pendirinya Gubernur Jenderal H.W. Daendles, seorang pegawai napoleon, memakai model negara Napoleon - negara modern pertama - yang menentang korupsi diantara para pegawai yang disusun dan digaji menurut hirarki.

Pemberantasan korupsi oleh Daendels tentu tidak dalam waktu sekejap dicapai, namun akhirnya berhasil untuk Bestuurs Beambten (BB) dan menunjukkan bahwa suatu organisasi tradisional dapat meningkatkan diri sampai para pejabatnya hanya berpenghasilan dari gaji.

Dan gaji para BB memang tinggi. Seorang residen misalnya mendapat f.15.000 setahun disamping ongkos representasi (resepsi/ pesta) dan lain-lain. Malah sampai 1860 para BB juga mendapat uang kultuur-procenten , yakni tambahan sesuai dengan naiknya penghasilan perkebunan sistem tanam-paksa (1830-1870) di daerah mereka, guna menggiatkan usaha mereka dalam lapangan ini.

Namun kultuur-persen ini dihapuskan bagi BB pada tahun 1860, karena dipandang tidak patut bahwa pejabat negara modern hanya melaksanakan tugas dengan uang anjuran kegiatan. Bagi pangreh-praja (pegawai pribumi), dari bupati sampai kepala desa kultuur-persen ini dipertahankan sampai hapusnya sistem tanam-paksa.

Dominasi politik dan militer Belanda di Jawa sebenarnya baru tercapai setelah perang

Diponegoro (1830). Di tahun itu Belanda masih banyak memerlukan kerja sama politis dari para bupati, khususnya di daerah yang baru diambil alih olehnya.

Gubernur Jenderal J. van den Bosch karena itu tidak berbicara megenai gaji kepada para bupati daerah-daerah tersebut, tetapi mengenai subsidi keuangan. J. van den Bosch menasihatkan untuk menjanjikan subsidi “berapa saja”, kedudukan turun-menurun jabatan bupati, juga tanah sebanyak mungkin.

Subsidi keuangan kepada para bupati diberikan antara f.500 sampai f.1.500 bagi yang paling berpengaruh dan besar, seperti misalnya bupati Madiun. Ketika daerah bupati-bupati kecil diintergasikan menjadi daerah besar (proses ini berakhir kira-kira pada 1876), setiap bupati diberi gaji f.1.500 sebulan. Persen tanam-paksa tetap mereka nikmati, seperti juga hak-hak atas tenaga bakti (200 orang) setahun dan upeti serta hak-hak adat lain.

Sebaliknya kebutuhan bupati jauh lebih besar dari keperluan residen (Belanda) dengan hanya keluarga nuklirnya (anak dan istri). Seorang bupati memiliki keluarga besar: famili dan anak-pinak, apalagi bila punya lebih dari satu istri. Dari mana mereka hidup?

### Bupati, wedana, camat: pemeras rakyat

Perdagangan bagi mereka secara tidak tertulis dilarang Belanda, sebab dapat menimbulkan “korupsi” menurut mereka. Memang di tahun 1830 G.G. van den Bosch berpendapat, tanah yang akan diberikan kepada para bupati dapat dipakai untuk menempatkan keluarga besar mereka, dan memberi keluarga besar itu nafkah dan pekerjaan. Tapi kalau pernah diberikan, tanah tersebut sudah ditarik lagi dalam tahun 1840.

Padahal bupati sebagai bapak daerah juga harus mengeluarkan biaya bagi anak buahnya. Misalnya untuk keperluan pesata, selamat dan memberi makan rumah tangga ia memerlukan kira-kira 2.000 pikul beras setahun, sedang keluarga biasa Belanda/Cina hanya memerlukan 25 pikul.

Para residen Belanda mengerti hal itu. Dalam laporan mereka ke Pusat ditulis, ada banyak “pemerasan kecil” terhadap rakyat. Namun tidak perlu ditindak, sebab itu adalah “adat”. Tahun 1870 Multatuli, memprotes

pemerasan rakyat oleh bupati. Dan dia dipecat.

Di tingkat bawah bupati, pemerasan oleh priyayi rendahan rupanya berjalan tanpa pengawasan Belanda. Suatu laporan 1860-an mengatakan, gaji priyayi bawahan sangat rendah. Wedana hanya f.40 sebulan. Mantri atau camat antara f.5 sampai f.15.

Namun seorang wedana, camat atau mantri dapat memelihara 3 sampai 4 kuda bagus, hidup di rumah mewah, serta menghidangkan jamuan besar. Dalam tahun 1870, dengan dihapusnya sistem tanam-paksa dan kultuur-persen, semua gaji memperoleh revisi yang rendah agak dinaikkan sedikit. Kemudian korupsi di antara priyayi rendahan lebih banyak ditindak Hindia Belanda daripada di kalangan bupati- karena priyayi rendahan tidak demikian berpengaruh secara politis.

Kelihatan, sampai permulaan abad ke-20 gaji pangreh-praja Hindia-Belanda tidak realistik. Karena itu terpaksa berpedoman: kekuasaan pangreh-praja adalah bagian dari gaji mereka.

Secara resmi baru lebih kurang 1890, hak “adat” terakhir bupati (200 orang setahun) dan pangreh-praja lain atas tenaga kerja rakyat dihapus. Gaji mereka pun dinaikkan f.200 setahun. Apa bupati sesudah itu membayar upah para pekerjanya, tidak diberitakan oleh laporan Belanda.

Sistem gaji yang paling utuh dari zaman Mataram sampai kini adalah sistem penggajian lurah. Kas Hindia Belanda tidak dapat menggaji beribu kepala desa yang langsung berhubungan dengan rakyat itu. Padahal mereka kedudukan kepala desa penting dan politis sifatnya.

Mereka lalu tidak digaji dengan uang, tapi dengan tanah bengkok dan tenaga kerja. Dalam hal kepala desa ini, prinsip yang berlaku adalah: kalau Pusat tidak mampu menggaji dan mengawasi kepala desa (pejabat), rakyat setempat yang harus membiayainya. []



## Penyebar Islam di Indonesia Adalah Ulama Terbaik Pada Zamannya: Perspektif Perdagangan Internasional

Oleh : Yayan Satyakti \*)

*Ulama dibekali dengan pengetahuan luas mencakup beragam bidang. Pengetahuan tersebut digunakan para ulama untuk bisa bertahan hidup dan bersaing di negara asing, baik secara ekonomi dan budaya. Pengetahuan sosial budaya ulama yang diimplementasikan dengan baik di masyarakat pada saat itu merupakan centre of excellence dari kebudayaan Islam di negara asalnya, sehingga dapat menarik hati masyarakat non Muslim.*

Dalam lingkup sejarah Islam di Indonesia pada awal abad 12 - 16, ulama juga berperan sebagai pelaku ekonomi, yaitu sebagai pedagang internasional. Patut untuk dicermati bahwa sarana perdagangan internasional pada saat itu merupakan alat yang sangat efektif dalam penyebaran Islam di Indonesia. Apalagi saat itu sebagian besar wilayah kerja ulama dalam penyebaran Islam masih berada dalam kuatnya pengaruh agama Hindu dan Buddha, baik dalam strata sosial di masyarakat maupun struktur pemerintahan.

Jika kita tarik konsep *international trade* pada saat itu dengan saat sekarang, sangat relevan jika kita bandingkan dengan teori Ricardo pada abad ke-18 tentang teori komparatif dan *general equilibrium* dalam perdagangan internasional (*free trade*) (Bernard, Jensen, Redding, & Schott, 2007). Perdagangan internasional akan terjadi jika dua pihak pelaku perdagangan memberikan benefit efisiensi sehingga menciptakan penciptaan perdagangan (*trade creation*).

Secara teori, asumsi dasar dari timbulnya perdagangan internasional itu adalah *constant return to scale* dan pasar persaingan sempurna. Artinya, teknologi sangat terbuka dan tidak terjadi informasi asimetris (informasi asimetris

atau asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya—red Kasyaf) antara penjual dan konsumen. Keduanya memiliki informasi yang simetris sehingga pasar begitu elastis sehingga siapa pun bisa masuk ke dalam pasar. Dengan begitu asumsi *constant return to scale* selalu mengikuti pasar dalam keadaan *free entry* atau *perfect competition*. Tidak ada halangan masuk ke pasar karena seluruh informasi tersedia dengan mudah.

Nah, kita coba bangun konsep tersebut dalam konsep perdagangan internasional pada masa zaman klasik di abad 12-16, saat Islam menyebar dengan cepat di Indonesia. Konsep perdagangan internasional dapat menjelaskan bagaimana penyebaran Islam di Nusantara terjadi dengan baik. Jika kita merujuk pada sejarah Islam menurut Tomi Pires, orang Arab, Persia, Gujarat, Bengal dan Melayu berdagang hingga mampu membangun masjid-masjid besar. Menurut Pires mereka sudah tinggal di Jawa selama 70 tahun. Tidak hanya orang-orang Jawa, tetapi orang Tiongkok juga merupakan penyebar Islam di Jawa.

Jika melihat pada kondisi ini, dapat kita gambarkan bahwa kondisi perdagangan

\*) Dosen tetap di Departemen Ilmu Ekonomi, FEB UNPAD

internasional di pulau Jawa saat itu yaitu *perfect competition* atau pasar persaingan sempurna. Siapa yang memberikan benefit berupa harga dan akses barang yang paling efisien maka dia akan memenangkan di pasar. Jika kita lihat pelaku pasar perdagangan internasional pada saat itu, pasar sangat terbuka dan sangat kompetitif sehingga kondisi perekonomian dalam konteks efisien secara *general equilibrium*.

#### Efisiensi teknologi dari ulama Islam

Pada teori perdagangan internasional modern, konsep ulama dalam menyebarkan Islam berdasarkan pada fungsi logika efisiensi dan informasi yang simetris. Ulama pada saat itu benar-benar menjunjung tinggi kaidah ekonomi pasar persaingan sempurna dengan baik. Mereka memiliki logika bahwa sebelum berbicara perlu melakukan perubahan *believe structure*, dan dengan demikian komunikasi ekonomi merupakan langkah yang sangat mendasar. Para ulama memakai dua kunci untuk itu, yakni informasi yang simetris dan efisiensi.

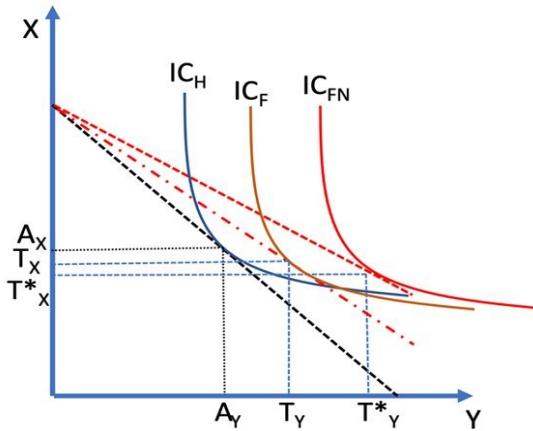
Informasi yang simetris adalah asumsi yang sangat krusial dalam membangun pasar agar efisien. Setiap produsen dan konsumen memiliki informasi yang lengkap terhadap nilai barang yang akan diperdagangkan. Sehingga jika asumsi ini tersedia dengan sempurna, maka *trade creation* (penciptaan perdagangan) akan tercipta.

*Trade creation* ini berlaku jika asumsi sebelumnya yaitu pasar tertutup (*autarky*) berlaku, artinya ketika orang Nusantara memilih berdagang dengan ulama karena melihat bahwa preferensi untuk melakukan perdagangan dengan ulama Islam lebih baik dibandingkan dengan berdagang dengan bukan ulama. Artinya ketika orang Nusantara melakukan perdagangan dengan ulama Islam maka dapat kita gambarkan dengan Gambar 1.

Gambar 1 menjelaskan bagaimana hubungan antara perdagangan antara barang X dan Y antara *autarky* dan penciptaan perdagangan antara permintaan masyarakat Nusantara ( $IC_{FN}$ ) dan negara lainnya ( $IC_F$ ) disekitar Asia Tenggara ada pada abad 12-16. Diasumsikan bahwa perekonomian pada saat itu menghasilkan barang X dan Y. Barang Y adalah barang perdagangan utama yang akan dikonsumsi oleh  $IC_F$  dan  $IC_{FN}$ . Contoh barang yang diperdagangkan di Nusantara atau Pulau Jawa, misalnya rempah-

rempah. Perdagangan ini bisa terjadi pertukaran dengan barang-barang dari Timur Tengah atau Asia Selatan, seperti sutra, minyak wangi, karpet, dan lain-lain.

Gambar 1. Penciptaan Perdagangan Autarky dan Trade Creation Nusantara ( $IC_{FN}$ ) dan Asia Lainnya ( $IC_F$ )



Jika kita melihat kondisi  $IC_{FN}$  yang paling tinggi, artinya permintaan terhadap barang Y--misalkan kebutuhan terhadap rempah-rempah--lebih tinggi dibandingkan dengan barang yang lain (barang X). Sedangkan harganya lebih efisien dibandingkan dengan wilayah lain karena Nusantara memiliki sumber daya yang melimpah (*resource abundance*). Hal ini menyebabkan *indifference curve* dari masyarakat Nusantara ( $IC_{FN}$ ) lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia ( $IC_F$ ). Sedangkan autarky merupakan kondisi dimana tidak ada aktivitas perdagangan, baik untuk wilayah asal ulama seperti Persia, Punjab, Gujarat, Arab dan Tiongkok. Kita ketahui semua orang ingin mengakses Nusantara pada saat itu karena memiliki sumber daya rempah-rempah (*spices*).

Tidak dapat dimungkiri pada saat itu Jawa atau Nusantara merupakan wilayah pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara setelah India, Persia, dan Tiongkok. Dapat dikatakan Nusantara atau Kerajaan Majapahit adalah satu-satunya pusat perdagangan internasional. Tidak mungkin Nusantara didatangi para pedagang internasional tanpa menghendaki benefit yang lebih besar dibandingkan dengan menjalin aktivitas ekonomi dengan wilayah lain.

Pada saat itu pulau Jawa--yang merupakan bagian dari rute perdagangan internasional rempah-rempah--menawarkan harga yang lebih efisien dibandingkan pergi ke Makassar, Banda atau Ternate. Untuk menempuh ke wilayah Timur

memerlukan perjalanan yang sangat lama dan menentang bahaya. Bahaya ini disebabkan sering terjadinya perompakan oleh bajak Laut, serta terjadinya peperangan antara Portugis, Inggris, dan Belanda di wilayah jalur rempah-rempah. Sehingga dengan posisi tersebut Pulau Jawa menambah keunggulan komparatif dibandingkan dengan di wilayah Nusantara lainnya.

Jika kita melihat pada asumsi *no asymmetric information* yang berlaku pada pasar persaingan sempurna saat itu, semua bias terjadi karena para ulama sangat memegang teguh prinsip-prinsip yang ada dalam Alquran. Misalnya:

- “*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar (jujur).*” (QS. At-Taubah: 119)
- “*Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*” (QS. Al-An'am: 152)

Dalam konsep *no asymmetric information*, jujur dalam berdagang menjadi ciri utama dari Rasullah SAW, manakala melakukan perdagangan, seperti yang termaktub dalam “*Muqadimmah*” dari Ibnu Khaldun. Dalam buku itu dikatakan bahwa etika perdagangan Islam ada tiga, yaitu 1) menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan; 2) bersikap benar dan jujur; 3) menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Konsep *symetric information* yang dianut oleh Rasullullah dan para pengikutnya sudah lebih dahulu diterapkan secara etika dan praktik sebelum Akerlof, Spence, dan Stiglitz menerima Hadiah Nobel para tahun 2001, tentang analisis pasar informasi asimetris.

Para ulama dengan *istiqamah* melakukan aktivitas perdagangan dengan menjunjung tinggi jalan sunnah. Untuk mencapai pengertian ini, para ulama yang melakukan perdagangan ini relatif sangat mumpuni dari sisi pengetahuan dan teknologi. Ulama yang melakukan perdagangan internasional ini setidaknya

mengikuti fungsi produksi yang lebih tinggi sehingga mampu untuk memenuhi tingkat *indifference curve* tertinggi dibandingkan dengan *indifference curve autarky* seperti pada Gambar 1.

Kita dapat menggambarkan fungsi produksi sebagai berikut

$$T_Y^* = f(K_Y^*, L_Y^*) \quad (1)$$

Pada persamaan (1) terlihat bahwa barang yang diperdagangan oleh ulama di Nusantara akan memiliki kapital yang lebih baik atau lebih besar ( $K_{T_Y}^* > K_{T_Y} > K_A$ ) dibandingkan dengan fungsi produksi barang pada konsisi autarky, atau dengan negara lainnya.

Selain hal tersebut tidak hanya kapital, sumber daya manusia ( $L_{T_Y}^* > L_{T_Y} > L_A$ ) yang dimiliki oleh ulama juga lebih baik dari sisi pemilihan produktivitas barang dan jasa dibandingkan dengan sumber daya manusia dari autarky dan negara lainnya. Produktivitas dari suatu ulama ini sangat ditentukan oleh pengetahuan dan teknologi yang baik baik dari sisi kapital maupun produktivitas tenaga kerjanya.

Maka jika kita melihat pada fungsi persamaan (1) kita dapat mengatakan bahwa aktivitas perdagangan yang dilakukan ulama yang datang ke Nusantara atau ke Pulau Jawa adalah seorang yang mumpuni, baik secara kapital maupun pengetahuan yang luas dari sisi ekonomi dan sosial budaya. Mereka mengetahui dari sisi aspek geografis, matematika, dan diplomatis agar bisa bertahan di tanah Jawa atau Nusantara yang beragama Hindu atau Buddha.

Tidak mudah untuk memperoleh ke-seimbangan perdagangan internasional pada titik  $IC_{FN}$  dengan kondisi kompetitif pada saat itu. Artinya secara logis, ulama mampu melakukan efisiensi dan menggunakan peluang agar bisa memperoleh titik keseimbangan itu dengan susah payah karena memakan waktu dan waktu yang lama untuk memperoleh kepercayaan di tanah asing.

#### Fungsi etika dan efisiensi teknologi ulama Islam

Selain secara ekonomis, para ulama setelah memenangkan kompetisi secara ekonomi. Maka kompetisi ekonomi masih tetapi dijadikan

sebagai alat kunci untuk menyebarkan keindahan budaya Islam. Seperti yang diuraikan oleh Tome Pires sebelumnya, bahwa para ulama mendirikan masjid yang megah di sekitar tempat perdagangannya. Hal ini tidaklah mudah bagi kelompok minoritas untuk hidup di negeri asing, bahkan membuat tempat ibadah secara terbuka, kecuali secara politik para ulama sangat dekat dengan penguasa, dan popular di masyarakat.

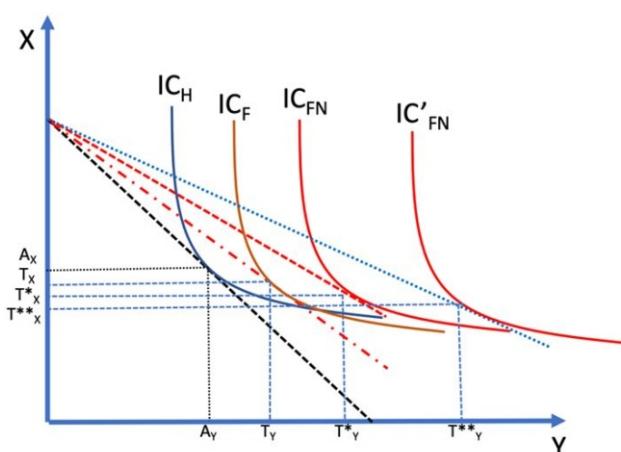
Terlihat jelas etika Islam benar-benar dijalankan oleh para ulama sehingga menambah citra mereka yang berdampak pada peningkatan produktivitas perdagangan internasional. Jika kita melihat pada fungsi persamaan (1) di sini fungsi etika dapat dimasukkan pada dua sisi, yaitu *labor productivity* dan masjid sebagai bagian dari kapital untuk meningkatkan kepercayaan akan barang yang diperdagangkan, dan demikian pula akan orang Islam sebagai pelakunya. Kita dapat mengatakan bahwa etika Islam ini menjadi,

$$T_Y^{**} = f(K_Y^{**}, L_Y^{**}) \quad (2)$$

Di mana  $K_Y^{**} = K_Y^* + \delta K$  dan  $L_Y^{**} = L_Y^* + \epsilon L$ . Untuk  $K_Y^{**}$  adalah fungsi kapital yang disediakan oleh ulama untuk meningkatkan aktivitas perdagangan, dengan orang Islam dengan membangun masjid atau budaya yang dapat menarik aktivitas ekonomi, dengan menambahkan  $\delta K$  pada kapital yang telah ada ( $L_Y^*$ ). Sedangkan  $L_Y^{**}$  adalah dengan menambahkan etika Islam selain etika ekonomi, dengan sejumlah parameter ( $\epsilon L$ ).

Hal ini mengubah kurva pada Gambar 1 menjadi sebagai berikut.

*Gambar 2. Penambahan Etika Islam dalam Perdagangan Internasional*



Pada Gambar 2 terlihat bagaimana dampak dari etika Islam masuk dalam perdagangan internasional di Nusantara lebih meningkatkan produktivitas permintaan selain produktivitas ekonomi. Artinya logika secara ekonomi dan etika dilakukan secara simultan dan memberikan efisiensi dalam perdagangan Islam.

Etika ini berupa pengenalan budaya Islam serta penekanan citra Islam yang humanis dan memasyarakat. Akulturasi budaya Islam dengan budaya yang ada di masyarakat, serta kepiawaian ulama menjalankan aktivitas ekonomi, mampu mengikat secara ekonomi dan social, sehingga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat pada saat itu.

### Kesimpulan

Berdasarkan pendekatan ekonomi tersebut terlihat bahwa penyebar Islam di Indonesia adalah orang yang sangat mumpuni, baik dari sisi ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Ulama tidak hanya seorang yang mumpuni secara ekonomi, tetapi mumpuni secara pengetahuan sosial dan budaya.

Ulama dibekali dengan pengetahuan luas mencakup beragam bidang. Pengetahuan tersebut digunakan para ulama untuk bisa bertahan hidup dan bersaing di negara asing baik secara ekonomi dan budaya. Pengetahuan sosial budaya ulama yang diimplementasikan dengan baik di masyarakat pada saat itu merupakan *centre of excellence* dari kebudayaan Islam di negara asalnya, sehingga dapat menarik hati masyarakat non Muslim.

Artinya, agama Islam di Indonesia pada saat ini merupakan proses dari para penyebar Islam dengan pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Sudah sepatutnya bagi para generasi Islam pada saat ini untuk menjadi *center of excellence* dengan konsep yang sama.

Ilmu pengetahuan di beragam bidang haruslah dikuasai secara mumpuni, baik 'ilmu-ilmu dunia' maupun 'ilmu akhirat'. Kedua jenis ilmu ini akan memberikan dampak yang sangat besar jika dibingkai dengan humanisme Islam yang merupakan rahmatan lil alamin.

### Referensi

Bernard, A. B., Jensen, J. B., Redding, S. J., & Schott, P. K. (2007). Firms in International Trade. *Journal of Economic Perspectives*, 21(3), 105-130. <https://doi.org/10.1257/jep.21.3.105>

Khaldun, Ibnu., (1377) Al-Muqaddimah, Darl Fikri, Lebanon.

Pires, Tomi, (1470 - 1527) Suma Oriental

## Resensi Buku



### Cara Pandang Pikkety Meneropong Kesenjangan Ekonomi

Oleh : Naqiya Syahidati dan Alya Afifah \*)

*Salah satu kekurangan yang terjadi adalah--setelah Piketty melihat kurva tarif marginal dan rata-rata efektif yang dilakukan pada Pure Redistribution di Prancis-- jumlah tunjangan keluarga yang diberikan lebih kecil dari pajak yang mereka bayarkan. Maka individu akan merasa tetap "rugi" walaupun mendapat tunjangan.*

Buku “*The Economics of Inequality*” ditulis pertama kali sejak tahun 1997 dan terus diperbarui sampai tahun 2014 oleh Thomas Piketty yang merupakan seorang ekonom asal Prancis. Topik utama yang dibahas dalam buku ini diawali dengan pembahasan dua politik tradisional yang saling berlawanan.

Pertama, terdapat sayap kanan yang mendukung pasar bebas, di mana dalam jangka panjang, kekuatan pasar, inisiatif individu, dan pertumbuhan produktivitas mempunyai peran yang besar dalam menentukan standard kehidupan seseorang, terutama bagi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sehingga intervensi pemerintah dalam mendistribusi kekayaan itu perlu dibatasi.

Sedangkan sayap kiri berpendapat bahwa salah satu cara untuk meringankan penderitaan orang miskin dari sistem kapitalis adalah dengan usaha sosial dan politik sehingga usaha pemerintah dalam melakukan redistribusi sangat diperlukan. Kekuatan pasar harus dilawan karena dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh oleh kapitalis dan kesenjangan pemberian upah kepada para pekerja. Adanya

perbedaan pendapat dari dua politik tradisional tersebut menumbuhkan pertanyaan terkait sistem redistribusi manakah yang lebih baik.

Buku ini selanjutnya memberikan analisis dalam bab pertamanya terkait sejarah dan keadaan ketidaksetaraan saat ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi kumpulan fakta yang harus dipertimbangkan oleh teori ketidak-setaraan dan teori redistribusi. Ketidaksetaraan sering identik dengan pendapatan, di mana perolehan pendapatan terbagi menjadi *wages* (upah), *self-employment* (dokter, pengacara, dan sebagainya), uang pensiun, *transfer income* lainnya (tunjangan keluarga, asuransi pengangguran, dan lain sebagainya), dan pendapatan modal/ *capital income* (keuntungan, bunga, sewa, dan lain sebagainya).

Berdasarkan hasil survei yang dijelaskan dalam buku ini, menyatakan bahwa 58,8 persen dari total pendapatan rumah tangga yang ada di Prancis pada tahun 2000 berasal dari upah. Selain itu, diberikan penjelasan adanya kesenjangan upah terhadap para pekerja *full time* yang digambarkan dengan perbandingan bahwa 23,7 persen total upah dimiliki oleh para pekerja yang memiliki pendapatan upah paling tinggi.

\*) Keduanya mahasiswa program studi S1 Ekonomi Islam, FEB UNPAD, Angkatan 2018

Tidak hanya di Prancis, penulis juga melakukan perbandingan ketidaksetaraan yang ada di 14 negara OECD pada tahun 1990, di mana perbandingan antara pendapatan upah tertinggi dengan yang terendah berada dalam rentang 2 sampai 4,5. Artinya pendapatan upah tertinggi setara dengan 4,5 kali lipat pendapatan upah orang terendah.

Perbandingan ketidaksetaraan juga dilihat dari kesenjangan pendapatan rumah tangga di berbagai negara dan kesenjangan yang dilihat dari rata-rata daya beli masyarakat pada beberapa periode waktu. Sehingga menentukan kesimpulan bahwa negara-negara yang mengalami peningkatan kesenjangan dalam upah juga akan mengalami peningkatan dalam kesenjangan pendapatan keseluruhannya.

Diskriminasi di pasar tenaga kerja merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidaksetaraan pada *labor income*. Phelps (1968) dan Arrow (1973) menjelaskan mengenai diskriminasi yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus diskriminasi biasanya terjadi karena adanya penilaian subjektif dari pihak perekrut kepada calon karyawan terhadap jenis ras, kasta rendah, kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Terdapat kemungkinan bahwa kelompok yang terdiskriminasi akan ditempatkan pada pekerjaan dengan *low income* dan kelompok yang tidak terdiskriminasi akan ditempatkan pada pekerjaan dengan *high income*.

Dalam beberapa kasus penyebab ketidaksetaraan *labor income* tidak hanya berasal dari kualitas sumber daya manusia yang timpang dan diskriminasi tenaga kerja. Pada beberapa kasus, pelaku ekonomi seperti perusahaan atau instansi pemerintahan dapat memanipulasi struktur upah yang diberikan pada karyawan dengan tujuan keuntungan yang setinggi-tingginya. Menurut Rothenberg (1996), ketidaksetaraan pada *labor income* meningkat ketika para karyawan percaya bahwa para rekruter sangat memungkinkan untuk membuat evaluasi dari hasil kinerja yang dilakukan oleh para karyawan. Para karyawan yang mendapat skor rendah akan mengalami pemotongan upah atau bahkan PHK, dan para karyawan yang mendapat skor tinggi akan melakukan strategi berencana untuk *resign* agar perekrut membayarnya dengan upah yang lebih tinggi.

Ketidaksetaraan yang terjadi ini, menjadikan adanya dua politik tradisional sayap kanan dan kiri yang membentuk dua macam

redistribusi dan sering digambarkan dengan *Pure Redistribution* dan *Efficient Distribution*. *Pure Redistribution* atau Redistribusi Murni dapat terjadi ketika keseimbangan pasar berada di tingkat "Pareto Efficient", di mana suatu keadaan tidak memungkinkan lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi (*better off*) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain (*worse off*), sehingga dalam hal ini kekuatan pasar dan peran alokatif dari sistem harga perlu dibiarkan agar beroperasi secara bebas.

*Pure Redistribution* juga merupakan instrumen redistribusi yang dilakukan dengan dasar redistribusi fiskal, dimana distribusi fiskal modern bergantung pada berbagai pajak (pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, dan biaya sosial), *transfer* (tunjangan keluarga, asuransi pengangguran, jaminan minimum pendapatan, dan pensiun), dan biaya lain yang dikeluarkan oleh pemerintah (biaya kesehatan, pendidikan, dan sebagainya).

Piketty menjelaskan bahwa satu-satunya cara yang efektif untuk mengukur *Pure Redistribution* adalah dengan menggunakan tarif rata-rata dan marginal efektif dari perpajakan dan transfer, dibandingkan dengan dasar menghitung PDB. Namun tarif rata-rata dan marginal ini hanya efektif untuk tingkat tertentu yang pembilangnya mencakup seluruh pajak dan transfer.

Piketty juga memberikan contoh *Pure Redistribution* yang dilakukan pada tahun 1996 di Perancis untuk individu lajang, individu dengan penghasilan mendekati upah UMR, pekerja tanpa anak dan tidak menerima transfer moneter dari manapun, pekerja dengan upah UMR dan memiliki anak, dan lain sebagainya.

Pada contoh yang diberikan piketty, dijelaskan bahwa terdapat kekurangan pada *Pure Redistribution* yang dilakukan di Prancis pada tahun 1996, penetapan kebijakan *redistribution* ini menggunakan dasar perhitungan pajak penghasilan, biaya sosial, tunjangan sosial yang pernah didapat oleh individu seperti jaminan pendapatan minimum, tunjangan rumah, dan lain sebagainya.

Salah satu kekurangan yang terjadi adalah-- setelah Piketty melihat kurva tarif marginal dan rata-rata efektif yang dilakukan pada *Pure Redistribution* di Prancis-- jumlah tunjangan keluarga yang diberikan lebih kecil dari pajak

yang mereka bayarkan. Maka individu akan merasa tetap “rugi” walaupun mendapat tunjangan.

*Efficient Distribution* atau Distribusi Efisien merupakan suatu keadaan dimana ketidak sempurnaan pasar memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi agar mencapai “Pareto efficient” yang menciptakan alokasi distribusi sumber daya yang adil. Selanjutnya, menurut buku ini, *pure redistribution* tidak memasukan variabel Sumber Daya Manusia sebagai dasar untuk menentukan kebijakan. Padahal, dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah perlu menggunakan rasa keadilan sosial dan menjadikan Sumber Daya Manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk kepentingan semua orang.

Dengan begitu dalam hal ini *Efficient Redistribution* juga merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan penyebab kegagalan pasar yang terjadi. Instrumen dari *Efficient Redistribution* terdiri dari tindakan afirmatif, undang-undang upah minimum, dan intervensi tenaga kerja langsung lainnya. Kebijakan pendidikan dan pelatihan juga dapat berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk redistribusi yang efisien dengan memodifikasi struktur ketimpangan pendapatan tenaga kerja.

Mengetahui adanya ketidaksetaraan di berbagai negara serta adanya dua politik tradisional yang berlawanan, penulis melanjutkan analisa mendalam dengan memberikan penjelasan terkait mekanisme yang menghasilkan ketidaksetaraan serta menganalisa teori apa yang sebenarnya benar. Dimana analisa tersebut, dimulai dari melihat ketidaksetaraan antara *capital* dan *labor*, yang dinilai sebagai hal fundamental dari ketidaksetaraan. Suatu negara akan memproduksi suatu barang menggunakan kuantitas *capital* tertentu (mesin, infrastruktur, dan sebagainya) dan kuantitas tenaga kerja tertentu (jam kerja), yang dimana nantinya keuntungan dari hasil produksi tersebut akan didistribusikan kepada pemilik modal/*capital* berupa dividen dan pemberi jasa tenaga kerja berupa upah. Sehingga dikenal substitusi *Capital-Labor* yang memiliki implikasi terhadap redistribusi, dimana tingkat substitusi tersebut akan dipengaruhi oleh tingkat elastisitas substitusi.

Apabila elastisitasnya tinggi, maka perusahaan akan mudah untuk menggantikan

*capital* dengan *labor*, dan sebaliknya. Selanjutnya, apabila nilai elastisitas substitusi lebih besar dari 1, maka 1 persen peningkatan upah akan mengurangi jumlah kuantitas tenaga kerja yang digunakan lebih dari 1 persen, sehingga total keuntungan pendapatan tenaga kerja akan menurun. Apabila elastisitas sama dengan 1 maka keuntungan pendapatan tenaga kerja akan konstan, terlepas dari harga biaya tenaga kerja dan modal. Apabila elastisitas kurang 1, maka total keuntungan pendapatan modal akan menurun dan total keuntungan pendapatan tenaga kerja akan meningkat ketika harga tenaga kerja meningkat. Adanya substitusi *capital labor* yang berimplikasi pada redistribusi menjadikan elastisitas *capital labor* sebagai parameter yang penting dalam menentukan redistribusi instrumen yang paling efektif. Apabila elastisitasnya tinggi, maka fiskal redistribution akan berhasil dan apabila elastisitasnya rendah maka *direct redistribution* akan berhasil. Namun, parameter elastisitas ini secara tidak langsung juga digunakan berdasarkan peran alokasi sistem harga yang beroperasi secara bebas dipasar, dimana hal tersebut sering dinilai kurang sempurna.

Dalam buku ini, Thomas Piketty menyimpulkan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh berbagai macam hal dan dapat dilihat dari berbagai sisi sehingga *Pure Redistribution* dan *Efficient Redistribution* dapat digunakan sesuai dengan keadaan kondisi yang terjadi. Kelebihan dari buku *Economics of Inequality* karya Thomas Piketty ini adalah, walaupun buku yang ditulis 24 tahun yang lalu dan terdapat penggunaan data lama pada penulisannya. Namun tetap terbukti baik dalam hal memberikan saran pada pembaca yang merupakan pembuat kebijakan untuk melakukan analisis yang baik untuk menentukan redistribusi mana yang paling tepat dan harus dipilih untuk menciptakan *rate* ketidaksetaraan yang rendah bagi suatu negara.

Buku ini tidak hanya membahas jenis redistribusi dan penyebab ketimpangan saja, namun juga mengajak para pembaca untuk dapat menganalisis opsi mana yang paling layak untuk mengurangi permasalahan ketidaksetaraan yang terjadi di dunia.

Selain itu, buku ini secara tidak langsung juga membenarkan prinsip keadilan dalam sudut pandang Ekonomi Syariah terutama dalam keadilan tentang distribusi pendapatan. Namun, dalam prinsip Islam, setiap orang yang memiliki

kekayaan berlebih memiliki kewajiban untuk memperhatikan orang yang miskin karena pada konsep ekonomi Islam, terdapat hak orang miskin di dalam harta orang yang memiliki kekayaan berlebih. Sehingga dalam hal pendistribusian harus didasarkan kepada dua aspek, yaitu kebebasan dan keadilan.

Kebebasan di sini ialah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai *tauhid* dan keadilan sehingga terbentuk keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, dan terbentuk keseimbangan antara individu dan masyarakat. Sedangkan keadilan ditujukan agar setiap harta kekayaan tidak hanya beredar di individu-individu yang memiliki kekayaan berlebih saja, akan tetapi dapat dikontribusikan kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Kekayaan disini juga termasuk kekayaan milik negara dengan memberikan upah kepada pekerja yang sesuai dengan jerih payahnya.

Prinsip-prinsip dasar dalam sistem distribusi ekonomi Islam meliputi kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan tersebut, distribusi tidak hanya berpangku pada mekanisme pasar saja karena dalam realitasnya pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena dapat terjadi permasalahan seperti tingkat kompetitif, informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan sebagainya sehingga pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan.

Dalam konsep ekonomi Islam pemerintah mengambil peran yang besar dan penting untuk melakukan intervensi sebagaimana pendapat Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pemerintah adalah pasar terbesar. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, wajar bila pasar yang lain akan ikut menurun. Bagi Ibnu Khaldun, sisi pengeluaran keuangan publik sangatlah penting, seperti contohnya, tanpa pembuatan infrastruktur yang dibuat oleh negara, maka mustahil terjadi populasi yang besar pada suatu wilayah.

Selanjutnya apabila pemerintah menghentikan belanjanya, maka krisis akan terjadi. Kebijakan Fiskal dalam Islam memiliki tujuan yang tidak semata-mata hanya sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi , akan

tetapi juga bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan fiskal pun sudah pernah dilakukan sejak zaman pemerintah khulafaur Rasyidin, yaitu pada zaman Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar membangun sebuah Baitul Mal yang merupakan lembaga pengelolaan keuangan Negara, sumber pendapatan baitul mal tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya ada pendapatan zakat dan ushr, Khums dan Sedekah, Kharaj, fa'i, jizyah, dan pendapatan lain-lain. Klasifikasi pendapatan ini bertujuan agar suatu pendapatan tidak tercampur dengan sumber pendapatan yang lain.

Zakat yang merupakan bagian utama dalam penerimaan negara menjadi salah satu kerangka dalam kebijakan fiskal pada saat itu, zakat sendiri merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan, selanjutnya pendapatan zakat tersebut didistribusikan kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat.

Pada zaman Umar zakat dikelola oleh negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan negara sehingga zakat dapat menjadi salah satu alat untuk meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin, selain itu zakat juga mempunyai peran yang signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

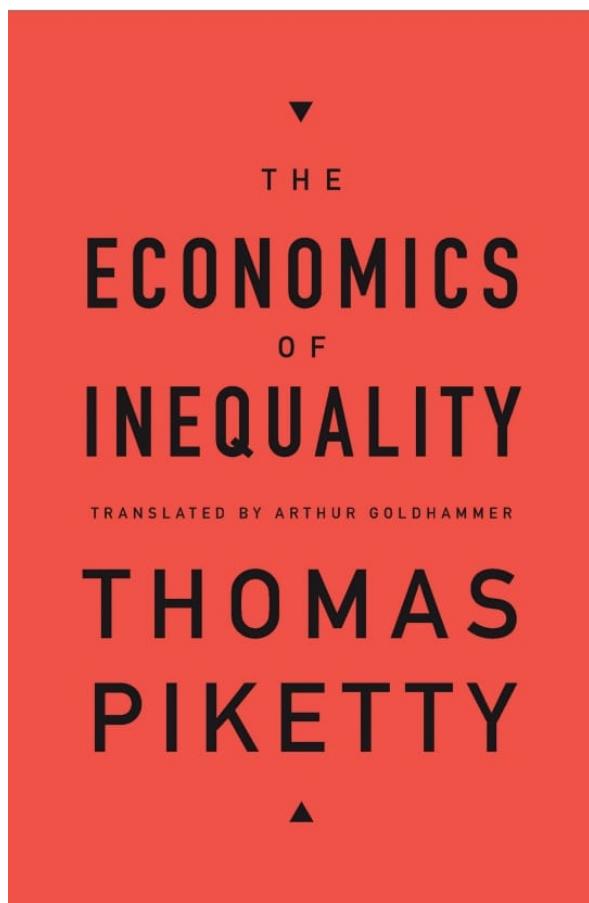
Kebijakan fiskal lainnya juga pernah dilakukan pada zaman Dinasti Umayyah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II) yang merupakan Khalifah ke-8 pada Dinasti Umayyah. Meskipun masa kekhilafahannya sangat singkat yaitu dua tahun, namun Umar II berhasil menjadi penerang pada keadaan ekonomi Dinasti Umayyah. Kecemerlangan kebijakan fiskal Umar II didukung oleh latar belakang dan pengalamannya yang baik dalam hal ekonomi. Pada pemerintahan sebelumnya, diterapkan beban pajak seperti kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak non muslim) yang sangat tinggi. Kebijakan ini menimbulkan ketimpangan ekonomi yang tinggi karena banyaknya tanah tidak produktif yang disebabkan tingginya pajak yang harus dibayar.

Kebijakan fiskal yang dilakukan Umar II untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah dengan melakukan desentralisasi dan

dekonsentrasi sistem pengelolaan zakat, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan berikutnya Umar II menghapuskan pungutan jizyah kepada setiap orang yang baru masuk Islam (Mu'allaf) dan mengurangi beban pajak atas Kristen Najran dari 2000 keping menjadi 200 keping, dan juga tidak diwajibkan membayar kharaj.

Kebijakan ini membuat banyak warga yang masuk Islam pada masa pemerintahan Umar II.

Kebijakan selanjutnya yang dilakukan Umar II yaitu dengan melakukan subsidi silang, daerah yang mengalami surplus dalam neraca keuangannya diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada daerah yang mengalami defisit dalam keuangan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, banyak daerah yang tidak mengalami defisit keuangan dan Umar II berhasil mengurangi ketimpangan ekonomi pada Dinasti Umayyah. [ ]



Penerbit: The Belknap Press of Harvard University Press  
Tahun 2015  
Jumlah halaman: vii + 142

## Resensi Buku



### Keluar Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya: Tentang “Political Corruption in Indonesia”-nya Todung Mulya Lubis

Oleh : Firman Jatnika \*)

*Kegagalan untuk mengimplementasikan undang-undang adalah wujud kesenjangan kemauan dan kooordinasi dari seluruh Lembaga terkait antikorupsi untuk menggunakan seluruh sumberdaya buat menghasilkan strategi dan rencana aksi yang baik. Singkatnya, Indonesia gagal karena ketidaksetimbangan antara hukum yang dibuat dengan strategi aksi untuk menjalankannya.*

Persoalan Korupsi adalah bagian dari problem bangsa ini yang mengakar dan tidak pernah tuntas ditangani. Bahkan Profesor Mahfud Md, menkopolkam, meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang dinilai koruptif dan oligarki.

"Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan," kata Mahfud. "Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," kata Mahfud. (Tempo, 1 Mei 2021)

Sejak tahun 1954, Pramudya Ananta Toer lewat novel berjudul "Korupsi", secara akurat telah memprediksi bahwa sebagai Indonesia sebagai bangsa yang masih muda akan rusak oleh korupsi yang menyebar. Korupsi adalah ancaman sebenar-benarnya terhadap pelemahan sistem nilai bangsa dan negara yang diperjuangkan para pendiri bangsa ini. Suatu nilai prinsip untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan sehat atas dasar keadilan sosial yang menjadi impian bangsa Indonesia. Impian yang mungkin tidak berdasar karena korupsi yang semakin meluas.

Todung Mulya Lubis menekankan bahwa korupsi sama tuanya dengan sejarah manusia. Korupsi bukanlah hal baru. Kenyataanya, statistik sejak tahun 1954 sampai 2011 memperlihatkan korupsi bukannya menurun atau berkurang sama sekali. Malahan menggembung, menyebar dan terdesentralisasi di seluruh pelosok negeri.

Pada buku terbitan CSIS tahun 2017 yang merupakan karya tulis selama Todung Mulya Lubis belajar di Harvard Kennedy School, Todung menulis jalan tak berujung, perjuangan melawan korupsi di Indonesia.

Todung menulis bahwa di era pemerintahan Suharto yang non-demokratis (authoritarian government), korupsi kelihatannya menjadi hukum dasar, bukan pengecualian, korupsi yang tampak di belahan bumi manapun di seluruh dunia. Untuk rezim ini, mengelola korupsi dari atas sampai ke bawah adalah inti dasar strateginya untuk memperkuat loyalitas dan kesatuan pemerintahannya. Korupsi pada saat itu tersentralisasi sebagaimana pemerintahan.

Setelah reformasi di tahun 1998, seluruh elemen demokrasi berusaha memerangi KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil. Semangat anti-KKN inilah yang menjadi pemersatu seluruh masyarakat untuk membangun komisi antikorupsi yang baru. Pendirian unit antikorupsi menjadi the conditio sine qua non keadilan sosial di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan mandate dan otoritas penuh untuk menjadi Lembaga independen pemberantasan korupsi, sehingga dijuluki 'superbody'.

Menurut Todung, secara hukum, Indonesia memiliki produk hukum dan peraturan penting yang diperlukan untuk melawan korupsi. Bahkan mungkin Indonesia memiliki perundang-undangan antikorupsi yang lebih komprehensif dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Kegagalan untuk mengimplementasikan undang-undang adalah wujud kesenjangan

\*) Praktisi Perbankan Syariah, Pegiat Ekonomi Islam

kemauan dan kooordinasi dari seluruh Lembaga terkait antikorupsi untuk menggunakan seluruh sumberdaya buat menghasilkan strategi dan rencana aksi yang baik. Singkatnya, Indonesia gagal karena ketidaksetimbangan antara hukum yang dibuat dengan strategi aksi untuk menjalankannya.

Dari sisi institusi juga sama. Indonesia memiliki hampir keseluruhan lembaga atau agency yang bekerja untuk memerangi korupsi. Di luar pemerintahan, Indonesia juga memiliki lembaga organisasi masyarakat dan pers yang mendukung gerakan penguatan antikorupsi. Indonesia memasuki era keemasan untuk mewujudkan strategi politik baru untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat tanpa korupsi.

Di Indonesia, perjuangan melawan korupsi sejak awal kemerdekaannya dengan membentuk komisi dan program selalu menjadi 'show case', untuk menutup mulut para aktivis dan demonstrasi mahasiswa. Oleh karenanya, upaya pemberantasan korupsi selalu gagal karena pemerintah tidak pernah punya komitmen yang kuat melawan korupsi.

Sejatinya, penguatan demokrasi dalam logika sederhana akan mengurangi korupsi. Terdapat korelasi yang positif antara demokrasi dan penurunan korupsi karena demokrasi secara gradual akan mempersempit peluang korupsi.

Teorinya, ongkos korupsi akan semakin tinggi di negara yang demokratis, akan mengurangi praktik korupsi. Namun demikian kenyataannya justru berlawanan. Di Indonesia, para pengusaha lokal dan militer menempuh jalan tersendiri untuk membentuk aliansi dengan partai politik dan pemerintah daerah. Demokratisasi membuka jalan penguatan otonomi pemerintah daerah sekaligus membuka jalan desentralisasi korupsi.

Pada akhirnya, korupsi bertransformasi, di masa lalu dan di banyak kasus. Semula korupsi didefinisikan dengan singkat dan sederhana 'korupsi receh'--korupsi karena kebutuhan, berubah menjadi 'korupsi akbar' atau korupsi politik. Korupsi receh dapat ditemukan praktiknya di banyak kantor pemerintahan yang alasannya karena para pegawai tidak mendapatkan gaji yang cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari.

Namun korupsi karena keserakahan (korupsi akbar) adalah jenis korupsi yang dilakukan oleh

para elit, pejabat tinggi dan politisi termasuk menteri, gubernur, bupati, walikota dan anggota parlemen. Kebanyakan dari mereka adalah anggota partai politik. Hal yang harus ditekankan adalah tidak pernah dalam sejarahnya, kecuali di era ini, terlalu banyak politisi yang dikirim ke penjara karena korupsi.

Tentu saja ini bukan sekadar dan sejenis dengan korupsi kerah putih-white collar crime. Ini adalah korupsi yang bukan karena kebutuhan, namun melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk mengontrol dan mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Ini adalah korupsi politik.

Korupsi politik dapat diterjemahkan dengan sederhana sebagai korupsi pemilu dengan kepentingan, politik uang, menyogok para pemilih, dan pemanfaatan uang untuk mendapatkan suara. Bukti empiris memperlihatkan sejak reformasi di tahun 1998 membawa kita pada kesimpulan, bahwa selain proses konsolidasi demokrasi yang berjalan lambat di satu sisi, Indonesia juga berhadapan dengan korupsi yang bertransformasi, ber-evolusi, dari korupsi individu yang recehan, ke korupsi akbar yang sistemik, meluas dan menyebar di seluruh pelosok negeri.

Setelah era Suharto, korupsi politik semakin meluas dan terbuka. Penghapusan subsidi terhadap partai politik mengakibatkan partai kehilangan sumber pendanaan. Kondisi inilah yang mendorong partai politik mencari berbagai cara untuk mendanai kebutuhan mereka yang semakin meningkat.

Dengan mengizinkan partai untuk menggalang dana melalui cara-cara terlarang, hal ini mendorong partai harus mengeksplorasi setiap kesempatan, dan untuk keperluan tersebut, mereka harus berdekatan atau menjadi bagian dari kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal ini bisa menjelaskan mengapa partai politik bersikeras untuk bergabung dalam kabinet karena status di kabinet -kekuatan politik- menciptakan banyak peluang untuk mengumpulkan dana.

Todung sampai pada kesimpulan bahwa negara yang demokrasinya masih awal berproses atau masih dini, sayangnya malah membuka kesempatan korupsi memperbarui diri dalam bentuk korupsi politik. []



## Tere Liye Memandang Korupsi: Kita Memang Bangsa Pemuja Korupsi dan Pelakunya

Oleh : Tim KASYAF

*Mengapa di Indonesia begitu banyak koruptor? Menurut Tere Liye karena memang masyarakat kita masih bermental korup. Mau diakui atau tidak, kata dia, mayoritas kita masih oke-oke saja dengan mental korup tersebut*

Barangkali, untuk saat ini, mereka yang tak pernah membaca, atau setidaknya tak pernah mendengar nama 'Tere Liye' adalah orang yang jauh dari literasi.

Kalau pernyataan di atas terdengar terlalu berani, tampaknya masih mungkin kita bilang, mereka itu adalah orang-orang yang mungkin sering medatangi mal, tapi luput datang ke toko buku Gramedia. Memang toko buku mana yang ada di kota kita saat ini kecuali nama yang disebutkan tadi?

Pasalnya, buku yang ditulis atas nama itu, tampil cukup dominan di tokbuk Gramedia mana pun. Di hampir setiap Gramedia, buku-buku Tere Liye memiliki tempat khusus yang disediakan untuk memajangnya. Sesuatu yang dimungkinkan tidak hanya karena begitu produktifnya sang pengarang--sehingga tampaknya tak ada tiga bulan yang berselang tanpa kehadiran buku barunya--melainkan pula karena buku-buku lama Tere Liye pun senantiasa dicari orang sehingga penerbitnya merasa wajib untuk terus mencetak ulang.

Tere Liye memang fenomenal. Tak pernah disebut-sebut juri dan dijadikan nominasi pada ajang penghargaan sastra di Indonesia,--misalnya Khatulistiwa Literary Award--tak membuat penulis bernama asli Darwis itu harus kehilangan kesempatan namanya dirapal dan dikenang khalayak pembaca. Seolah, ia memang tak memerlukan ajang penghormatan resmi-resmian seperti itu, karena masyarakat sendiri yang langsung mengakui keberadaannya.

Darwis juga tampaknya tidak terlalu peduli apakah karya-karya yang ia tuliskan dipandang

sebagai "karya sastra" atau tidak. Sekian (puluhan) tahun berlalu sejak karya pertamanya terbit awal 2000-an, tak sekali pun Darwis pernah terlihat mempertanyakan mengapa tak sekali pun namanya disebut sebagai nominator di ajang-ajang resmi penghargaan susastra dalam negeri.

Namun apa lagi bukti paling valid dari penerimaan publik atas sebuah karya tulis dan penulisnya, kecuali ramai-ramai mereka membeli, membaca, dan berkomentar massif di berbagai social media?

Jangan salah, Tere Liye tak bisa dinafikan telah menjadi salah satu ikon budaya pop saat ini. Akun *Facebook* yang bersangkutan memiliki pengikut (*followers*) 6,3 juta akun (orang?). Jumlah yang lebih dari cukup untuk menjamin setiap karya-karya barunya meledak di pasaran. Dan itu yang dengan jeli dilihat Penerbit Kelompok Kompas-Gramedia (KKG). Meski 'dilahirkan' dan ditawarkan ke masyarakat via penerbit *Republika*, saat ini harus diakui bahwa Tere Liye dibikin lebih ngepop dan ngetop oleh KKG. Sah-sah saja, bahkan baik-baik saja, tentu.

Tetapi dalam soal 'ikon budaya massa' ini, Tere Liye jauh lebih bertanggung jawab dibanding--sebagai contoh--para *Youtuber*. Setidaknya, Tere Liye aktif menularkan dan membangun kebiasaan berliterasi. Secara kontinyu--entah berapa kali per tahun, bersama Gramedia atau penerbit lainnya, atau tidak, ia selalu membuka ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk belajar menulis. Beberapa programnya yang berjalan baik adalah "Program Literasi Bersama Tere Liye", yang digelar di

beberapa TK-SD, serta "Workshop Menulis Bersama Tere Liye" untuk para pelajar SMP-SMA.

Berapa buku telah ia tulis? Dalam rentang nyaris dua dasa warsa ini, tampaknya sudah bukan lagi puluhan. Mungkin saja telah mencapai ratusan. Belakangan, Tere Liye bahkan mulai memasuki para pembaca pemula—mungkin untuk bisa berkontribusi pada dunia literasi di usia awal—yakni anak-anak SD, bahkan TK.

Namun yang juga menarik, adalah mencermati komentar-komentarnya di laman *FB*, nyaris setiap hari. Seringnya dalam sehari tak hanya satu dua komentar atau lontaran ia ajukan. Tak jarang lebih dari tiga, atau bahkan lima. Komentar-lontaran itu sering hanya menyebut hal-hal ringan seputar dunia 'anak baru gede' (ABG), tentang pacaran, sikap terhadap mantan, selfie, hal-hal apa yang boleh dan yang sebaiknya tidak menjadi bahan 'curhat' di media sosial yang terbuka. Seputar itu.

Tetapi tidak jarang juga menyisir persoalan yang lebih serius, tentang kebangsaan, masalah-masalah aktual yang terjadi di bangsa ini, seperti persoalan Panca Sila, penjajahan Belanda dan peran Westerling. Yang terakhir kami lihat sebelum penulisan artikel ini misalnya soal 'Bipang Ambawang'. Juga persoalan yang telah 'menempel' terlalu lama dalam keseharian bangsa kita: korupsi.

Justru pada soal terakhir inilah, korupsi, Tere Liye tergolong antusias berkomentar. Tampak benar sikapnya yang muak, bosan, namun tidak kehilangan harapan bahwa pada saatnya korupsi harus hilang dari 'kebutuhan'—atau 'kebiadaban' (?) negeri ini.

\*\*\*

Di bawah ini kami kutipkan beberapa komentar-lontaran Tere Liye soal korupsi dan masalah seputar urusan rasuah tersebut. Kami bersepakat untuk tidak melakukan pengubahan ejaan dan cara penulisan kata, agar ciri khas penulis tersebut tidak serta merta kami hilangkan. Namun, tentu saja kami memotong beberapa kalimat sesuai keperluan. Kami susun secara kronologis, namun terbalik.

## 29 Mei 2021

\*Tidak adil, toh?

Gaji ketua KPK itu berkisar 120 juta sebulan (termasuk tunjangan dll). Gaji staf2 KPK bervariasi sekitar 20 s/d 50 juta sebulan. Tinggi?

Wajarlah, pekerjaan mereka penting sekali. Melawan korupsi.

Kalian tahu berapa gaji+bonus komisaris BUMN? Kalau yg sekelas Telkom, PLN, Pertamina, Mandiri, itu sebulan bisa 1.000.000.000 s/d 2.000.000.000, alias milyaran.

Nah, nasibnya adalah, untuk jadi PNS KPK, pegawai2 KPK yg sudah belasan tahun mengabdi, sudah nyata sekali prestasi kerja mereka, kongkrit, nangkepin koruptor, mereka harus ikut buanyak sekali test, termasuk Test Wawasan Kebangsaan. Barulah jadi PNS.

Sekarang pertanyaannya, untuk jadi komisaris, testnya apa?

Orang2 yg sorry, latar belakang pendidikan tdk nyambung, pengalaman di korporasi besar tidak ada (jangankan korporasi dgn karyawan puluhan ribu; perusahaan dgn karyawan 100 sj tdk pernah), itu di test nggak pas jadi komisaris dgn gaji milyaran? Masa' gajinya bisa 50 kali lebih banyak, testnya nggak 50x lebih banyak juga? Kayaknya mudah banget deh jadi komisaris.

Semakin ke sini, dengan semakin terang dipertontonkan politik balas budi begini, bagi-bagi posisi utk pendukung, sy sih kasihan lihat BUMN-nya. Bayangkan, di BUMN itu ada 25.000, ada yang bahkan 40.000 karyawan, banyak yang lulusan S2 dari Eropa, Amerika, mereka harus diawasi oleh orang2 yg boleh jadi kompetensinya jauuh sekali di bawah mereka.

Kasihan lihatnya. Tapi mau gimana lagi? Wong, karyawan BUMN-nya saja tidak protes. Mingkem saja. Jadi siapa yg mau protes? Dinikmati sajalah. Yang penting masing2 aman. Gaji aman, sisanya bodo amat. Mari kita menabuh tifa pesta menyambut 2024, karena mereka sudah siap sedia pasang strategi. Pura2 tdk tertarik jabatan, tapi saat posisi komisaris datang, langsung cup!

Mari berdansa, kawan, sambil lihat2 situasi. Nanti kita 'menjilat' siapa lagi?

## 8 Mei 2021

Pak Bos,

Dulu elu bilang mau nambah penyidik KPK ribuan. Hari ini 75 pegawai KPK terancam. 9 diantaranya KASATGAS Penyelidikan dan Penyidikan. Mereka bukan orang biasa, mereka itu penyidik senior, berpengalaman. Mereka pernah lulus ujian polisi, lulus ujian masuk KPK,

dan semua pelatihan militer, bela negara, dll. Mereka telah bekerja bertahun2 dgn hasil prestasi kongkrit. Mereka berhak sekali jadi PNS. Test buat mereka cukup formalitas sj. Lantas sahkan. Simpel. Tidak penuh drama.

Pak Bos, elu itu kalau ngomong, masih ingat tidak?

\*Tere Liye, penulis novel 'Negeri Para Bedebah'

\*\*video dari youtube Official Net News, ini janji kampanye 2014

\*\*sy Tere Liye, sy dizalimi dengan jutaan buku bajakan sy dijual bebas di mana2, sementara setiap sen pendapatan sy dikenakan pajak, setiap sen transaksi perbankan sy dilihat pemeriksa pajak. tapi sungguh, rasa sakit sy tidak ada apa2nya dibanding pegawai KPK yg berani mati demi menangkapi koruptor. sudah rela mati, eh mereka terancam disingkirkan oleh test yg sangat subyektif.

\*\*buat kalian yg tdk terima page ini pakai kosakata 'elu', maka ketahuilah, itu justeru panggilan sangat terhormat. akrab, dekat. kamu saja yg sensitif dan baperan. hanya orang yg sangat disayang yg dipanggil elu gw oleh page ini.

## 7 Mei 2021

Kami menulis ttg kejujuran, anti korupsi, bukan untuk dibaca pejabat. Keliru sekali jika untuk mereka. Karena mereka tidak akan berubah. Sudah kadung jadi begitu mentalnya.

Lantas untuk siapa? Untuk jutaan pembaca remaja di page ini. Satu saja tulisan itu tumbuh di hati mereka, maka saat menyaksikan murid menyontek di sekolahnya, guru membiarkannya, remaja ini memberanikan diri menghadap guru lantas sambil menahan tangis dia bicara, "Nyontek jahat. Ibu, Bapak malah membiarkannya! Itu jahat sekali."

Itulah yang disebut dengan jalan panjang mendidik generasi berikutnya. Saat pemahaman baru tumbuh di hati mereka. Kokoh. Lewat apa menumbuhkannya? Teladan terbaik. Contohnya. Tulisan2 menggugah. Buku2 menginspirasi. Apakah akan berhasil? Tidak ada jaminan akan sukses. Tapi kamu mau ikut tidak melakukannya?

Tabik.

## 4 Mei 2021

Dear Tuan, Nyonya

Kalian berlima itu adalah kapten, pemimpin, panglima perang dari KPK. Tugas kalian adalah memimpin penyidik2 paling berintegritas, paling berani melawan korupsi. Kalian berlima berdiri di depan, memimpin mereka, sekaligus melindungi mereka dari serangan siapapun.

Bukan sebaliknya, membiarkan anak buah kalian malah jadi bulan2an pihak lain. Malah membiarkan mereka ditendang keluar. Kalian seharusnya bilang, 'Langkah dulu mayat saya sebelum kalian merecoki anak buah saya.'

Tuan, Nyonya, sejarah akan mencatat, apakah kalian berlima ini berkontribusi memperkuat KPK atau sebaliknya melemahkan. Kalian jelas telah mencatat sejarah: SP3 pertama. Belum lagi kasus2 lain, yg wah, lama2 kalian mirip sekali dgn lembaga tetangga, yg jago membungkus sesuatu.

Maka, ayolah, gunakan nurani terakhir kalian.

Kalianlah 5 kapten dari KPK, kalian harusnya membela habis2an penyidik berprestasi kalian. Bukan sebaliknya, membiarkan mereka diterkam siapapun, lantas dibuang.

## 28 Februari 2021

\*Kok bisa?

Berhentilah kalian halu sekali suka komen: 'Dia kan orang baik, berprestasi, kok jadi tersangka korupsi? Kok masuk penjara?' Sebentar, yang bilang dia orang baik, siapa? Media? Penilaian netizen? Prasangka kamu?

Saya tampilan sebuah foto dari potongan video yang dulu hebat sekali. Jadi alkitab, orang2 ini bikin iklan katakan tidak pada korupsi. Lantas mereka bergaya di depan kamera. TIDAK! TIDAK! Keren banget ini iklan. Pesannya kuat, kokoh. Ekspresi mereka juga bagus sekali.

Bertahun2 kemudian, dua diantara mereka masuk penjara. Karena korupsi. Padahal mereka orang baik, mereka berprestasi, mereka bla bla bla. Si Anas ini misalnya, dia adalah bekas Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Kok bisa?

Jadi berhentilah halu sekali membela siapapun yang ditangkap KPK, masuk penjara, dll. Mereka orang baik?

Kalau kalian mau tahu, bahkan yang mencuri dari orang miskin, memotong uang bansos rakyat2 kecil, tega sekali melakukannya, MEREKA JUGA ORANG BAIK. Kok bisa? Lah, kalau mau pakai versi setiap orang, semua orang akan bilang dia baik. Bahkan yg sudah jelas2 korupsi, sudah jelas mencuri, dia bisa ceramah ttg kejujuran.

Lantas versi siapa yang dipakai? Biarlah TUHAN kelak yang mengadilinya? Itu betul. Idealnya begitu. Hanya Tuhan yang bisa menilainya. Tapi kalau nunggu TUHAN mengadilinya, nunggu kiamat dulu, percuma perintah amar ma'ruf nahi munkar diturunkan. Maka biarlah KPK yang memprosesnya. Mereka sejauh ini bukan penegak hukum kaleng2. Periode pimpinan baru ini memang tidak segarang yg lama2, tapi setidaknya tetap bekerja. Doakan kinerja mereka terus membaik sampai periodenya berganti.

## 30 Januari 2021

\*Jelek Tapi Tidak Merasa

Bagaimana mengukur sebuah negara itu korup atau tidak? Bukan dengan mendengarkan hiruk pikuk medsos, apalagi membaca postingan akun2 yg setiap hari berisik tapi kosong saja.

Salah-satu cari terbaiknya, dengan melihat CPI. Apa itu CPI? Kepanjangannya dari Corruption Perceptions Index. Yang dikeluarkan oleh Transparency International. Lembaga global yang memerangi korupsi.

Mereka membuat skor 0-100, dari berbagai negara di dunia. Jika skornya tinggi, berarti korupsi di negara itu rendah. Jika skornya mendekati 0, korupsi di negara itu parah. Lembaga ini mengambil data2 dari organisasi lain yg valid, terpercaya, dari survey, assesment, dll terhadap sektor publik. Itu komprehensif sekali. Silahkan buka website mereka jika ingin tahu banyak.

Lantas, setiap tahun, mereka merilis skor negara2 di dunia. Tahun 2020, skornya keluar. Di ranking 1 ada Selandia Baru dan Denmark, berbagi skor yg sama 88. Indonesia? Ada di ranking 102, dengan skor 37.

Itu menyedihkan sekali. Karena tahun lalu, 2019, skor kita masih 40, urutan 85 dari 180

negara. Saya ingat, KPK 'merayakan' kenaikan skor tsb. Sayangnya, itu prestasi KPK jaman sebelumnya. Setelah revisi UU KPK, pemimpin baru muncul, skornya jatuh bebas. Skor ini lebih rendah dibanding 2018. Lima tahun KPK generasi lama susah payah menaikkan skornya. Sekarang terjung bebas.

Seriusan, kalau ada yang bilang pemberantasan korupsi di Indonesia itu membaik, kamu mengalami halusinasi parah. Apalagi kalau bilang KPK mengalami penguatan. Itu betul, 2 menteri ditangkap KPK tahun 2020. Tapi itu prestasi, kecil saja dibanding periode sebelumnya.

Ketahuilah, menurut CPI ini, 30% pengguna layanan sektor publik di negeri ini menuap. Sedih kan? Padahal layanan publik itu harusnya hak setiap warga negara. Keperluan administrasi, surat-menyerat, dll, dsbgnya, itu hak. Kok bisa malah nyuap biar beres.

Nah, yang sedihnya adalah, banyak orang semakin halu. Dia mengira pemberantasan korupsi itu politik. Duh Gusti, orang2 ini adalah munafik sejati. Pemberantasan korupsi itu adalah penegakan hukum. Kebenaran dan keadilan. Tidak ada hubungannya dengan elu idolanya siapa. Elu mau jilat pantat siapa. Orang2 inilah yang semakin merusak sosialisasi di masyarakat betapa pentingnya kita bersama2 melawan koruptor.

Tapi netizen model begini, dia akan galak sekali jika kelompok lawannya korup. Tapi membela habis2an jika itu urusannya dengan idola atau kelompok mereka. Hambalang dibahas oke, bangkai Busway dibahas dia marah. Dan sebaliknya, bangkai Busway dibahas dia hore, Hambalang dibahas dia ngamuk.

Sungguh, kita tidak akan pernah berhasil memberantas korupsi ini jika kita selalu berpikir ini politik. Apalagi jika KPK, mulai dari UU-nya, pimpinannya, 'ditentukan' oleh politik. Ambyar.

Entahlah. Hari ini, banyak memang yang merasa halu.

Sungguh. Jika kamu merasa negeri ini baik2 saja soal korupsi. Kamu lihatlah indeks persepsi korupsi ini. Lihat, pelajari. Jangan cuma habiskan waktumu hanya sibuk nge-tweet, memuji sana-sini idola dan kelompokmu, serta menggongong buas jika ketemu yg menyinggung idola dan kelompokmu.

Mulailah merasa. Penegakan korupsi kita itu mengalami kemunduran sejak UU KPK direvisi, pimpinan diganti. Rezim sekarang lebih sibuk ngurusin infrastruktur dan bansos2an. Ayo, jangan sampai, kita itu teruuus saja jelek, tapi tetap PD, merasa bagus sedunia.

## 23 Desember 2020

### \*BENCI

Setiap kali menulis tentang masalah negeri ini, mulai dari utang, korupsi, dll, dsbgnya, saya selalu berpikir. Apakah saya sedang benci dengan negeri ini?

Duh, dek, kalau mau benci, saya ini bisa benci sekali. Kenapa? Kamu buka marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dll, November 2019, saya dan tim pernah menghitung berapa penjualan buku2 bajakan saya di sana? 1 juta lebih. Coba bayangkan, kalian punya produk, entah bikin baju, bikin bakso, bikin apapun itu, lantas 1 juta terjual, kalian sepeser pun tidak dapat uangnya? Jangankan dirugikan 1 juta, nggak dapat bansos saja kalian sudah ngamuk. Atau gaji kurang bayar saja ngamuk. Bonus akhir tahun batal, juga ngamuk. Saya dirugikan 1 juta buku lebih. Itu kalau ditumpuk, Istana negara juga 'tenggelam'.

Saya juga pernah menghitung ebook ilegal yang dibagikan di website, telegram, line, whatsapp, lebih crazy lagi, jutaan, susah ngitungnya. Belum lagi yang menonton film2 dari buku sy secara ilegal, juga jutaan.

Kalau mau benci, saya bisa benci sekali dengan Indonesia ini. Lihat, karya2 sy tidak dilindungi. Tapi saat urusan pajak, wah, mereka bahkan meminta setiap lembar rekening koran bank saya. Semua transaksi dilihat, saya beli sikat gigi, sabun colet, dan semua transaksi, dilihat di rekening itu. Kalian pernah dipelototin begitu?

Apakah saya benci dengan negeri ini? Tidak.

Tepatnya, buat apa saya benci? Hanya menghabiskan waktu saya.

Lebih baik saya mengambil jalan, ikutan mengubahnya. Bagaimana caranya? Edukasi. Mendidik.

Inilah yang tidak dipahami oleh netizen yang mudah baper, tersinggung, ngamuk.

Saat menulis tentang kita butuh KPK yang kuat, duuh, Gusti, memang kita butuh bukan? Saat menulis kita butuh pemerintahan yang ramping, efisien. Nah loh, masa' kamu beda pendapat, malah setuju pemerintahan banyak pejabatnya? Dan lebih epik lagi, saat netizen menyangka itu hanya membahas satu sisi. No way. Tulisan di page ini berlaku utk semua kelompok. Termasuk tim di pemda Jakarta, itu semua pemborosan. Sudah ditulis jelas2 di tulisan tsb, tapi nasib, tetap saja ada yang sakit hati, bilang Tere Liye memihak.

Adik2 sekalian, ketahuilah, saya itu sudah menjadi penulis sejak jaman Soeharto. Saat SMA, sy beberapa kali ke Jakarta, termasuk menghadiri acara kemerdekaan. Ketemu sama dia dan menteri2 lain era tsb. Saat duduk menatap orang2 ini, sy memahami satu hal: 'orang2 ini, pejabat2 yang terlihat hebat ini tidak abadi, besok lusa mereka PASTI berhenti. ada yang pensiun dgn 'damai', ada yang ditangkap karena maling, ada yang dijungkalkan. pejabat2 ini tidak abadi. TAPI ada yang akan berumur panjang, Indonesia.'

Kita selalu diberikan kesempatan melahirkan generasi lebih baik. Sepanjang kita memang mau. Dan itu tidak pernah mudah. Lihatlah, di page ini saja, dulu sy survei, apakah menyontek itu boleh? 15% menjawab boleh. Lihat, negeri kan? Karena jangankan 15%, cukup 0,15% penduduk Indonesia yang bilang mencuri itu boleh, koruptor di negeri ini sudah puluhan ribu.

Jangan tutup mata, kitalah yang ikut melahirkan koruptor2 baru ini. Kita semua. Maka, mari dibalik prosesnya, mari ikut mengedukasi, mengubah. Itulah kenapa tulisan2 tsb dirilis.

Kalaupun hanya berhasil mengubah 1 anak, itu sudah berhasil. Semoga besok lusa menyusul 1 anak lagi yang meyakini nyontek, nyuri, maling itu jahat.

Negeri kita itu dalam masalah yang serius sekali. Bayangkan, sekelas menteri saja mereka korup. Jika pejabat setinggi itu saja korup, apalagi di level bawahnya. Nah, jika kalian benar2 mau paham dunia kepenulisan Tere Liye, coba scroll dulu semua tulisannya, baca sebanyak mungkin. Nanti kalian bisa melihatnya terang benderang.

Akan repot sekali, hanya membaca 1-2 tulisan, kalian langsung menyimpulkan Tere Liye

*membenci negeri ini, wah, itu prematur sekali kesimpulannya*

**14 Oktober 2020**

**\*Ribut, baru diurus**

*Apanya yang prestasi? Jika kasus2 penegakan hukum di negeri ini baru diurus saat orang2 sudah ribut.*

*Persekongkolan pengacara, jaksa dan bintang satu polisi atas buronan Djoko Tjandra misalnya. Kalian percaya gitu, kalau kasus ini tidak diledakkan oleh aktivis anti korupsi, kasusnya bakal diurus? Kagak. Setelah medsos ramai, setelah media massa ramai, baru mereka tergerak untuk mengurusnya.*

*Kasus konser dangdutan saat pandemi di Tegal contoh berikutnya. Setelah semua ramai, medsos ramai, media massa ramai, baru mereka mengurusnya. Jadi tersangka itu pelaku. Coba kalau tidak ramai, diem-diem bae, lupakan.*

*Demo protes UU baru ditunggangi. Setelah orang2 ribut minta aparat serius nangkepin siapa penunggangnya, baru bergerak. Dodol. Elu harusnya sudah tangkap sebelum semua orang berisik. Sebelum pejabat ngoceh. Sekali itu provokasi whatsapp beredar, ada bukti, ada saksi, segera bekuk. Tidak ada jeda, cekatan. Karena penunggang demo ini adalah musuh bersama, pengkhianat. Mereka merusak esensi demo dari anak2 sekolah, mahasiswa, yang betulan pergi demo tanpa kepentingan berkuasa. Kelompok penunggang ini menjijikkan. Berlagak jadi pahlawan. Padahal mereka hanya mengincar jabatan.*

*Banyak sekali contoh di negeri ini, setelah ribut, viral, baru dibereskan. Terutama kasus2 penegakan hukum. Jika tidak ada yang berisik, itu kasus dilupakan, entah apa penyelesaiannya, masuk peti es. Kalian tahu istilah 'dipetieskan'? Dari sinilah istilah itu berasal, masuk peti es. Lupakan.*

*Cobalah sesekali elu bikin kejutan. Bahkan sebelum orang ribut, sebelum orang tahu, itu koruptor kelas kakap sudah ditangkap. Kaget semua orang. Wah, hebat ini. Sebelum orang berisik di medsos, screenshot diposting, dll. Itu pemilik rekening gendut (entah jenderal, entah pejabat) telah memakai baju tahanan, karena tersangkut korupsi. Kaget dong semua orang. Wah, kok kami ketinggalan info.*

*Bukan sebaliknya.*

*Orang2 sudah berisik, protes, elu baru gerak. Dan lucunya, hal2 begini dijadikan ukuran 'prestasi' oleh fans pemerintah. Setelah semua ribut, setelah begitu banyak energi ditumpahkan, baru diurus. Apanya yang prestasi? Itu seharusnya memang dibereskan. Pemerintah menjadikan bintang satu polisis pembuat surat jalan Djoko Tjandra sebagai tersangka, itu prestasi? Ambyar. Prestasi itu, kalau kasus ini tidak pakai ribut2 dulu, eh itu pengacara, jaksa, bintang satu sudah ditangkapi. Kaget deh rakyat. Ternyata aparat penegak hukum itu memang: kerja, kerja dan kerja. Meroket prestasinya.*

*Lagi2, ketahuilah, rakyat itu tidak semuanya cerewet, benci. Mereka itu duuh, berharap semua itu berjalan secara profesional, amanah, transparan, akuntabel. Dan harapan itu valid sekali, ada argumen pendukungnya. Satu, mereka sudah menunaikan kewajiban membayar pajak, dll. Dua, yang mau jadi pejabat, aparat penegak hukum itu kan kalian toh dulu? Berebut. Saling sikut. Dan kalian sudah digaji. Jika sakit hati, tidak terima dikritik, simpel: berhenti jadi aparat. Beres toh? Nah, kalau kalian masih mau gagah pakai itu seragam, bekerjalah gesit. Cekatan. Tanpa harus rakyat berisik dulu.*

**22 Desember 2019**

*Thomas, dalam cerita novel "Negeri Para Bedebah" dan "Negeri Di Ujung Tanduk" punya solusi simpel dan pasti berhasil mengatasi korupsi. Bagaimana caranya?*

*"Legalkan saja korupsinya. Saat korupsi dilegalkan, saat semua orang berlomba2 korupsi, saat itulah semua jadi hancur lebur; kita bisa re-start semuanya."*

*Demikian kata Thomas.*

*\*Elu lebih setan daripada setan*

*Bayangkan situasinya. Ada bencana. Ribuan, jutaan orang kena. Susah makan, susah kemana2. Semua serba susah. Sementara kontrakan harus bayar--atau kalau nggak diusir. Bayi nangis, karena susunya nggak ada, cuma bisa dikasih air. Anak-anak tidak bisa sekolah, karena nggak punya HP. Utang numpuk di warung, cicilan menunggu.*

*Bayangkan situasinya. Ada bencana. Ribuang, bahkan jutaan orang butuh bantuan.*

*Kasihan lihatnya. Mereka cuma makan nasi sama mie instan tiap hari. Mereka harus stress mikirin kerja nggak dapat. Kerja kena PHK. Tidak punya tabungan, dll. Mereka bukan pemalas, tapi dunia lagi kena bencana. Semua jadi susah.*

*Sementara elu,*

*Punya tabungan, banyak. Punya rumah, mobil. Punya pekerjaan. Gaji tetap. Bisa kemana2 naik pesawat garuda, dibayarin negara. Nginep di hotel berbintang dibayarin. Anak2 elu bisa sekolah. Tidak pusing kontrakkan dan cicilan.*

*Elu punya segalanya. Hidup elu jauh lebih baik.*

*Tapi dasar bedebah! Elu malah maling, ngembat uang bantuan untuk korban bencana tersebut.*

*Elu lebih setan daripada setan.*

*Dan lebih ambyar lagi, netizen2 yang tetap saja sibuk jilat pantat, berebut jabatan. Asyik halan2 ikut. Partai politiknya yang tetap belain. Dan semua orang yang tidak peduli, tutup mata saat kejahanan dipertontonkan lebar di depannya. Mana kepedulian elu? Kok mingkem saja.*

*Bedebah, elu tahu tuntunan agama? Hanya ada tiga hal yg bisa dilakukan saat kejahatan, kemungkaran pesta pora di depan elu. Satu, elu bereskan dengan tangan. Dua, elu ingatkan dengan lisan, tulisan. Tiga, elu benci sebencinya, dan inilah cara dgn level paling rendah.*

*Nah, elu mau ngambil yg nomor berapa? Atau elu masuk bagian yang lebih setan daripada setan ini? Hanya karena belum kebagian saja jatahnya? Ayolah, negeri ini tdk akan pernah baik2 saja, jika urusan korupsi begini, lebih banyak yg diam sekarang.*

## 12 Desember 2020

\*Itu berat, kata siapa mudah?

Kata siap berubah itu mudah? Itu susah.

*Ada pegawai, tiap hari dia harus menyaksikan hal2 hina di kantornya. Mulai dari teman2nya yang kerja santai, tidak amanah, sampai pesta pora korup, dll. Beraaat banget lihatnya. Karena takut dia besok2 ikutan, pegawai ini memutuskan berhenti. Lantas apakah hidupnya jadi mudah? Tidak selalu.*

*Padahal dia sungguh2 pengin 'hijrah'. Hidupnya malah serabutan. Penghasilan menurun. Penuh dengan masalah baru.*

*Ada anak muda, tiap hari dia selalu menikmati streaming ilegal, ebook bajakan, semua yang haram2 dia embat. Saat dia memutuskan berhenti total. Insyaf. Apakah hidupnya otomatis jadi mudah? Tidak. Semua yang selama ini gratis, tersedia, harus bayar. Semua yg selama ini mudah, gampang saja, jadi susah, ribet.*

*Ada pedagang yang tidak mau berurusan lagi dengan segala sesuatu yang merugikan orang lain. Juga yang haram, riba, meragukan, menipu, dll. Saat dia banting setir, mulai berusaha agar usahanya berkah, apakah mudah? Tidak. Penjualan menurun, konsumen lari, dan semua kesulitan lainnya.*

*Ada yang mau meninggalkan kebiasaan bergosip. Ada yang mau meninggalkan malas. Dll, dsbgnya. Apapun perubahan yg dia tahu akan membuat hidupnya lebih baik. Mudah dilakukan?*

*Duh, dek, saat kita memutuskan memutar haluan hidup kita menuju kebaikan, apakah malaikat lantas turun berduyun2 di langit, membantu kita? Tidak.*

*Karena memang begitulah kenyataannya. Agama sudah menasihati, barang siapa yang sungguh2 ingin hidupnya lurus, jujur, maka tidak ada garansi hidupnya akan jadi lebih mudah. TAPI sungguh, sejak detik itu juga, setiap kesulitan yang datang menimpanya, setiap kemalangan yang datang menghampirinya, itu akan dihitung kebaikan baginya.*

*Duhai Tuhan penguasa segenap alam. Bukankah itu janji yang spesial sekali. Bahkan kesulitan, kemalangan pun akan dihitung kebaikan. Apalagi jika kemudian yang datang adalah kemudahan, rezeki tidak terduga, lebih2, itu sungguh semua kebaikan.*

*Sungguh, berubah menjadi lebih baik itu berat. Maka jika kalian sudah bertekad bulat, mulailah dilakukan. Tidak apa jika malah dapat kemalangan2 berikutnya. Tetap saja teguh. Bilang dalam hati, saya ingin berubah.*

## 7 Desember 2020

\*Ribet

*Saya sejak jaman Ken Arok dulu sudah bilang, jika kamu orang mau bantu rakyat miskin, maka kasih saja uang tunai. Selesai.*

Kamu orang tidak perlu repot2 bikin paket sembako. Itu betul, masing2 jenis bantuan ini ada keunggulan dan kekurangannya. Tapi suer deh, bantuan tunai jelas lebih unggul dan aman.

### 1. Kamu orang mengurangi kesempatan korup

Sekali bantuan sosial itu berbentuk sembako, duh Gusti, itu paket isi sembako siapa yang nyiapin? Rempong. Beli dimana? Bungkusnya apa? Itu rantai mematikan yang semua titik ada kesempatan korup.

### 2. Kualitas paket sembako itu kacau

Ada 10 paket sembako dibagikan, di 10 daerah, dijamin, 10-nya beda semua. Telornya beda, berasnya beda, belum lagi nanti beras bisa sama persis, eh harganya beda. Namanya juga paket sembako. Semua bisa diotak-atik.

### 3. Kebutuhan orang beda

Lah, kamu orang kasih telor, memangnya semua mau makan telor? kasih masker, dia sudah punya di rumah. Kasih susu, dia nggak suka susu. Mending kasih uang. Terserah mau dia belikan apa.

### 4. Menghidupkan warung2 lokal

Nah, ini juga penting sekali. Kalau elu kasih ke PT atau CV, atau rekanan itu proyek paket sembako. Ambyar itu warung2 lokal. Coba elu kasih duit, itu warung2 bisa hidup. Ekonomi lebih jalan. Ngapain elu menambah kaya PT dan CV besar? Atau ehem, itu punya elu sendiri PT dan CV-nya?

### 5. Paket sembako itu menambah biaya

Ampun dah, dimana2, saat elu menggerakkan barang, dibuat terpusat, itu logistik, dll penuh biaya tambahan. Nggak ada jaminan kalaupun belinya banyak akan jadi murah. Malah tambah repot, karena elu jadi butuh gudang, staf yang mengemas, dll. Nah, bantuan tunai? Cuma biaya transfer. Beres.

Seriusan, logika sesederhana ini kok susaaaah banget disetujui. Entahlah Kementerian Sosial, Pemda, Pemkot, yang ngurus bansos dan mengotot kasih paket sembako itu isi kepalanya kayak apa. Apa sih yang ada di otak kalian? Saya tahu, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Ngasih BLT / tunai itu juga bisa dikorup, bikin susah yang nggak punya rekening bank, dll. Tapi suer deh, proyek bansos paket sembako jelas berkali2 beresiko dikorup. Lebih enak tunai, toh, hari

gini, bagiin uang dengan aman itu banyak caranya. Kantor pos, loket2 bank di desa2, dll.

Atau kamu mengotot tetap pakai paket sembako, biar bisa ngembat juga?

16 November 2020

### \*Keluarga Koruptor

Di negeri ini, 'sanksi sosial' bagi orang yang punya istri banyak, lebih berat dibandingkan orang yang sekeluarga korup. Lihatlah, orang2 lebih asyik mengunjingkan, gosip, kepada orang yang punya istri banyak. Tapi koruptor. Kalaupun digunjingkan, besok2 lupa.

Itulah kenapa koruptor di sini bisa asyik2 saja. Lihat, jelas2 sebuah koruptor, masuk penjara, dia masih santai komen sana-sini. Keluarganya juga masih bisa cengengesan main medsos. Bahkan, dalam kasus yang epic, orang2 ini masih bisa bicara tentang kejujuran, moralitas, sibuk menilai orang lain. Lupa, jika dia koruptor. Keluarganya koruptor.

Di negeri ini, banyak yang terbalik.

Mereka sibuk membicarakan artis, pesohor, gosip, sibuk menonton etalase pamer sana, pamer sini. Tapi coba saat membicarakan tentang jangan nyontek. Jangan nyuap. Jangan maling. Mendadak ada bisul di jari mereka. Duuh, soal jangan nyontek ini, betulan, mendadak diam.

Sibuk membicarakan aib sana, aib sini, mengurus keluarga orang lain, tapi saat perkara lebih penting, seperti produk2 mencuri, bajakan, ilegal. Mendadak 'mati' orang2 ini. Fantastis.

Maka semoga kalian tidak.

Jangan jadi netizen yang sibuk mengurus perkara2 yang sejatinya itu bukan urusan kita. Tidak merugikan kita. Tapi malah luput mengurus tentang kejujuran, anti korupsi, anti barang2 maling, dll. Yang sebenarnya urusan kita semua.

Nah, mulailah misalnya dengan membahas tentang: koruptor. Para pencuri. Semakin banyak orang2 yg membahas soal ini. Minimal, itu bisa jadi pengingat. Bahwa koruptor itu jahat. Orang beristri banyak bagaimana? Itu bukan urusan kita. Orang kawin cerai? Masalah keluarga orang? Itu bukan urusan kita.

18 Oktober 2020

### \*Utang kamu, utang kita semua

Tahun 2019, berapa bunga utang yang dibayar pemerintah Indonesia? 275 trilyun (pernyataan Kemenkeu). Berapa pokok utang yang jatuh tempo tahun 2019? Sebesar 409 trilyun (website Kemenkeu). Total jenderal dua barang ini adalah 684 trilyun. Angka ini terus membesar tiap tahun. Dengan asumsi utang yang jatuh tempo dan bunga naik 5% setiap tahunnya, maka 2024, Indonesia wajib melunasi utang+bunga sebesar Rp 872 trilyun.

Jika kecenderungan utang terus bertambah tinggi, apalagi dengan adanya pandemi, maka hanya hitungan jari di tangan saja, entah pada tahun ke berapa utang jatuh tempo+bunga per tahun ini akan tembus Rp 1.000 trilyun.

Tenang, tulisan ini tidak sedang menjelaskan siapapun. Tulisan ini sedang mengedukasi kita semua, bahwa segitu loh utang jatuh tempo dan bunga utang negara kita. Mosok dikasih tahu angka-angka ini kalian langsung menggila. Karena bukan apa-apa, itu akan dibayar oleh anak cucu kita semua. Bukan sama yang ngutang hari ini. Mereka sih sudah lengser, bahkan banyak yang mungkin sudah mati ketika semua utang ini lunas.

Apakah kita mampu membayarnya? Baik, mari kita lihat datanya. Tahun 2019, realisasi pendapatan negara kita total jenderal sebesar 1.957 trilyun. Terdiri dari pajak 1.545 trilyun, PNBP 405 trilyun, dan hibah 6,8 trilyun. Dibandingkan periode tahun 2018, hanya tumbuh 0,7%.

Rp 684 trilyun vs Rp 1.957 trilyun. Terlepas dari yg jatuh tempo bisa di reskedul, restrukturisasi, dll, kita hitung semuanya. Itu berarti sepertiga pendapatan negara untuk bayar utang. Masih masuk akal. Tapi ada yang seharusnya mulai menyimak angka ini dengan seksama. Apa? Jumlah utang jatuh tempo+bunga per tahun itu naiknya 3-5% per tahun, sementara pendapatan negara naiknya hanya 0,7%. Dan kita belum bicara tahun 2020, ketika pandemi tiba. Utang naik lebih cepat, pendapatan negara malah turun.

Kita selalu membandingkan utang ini dengan rasio GDP (PDB). Tidak salah juga sih, negara2 lain juga begitu. Tapi catat baik2, tahun 2014, debt to GDP ratio kita masih 24%. Hari ini,

sudah 34%. Alias naik 10% dalam waktu 6 tahun. Saya lagi2 minta maaf, jika ada yang menggilaih angka2 ini. Lagi2, ini hanya mengedukasi masyarakat luas. Dan data2 ini dari pemerintah juga, Kemenkeu dkk. Jika keliru dan ada yang merasa punya angka lebih valid dengan senang hati tolong informasikan, nanti kami perbaiki. Kecuali jika link2 yang kami pakai tersebut dibilang hoax, masih draft, belum final, kami nyerah.

Nah, yang menarik adalah, saat utang negeri ini tumbuh pesat, kelakuan aparat dan penegak hukum tidak mendukung agar penerimaan negara tumbuh. Kan ambyar. Misal, Netflix, Google (termasuk Play Books), dll, dsbgnya telah resmi dipajakin oleh pemerintah, ada PPN. Jika kalian beli ebook atau kalian langganan streaming, ada tambahan 10% PPN sejak beberapa bulan terakhir. Harusnya, dengan begitu, aparat penegak hukum agresif sekali memerangi website ilegal, ebook ilegal. Karena nggak perlu stupid utk memahaminya, jika banyak penduduk Indonesia yang pakai link ilegal, film, buku, streaming, dll maka berapa trilyun negara dirugikan? Kita belum menghitung oportunity cost yg hilang dari bioskop2, dan turunan industri, dll gara2 pemberian link bajakan, dll.

Ada yang harus dipahami sekali oleh siapapun di negeri ini. Meskipun yang terus berhutang itu adalah pemerintah, yang menanggung cicilan pokok dan bunga itu adalah kita semua. Ketahuilah tahun 2019, utang jatuh tempo+bunga sebesar 684 trilyun. Darimana uangnya buat balikin? Pajak, dan utang lagi. Tahun 2019, kita nambah 359 trilyun utang baru. Nyaris setiap hari nambah 1 trilyun.

Oleh karena itu, penting sekali semua memahami kewajiban masing2. Saya, sebagai penulis, apa tugasnya? Simpel, saya membayar pajak, terus bikin buku2 yg seru, agar konsumsi naik, masyarakat beli, pajak naik lagi, GDP naik lagi. Aparat penegak hukum? Nah, ini yang saya tidak tahu apa tugasnya. Mungkin kalian tahu.

Netizen puja kerang ajaib, lagi2 sy tidak tahu apa tugasnya. Apakah mereka lapor SPT 2019 kemarin saja belum jelas. Apalagi bicara soal berapa miliar pajak yg mereka bayar ke pemerintah. Pahami tugas masing2 ini dengan baik, dijamin, negeri ini bisa mengurangi utangnya. Kita memberikan kontribusi pajak ke negara. Tapi kalau semua tutup mata, semuanya mau 'digaji/dikasih' melulu sama negara, malah

ada yg sibuk menggerogoti uang negara dgn proyek2, korup, dll, ambyar deh.

## 27 Agustus 2020

### \*Kenapa koruptor banyak?

Karena memang masyarakat kita masih bermental korup. Mau diakui atau tidak, mayoritas kita masih oke-oke saja dengan mental korup tersebut.

Page ini misalnya, mudah sekali memvalidasinya. Setiap kali page ini memposting jangan nyontek di sekolah, dijamin, banyak yang marah, ngamuk, bahkan balas ceramah: jika ngasih kontekan itu adalah ibadah yang diajarkan agama, tolong-menolong. Kok bisa? Karena memang sudah segitu parah rusaknya. Sejak kapan coba nyontek masuk tolong-menolong.

Page ini, lagi2 contoh berikutnya, memposting tentang jangan beli produk bajakan. Buanyak sekali yang ngamuk, balas ceramah tentang berbuat baik, hitung2 sedekah, dan sebagainya. Kok bisa? Karena memang mereka terbiasa mencuri, jadi mau bagaimana lagi? Tidak merasa itu dosa, malah bangga nyolot, mengumumkan dia melakukannya. Belum bicara soal korupsi waktu di kantor, menyepelikan amanah, dsbgnya, dsbgnya.

Maka, jika negeri ini masih banyak koruptor, wajar. Karena mental korup itu masih subuuur sekali di masyarakat kita. Lihat betapa banyak yang suka melanggar peraturan di lalu lintas, melawan arah misalnya, diingatkan, dia yang lebih marah. Berapa banyak yang nerobos antrian, diingatkan, dia ngamuk. Maka, bayangkan jika orang2 ini kebagian kesempatan utk korup, dia bisa lebih mengerikan dibanding tragedi bakpao.

Tapi kabar baiknya, saya percaya, generasi berikutnya bisa dididik untuk tidak korup. Kita bisa mendidik anak2 yang sejak kecil tahu tentang kejujuran, dan siap untuk jadi orang yang jujur. Anak2 yang tidak mau aniaya dan zalim ke orang lain. Tahu apa hak-hak dan apa kewajibannya.

Masih lama memang, kita harus mengguyur (flush) satu atau dua generasi lagi barulah generasi ini muncul. Dan semoga saat prosesnya berlangsung, orang2 yang korup hari ini, mereka tidak 'berkembang-biak' lagi. Ada yang memutus

penyebaran virus korup tsb. Mereka sih tidak bisa diharapkan banyak mendidik anak2nya, lah, mereka saja korup, bagaimana rumusnya mendidik anak2nya untuk jujur. Tapi jika orangtuanya korup, semoga anak2nya tetap bisa mendapatkan pendidikan dari buku2 yang baik, tontonan yg baik, pengaruh teman2 yang baik, lingkungan yg baik, sekolah yg baik, insya Allah, anak2 mereka bisa jadi lebih baik.

Hidup ini tidak perlu-lah hebat-hebat banget. Cukup pastikan kita tidak korup, itu sudah lebih dari memadai.

## 13 September 2020

### \*Nggak nyambung

Berapa sih gaji perwira menengah polisi itu? Beserta tunjangan, maka besarnya kurang lebih 20 juta sebulan. Ada polisi di sini? Mungkin bisa bantu konfirmasi, right?

Apakah ini besar? Tergantung. Untuk rata2 penduduk Indonesia, jelas besar. Banget. Tapi untuk punya rumah harga 2-3 miliar, mobil 2-3 buah dengan harga total bisa 1 miliar, aset tanah dll dimana2. Sorry, nyaris tidak masuk akal.

Gaji 20 juta itu, setidaknya 10-15 juta habis utk keperluan rumah tangga, biaya sekolah anak, hiburan, dll, dll. Sudah hemat ini, cuy. Sisa 5-10 juta. Darimana rumusnya bisa nyicil rumah mewah 2-3 miliar, mobil dll dengan sisa gaji 5-10 juta sebulan? Setahun itu hanya terkumpul 60-120 juta.

Berapa gaji jaksa, hakim? Baiklah, utk jaksa, hakim pengabdian 15-20 tahun, mari kita rata2 saja 20 juta juga sebulan. Ada jaksa, hakim di sini, mungkin bisa konfirmasi angkanya. Maka darimana nyambungnya jika dia ternyata sudah punya aset 6, atau 10 miliar hanya 20 tahun bekerja? Gimana ngitungnya?

Alasan favorit biasanya: dia punya bisnis sampingan. Yang bisnis itu bisa ngasih uang 500 juta, bahkan milyaran per tahun. Baiklah. Masuk akal. Tapi sorry, lagi2 kita menemukan hal yang menarik. Jika bisnisnya menghasilkan 10-20 kali lipat dibanding gaji sebagai aparat, kenapa tidak fokus saja ke bisnis? Konsentrasi penuh. Wah, besok2 bisa jadi konglomerat. Ngapain harus menyibukkan diri dgn kerja di kantor yang harus masuk, dinas, dll. Yang sampingan itu yang mana? Atau 'posisi' sebagai aparat itu penting sekali utk melancarkan bisnis?

Kita sebenarnya punya cara yang jitu sekali jika mau melakukan reformasi atas lembaga

penegak hukum. Bagaimana caranya? Seluruh penegak hukum wajib menyetorkan data kekayaan mereka. Bahkan level paling bawah, semua wajib setor. Rekening bank, aset, semua wajib dilaporkan, termasuk yg didaftarkan atas nama anak, istri, keluarga. Lantas dari sini, semua mulai diperiksa. Siapapun yang ketahuan menyembunyikan data, berbohong, sikat. Siapapun yg tidak bisa menjelaskan sumber asetnya, periksa. Kita itu sudah punya lembaga yg mampu menelusuri aset, dll ini. Jika dipandang perlu, maka siapkan lembaga independen seperti KPK, khusus utk membersihkan penegak hukum yg bermasalah.

Kita membutuhkan penegak hukum yang bersih. Karena bagaimana rumahnya akan bersih jika sapunya kotor? Naif sekali jika kalian membantah fakta ini. Lihatlah ada bintang satu polisi bisa dibeli untuk membuat surat meloloskan koruptor. Crazy. Ada jaksa yang bisa dibeli juga, dsbgnya. Panjang daftarnya. Dan itu baru dari yg ketahuan. Lantas bagaimana yang tidak ketahuan? Ini bukan soal suuzon, berprasangka buruk. Ada contoh nyatanya, cuy. Dan itu membuat geleng2 kepala. Kok bisa bintang satu mau ngurus hal remeh, surat jalan.

Jika negara ini memang benar2 niat mau mereformasi penegak hukum, bisa. Asal niat. Kongkrit. Ini bukan masalah politik. Ini masalah penegakan hukum dan keadilan. Percayalah, kita MASIH punya polisi, hakim, jaksa yang jujur. Orang2 beginilah yang diberikan jabatan, kekuasaan untuk memperbaiki lembaganya. Bukan aparat penegak hukum yang sorry, asetnya kagak nyambung dengan profil gajinya.

Tapi berkali2 ganti rezim, berkali2 ganti partai yg berkuasa, lihatlah, apa yang terjadi? Kita terus saja dipertontonkan penegak hukum yang ganjen. Main mata dengan penjahat. Kalau sudah begini, wah, bahkan level menengah bawah saja diam2 mungkin punya aset milyaran. Apalagi yang diatas, gendut rekening dan asetnya.

Penting sekali reformasi lembaga penegak hukum ini. Karena percayalah, sekali hukum benar2 tegak di negeri ini, perekonomian akan meroket dengan sendirinya.

Semoga masih ada yg masih mau memikirkannya. Dan buat kalian polisi, jaksa, hakim, kitalah yg tahu persis kita itu jujur atau tidak. Harta benda yg kita miliki itu diperoleh dari cara jujur atau korup, kita tahu persis,

sepanjang nuraninya masih nyala. Di page ini ribuan anak2 dari polisi, jaksa, hakim yg membaca tulisan2 ini. Semoga orang tua kalian termasuk yang amanah dan profesional.

\*\*Pelaporan harta itu tidak ada gunanya jika tdk ada tim independen yang memeriksa total semuanya. Pembuktian terbalik atas aset penegak hukum. kenapa dia bisa punya aset, dstnya, ditanya. kalau cuma model lapor2 doang yg ada sekarang, itu sih formalitas. Setiap kali kami menulis sebuah masalah, kami fokus ke substansi, bukan 'bermain indahnya kata'. mau dibuat semua rakyat indonesia wajib lapor aset, tapi kalau substansinya cuma lapor, cuma jadi arsip, kagak guna.

### 3 Juli 2020

\*Selamat untuk KPK

Tangkapan KPK ini biasa saja sebenarnya. Hanya level Bupati. Tapi jika diperhatikan lebih detail, ini sangat menarik. Mereka suami istri.

Yang laki bernama Ismunandar, adalah Bupati Kutai Timur, dari Partai Nasdem. Sementaraistrinya bernama Encek, Ketua DPRD Kutai Timur, dari partai PPP. Dua-duanya ditangkap KPK tadi malam, atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Suami istri kesekian yang dicokok oleh KPK.

Kalian tahu sudah berapa suami-istri pejabat yang ditangkap KPK? Yeah, 8. Sebagian besar lagi menghabiskan masa tahanan. Bayangkan betapa kacaunya negeri ini. Suami-istri, di rumah mereka mungkin ehem suka diskusi begini, "Pa, jadi besok kita korup barang itu?", "Iyalah, Ma, kita korup saja." Lantas anak2 mereka akan bisik2, "Papa sama Mama lagi ngapain sih?", "Ssst, mereka lagi ngomongin korupsi uang, kamu kerjain PR aja." Mungkin begitu.

Tahniah, KPK. Ayo, bekerja lebih giat lagi. Penyidik, Jaksa2 KPK, tuntaskan kasus ini di pengadilan. Buktikan. Dan tuntut hukuman maksimal.

### 1 Juni 2020

\*Burongan

Kalian kenal dengan Nazaruddin? Tidak? Tidak apa. Saya akan menceritakannya.

Dia adalah Bendahara Umum Partai Demokrat. Tahun 2004-2014, saat SBY berkuasa, Demokrat ini digadang2 bakal jadi partai besar,

mengalahkan hegemoni Golkar, PDIP. Tapi apa yang terjadi? Nazaruddin, juga Ketum Demokrat Anas, korupsi. Banyak kasusnya. Dengan drama yang fantastis.

Nazaruddin kabur dari Indonesia. Mei 2011, dia kabur ke LN. Heboh sudah NKRI. Apalagi Demokrat, oleng kapal mereka. Dan KPK, sungguh mengagumkan, bekerja taktis, tanpa takut, mengejar Nazaruddin. Padahal dia ini dari partai berkuasa. Agustus 2011, Nazaruddin ditangkap di Kolombia. Mantap. Dia dibawa pulang.

End game. Nazaruddin masuk penjara, ketum Demokrat masuk penjara, beberapa elit lain Demokrat masuk penjara. Apa nasib Demokrat? Kembali menjadi partai medioker.

Tahun 2011 itu, sy mengikuti dengan seksama kekacauan ini. Dan yg sangat mengagumkan, KPK terus mengejar Nazaruddin.

Nah, sekarang kita punya kasus baru.

Kalian kenal dengan Harun Masiku? Dia ini bukan pengurus PDIP, tapi kasus dia ini super fantastis menarik. Kenapa? Hanya dia yang bisa membuat PDIP, mengirim surat 3x ke KPU untuk menjadikan dia sebagai anggota DPR. Suap menyuap terjadi. Tentu saja bro, mana ada yg gratisan.

Tapi beda dengan kasus Nazaruddin dulu, sungguh, situasi telah berubah. Sepi. Lengang. Senyap. Saya tidak tahu lagi ngapain 5 pimpinan KPK yg baru di sana. Belum lagi kejadian penuh drama soal penangkapan yg gagal di lokasi ehem dekat PTIK. Belum lagi drama2 lain soal keberadaan Harun Masiku. Ambyar, baru kali ini menonton 5 pimpinan KPK model begini. Simpang siur, beda informasi, dsbgnya. Saya masih percaya 100%, penyidik2 KPK itu gregetan

minta ampun pengin menangkap Harun Masiku ini. Entah dengan 5 pimpinannya. Gregetan atau tidak.

Penting sekali Harun Masiku ini ditangkap. Kesaksian dia bisa membuka terang-benderang apa yg terjadi di PDIP ketika 3x surat itu dikirim ke KPU. Usut sampai tuntas. Bodo amat jika dia dari partai penguasa. Tahun 2011, semua dilibas. Kenapa sekarang jadi santuy begini? Apa sih yang berbeda sekarang? Ahhh, kalian simpulkan sendiri.

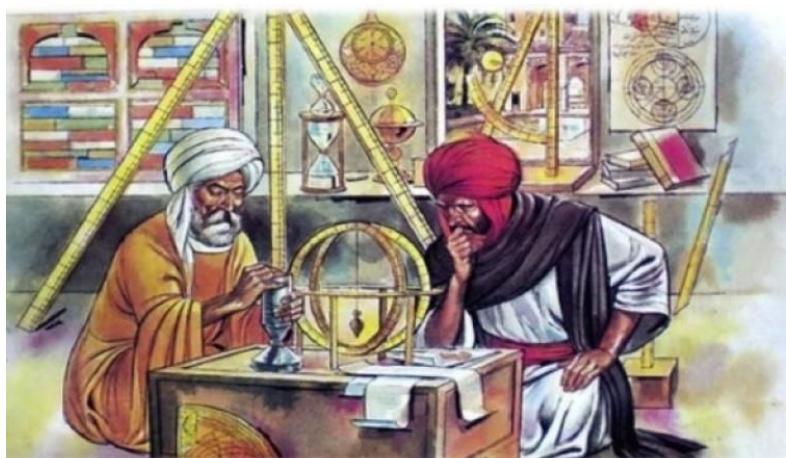
Semua koruptor, tukang suap, dkk itu adalah musuh NKRI. Mau dia dari PKS (korupsi daging sapi), mau dia Golkar (drama bakpau), mau dia dari partai manapun, habisi. Bangkai Hambalang, bangkai busway, dan bangkai2 lain itu seharusnya diusut. Karena kerugian negara itu dibayar dengan uang pajak rakyat, dan hutang. Mau sedikit atau banyak korupsi adalah korupsi. Bahas dgn konsisten. Termasuk saat ada Gubernur, Bupati, bikin Tim2, proyek2, itu dipelototin semua. Biar lem aibon tidak berceceraan.

Berdiri tegak melawan korupsi itu harus konsisten. Bahkan jika kelompok kita yg korup, lawan. Keluarga kita yang maling, lawan, laporan. Bukan malah tersinggung, marah. Bahkan jika itu baru fase anggaran, kesalahan awal, siaga total. Tidak ada toleransi utk korupsi ini.

Hanya netizen munafik kelas dewa, yang saat korupsi dibahas eh dia marah. Harun Masiku yg dibahas misalnya, dia nyolot. Kayak dia istrinya Harun Masiku, atau anaknya Harun Masiku. Repot sekali netizen sejenis ini. Dia seolah paling Pancasila, tapi sebenarnya parasit besar di negeri ini. Lawan korupsi. []

Di semua bidang keilmuan, ilmuwan Muslim mencatatkan pengaruh besar yang jasanya terasa sampai saat ini. Al-Farghani, misalnya, berusaha mencari dan menemukan mengetahui diameter bumi, jarak ke, dan diameter dari beberapa planet lainnya. Buku Al-Farghani yang paling terkenal adalah "Kitāb fī Jawāmi' dan 'Ilm al-Nujūm", yang masih menjadi rujukan hingga saat ini.

Sumber gambar : <https://wikipedia.org/>





# Mengikis Budaya Korupsi Melalui Birokrasi Berbasis Ruang dan Manajemen Berbasis Kinerja

Oleh : Medrial Alamsyah \*)

*Argumentasi mudah penggemukan kabinet dan birokrasi adalah teori birokrasi Weber atau organisasi fungsional Henry Fayol<sup>1</sup>, bahwa agar organisasi efektif setiap fungsi harus dibagi dalam unit-unit organisasi secara berjenjang. Desain organisasi yang berumur seabad itu sejatinya hanya cocok untuk pabrik dengan sistem assembly line, setiap unit mengerjakan bagian-bagian dari satu produk kemudian disatukan (assembly) di ujung menjadi produk utuh.*

Korupsi, menurut UU Nomor 13 Tahun 1999<sup>2</sup>, adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan makna formal yang berlaku ini, suatu tindakan dikategorikan sebagai tindakan korupsi hanya bila tindakan itu memenuhi semua syarat berikut: melanggar hukum (tentu saja harus dibuktikan melalui prosedur hukum), memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Suatu tindakan, walaupun merugikan publik atau keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, tidak bisa dikatakan korupsi manakala tindakan itu sesuai peraturan yang berlaku.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai korupsi lebih luas, yakni penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi menurut KBBI juga tindakan

korupsi; demikian pula tindakan menyelewengkan dan menggelapkan uang dan hal lainnya.<sup>3</sup> Kamus Oxford memaknai korupsi lebih luas lagi, yaitu perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang menyatakan tuduhan terhadap penyuapan/penyogokan dan korupsi.<sup>4</sup> Ada pula yang mendefinisikan korupsi sebagai tindakan atau efek dari membuat seseorang berubah dari standar perilaku moral menjadi tidak bermoral.

Tulisan ini menggunakan definisi korupsi secara luas, tidak hanya secara formal seperti dirumuskan dalam UU Anti Korupsi di atas, dengan argumen: *Pertama*, dalam artikel ini korupsi dikaitkan dengan aspek manajemen publik yang menjadi media dari tindakan koruptif dalam berbagai bentuk dan akibatnya sehingga menjadi perhatian publik secara serius. *Kedua*, bila kita menggunakan makna formal hukum belaka, maka kita akan terjebak pada kotak hukum dengan segala bentuk prosedur formalnya sehingga niat dan perilaku buruk birokrasi, yang juga banyak merugikan keuangan negara dan kepentingan publik berpotensi tidak dianggap sebagai korupsi.

\*) Konsultan dan pengamat kebijakan publik, Direktur SIGI Indonesia

1) Teori birokrasi Marx Weber dan organisasi fungsional Henri Fayol ini dibahas dalam buku *The Classic of Public Administration* (*ibid*). Jenis-jenis organisasi ini juga diuraikan dengan jelas dalam Peter F Drucker with Joseph A. Maciariello, (*ibid*): 442-455

2) Lihat: *UU No. 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, [kpk.go.id](http://kpk.go.id)

3) Lihat: <http://kbbi.web.id/korupsi/html>

4) Lihat: <http://www.oxfordlearnersdictionaries.com>

Ketiga, banyak tindakan menguntungkan diri sendiri/orang lain, merugikan publik dan keuangan negara, lumrah alias sudah “membudaya” di lingkungan birokrasi; tindakan mana tidak masuk kategori korupsi karena dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku (atau setidaknya secara dokumentasi “legal”).

Perilaku dan keputusan yang merugikan (kepentingan) publik dalam birokrasi atau manajemen publik tidak hanya yang secara hukum (aturan) formal melanggar, apalagi masuk kategori korupsi menurut definisi formal, melainkan juga perilaku dan keputusan yang -- tidak saja -- tidak bisa dikatakan sebagai melanggar hukum atau termasuk dalam kategori penyelewengan dan penggelapan, tapi lebih ironis dari itu seringkali malah masuk kategori “pantas” untuk dipuji, jika bukan malah diberi berbagai “award” yang mentereng.

Dengan kerangka berpikir demikian, maka dapat dijelaskan dengan mudah mengapa ada pejabat populer dan bertabur pujian karena mempunyai “inisiatif” tiba-tiba dibekuk KPK; dan mengapa sudah puluhan tahun demikian banyak klaim hebat para petinggi kita namun kita silih berganti disalip oleh negara-negara yang dulu jauh di belakang kita (seperti Malaysia, Thailand, Vietnam) dalam berbagai kategori.

Sebagai ilustrasi, beberapa tahun lalu penulis pernah menawarkan konsep *“Productivity Improvement for Government”* ke instansi-instansi pemerintah pusat, sebuah konsep turunan dari Manajemen Berbasis Kinerja (MBK). Mendengar konsep MBK ini -- sebagaimana biasanya -- salah seorang pejabat suatu instansi mengklaim dengan bangga bahwa mereka sudah menjalankan konsep tersebut sejak lama. Lalu yang bersangkutan memperlihatkan dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

5) LAKIP adalah laporan wajib setiap tahun bagi instansi pemerintah (menurut Inpres No.7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, <http://hukumonline.com>) yang secara teknis rumit sehingga mustahil diisi secara faktual oleh aparat, terutama bagian manfaat dan dampak untuk setiap kegiatan. Laporan yang rumit itu secara praktis lebih berfungsi sebagai laporan belaka, bukan sebagai alat untuk melakukan peningkatan sebagaimana seharusnya fungsi laporan kinerja dalam manajemen.

6) Paradigma ini sering juga disebut paradigma administrasi, mengacu pada essay yang ditulis Woodrow Wilson berjudul *“The Study of Administration”* (1887) yang menjadi dasar lahirnya ilmu Administrasi Negara. Lihat: *“Classic of Public Administration”*, Jay M. Shafritz and Albert C. Hyde (*The Dorsey Press*, 1978): 10-25. Lihat juga Peter F. Drucker with Joseph A. Maciariello, *“Management”* (Harper Collins, 2009): 65-67.

7) Detil dari kritik terhadap paradigma lama ini beserta tawaran solusinya lihat David Osborne & Ted Gaebler, *“Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector”* (Penguin Books USA Inc, 1993). Satu-satunya indikator kinerja birokrasi kita yang efektif dan tidak meragukan validitasnya adalah daya serap anggaran.

Setelah melihat format dari laporan tersebut penulis langsung mengatakan: “Saya berani bertaruh, dalam membuat dokumen ini Bapak dan kawan-kawan pergi konsinyering semalam dua malam, lantas mengarang laporan ini.” Dia membenarkan pernyataan penulis dan bertanya “Kok Bapak tahu, sih?”<sup>5</sup>

Setiap unit birokrasi setingkat eselon II ke atas harus membuat LAKIP untuk dikirim ke atasan dan kementerian keuangan. Satu LAKIP setidaknya menghabiskan anggaran 50-100 juta rupiah dan jumlah eselon II secara nasional (sekitar 17.000), maka untuk LAKIP--yang lebih banyak berfungsi hanya untuk membanggakan diri -- menghabiskan biaya sekitar Rp 1 triliun per tahun secara nasional.

Bila kita dalami lebih jauh kita akan menemukan banyak kegiatan tak berguna sehingga birokrasi kita temukan dalam situasi “mengerjakan yang tidak perlu dan mengabaikan yang penting”. Bila anggaran LAKIP dan kegiatan-kegiatan tidak penting itu kita pakai untuk membangun sekolah dan jembatan, sudah berapa banyak sekolah dan jembatan mampu kita bangun?

Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa hal demikian bisa terjadi? Menurut penulis -- dalam perspektif teori -- karena para penyelenggara negara belum bisa keluar dari doktrin lama paradigma administrasi negara yang sudah berumur satu abad lebih.

Doktrin utama dari paradigma lama itu adalah bahwa administrasi (negara) berbeda dengan manajemen.<sup>6</sup> Turunannya yang melumpuhkan birokrasi digambarkan diantaranya dengan ciri-ciri: legalistik, organisasi struktural-fungsional, keseragaman (*one size fit all*), hasil kerjanya tidak bisa (segera) diukur, berorientasi input (walaupun mendeklarasikan sudah berorientasi *outcome*), dsb.<sup>7</sup>

Di Indonesia pendekatan dan prinsip legalistik yang dijadikan acuan para

penyelenggara negara dan pemerintah sekaligus sudah menjadi label birokrasi, lebih merupakan tempat perlindungan kaum birokrat dan politisi dari praktik-praktik buruk serta ketidakmampuan mereka. Mereka sering menjadikan “aturan” sebagai sebab mereka melakukan sesuatu (yang salah/tidak tepat) atau tidak melakukan (yang benar/tepat), padahal “aturan” itu adalah buatan mereka sendiri. Karena itu penulis lebih suka menggunakan istilah *production (bureaucracy) oriented* ketimbang *legalistik*.<sup>8</sup>

*Production oriented* adalah konsep mutu yang dipakai industri Barat sampai era tahun 1960an. Prinsip dasar dari konsep ini adalah bahwa mutu ditentukan oleh produsen, bukan oleh pelanggan (*customer*). Menurut pandangan ini produsenlah yang memahami apa yang dibutuhkan pelanggan karena mereka yang menguasai teknologinya. Contoh klasiknya adalah mobil Ford: dulu, saat mereka mendominasi pangsa pasar dunia, mobil identik dengan besar, boros dan berwarna hitam. Pada saat itu pelanggan tidak punya pilihan atau tidak menyadari bahwa sejatinya mereka bisa dibuatkan mobil kecil, irit dan dengan pilihan warna sesuai selera mereka, sampai industri otomotif Jepang masuk pasar.

Konon Ford sudah demikian nyamannya dengan model mobil produksinya, sampai-sampai ketika direksinya mencemaskan penetrasi pasar mobil buatan Jepang ke Amerika, Ford dengan angkuhnya mengatakan: “Orang juga bisa memilih berbagai warna mobil kita, asal hitam.”

Para politisi dan birokrat kita mungkin tidak seangkuh Ford, tetapi hakekatnya sama: mereka sudah lama nyaman dengan paradigma lama itu. Berbeda dengan Ford yang bisa digilas dalam sekejap oleh Toyota, birokrasi tetap menikmati kenyamanan karena mereka dilindungi oleh konstitusi untuk tetap berkuasa (klaim “bombastis” bahwa “*bureaucracy is the engine of the state*”).

Ketika Ford bisa serta merta dihukum pasar, birokrasi -- sebaliknya -- bisa mendapatkan

“penghargaan” dalam kebrokbrokan manajemen mereka. Hal itu terlihat jelas dalam isu reformasi birokrasi, pemerintah menambahkan “reformasi birokrasi” pada nomenklatur Kementerian Pendayaan Aparatur Negara, mengeluarkan berbagai kebijakan dan mengklaim sudah melaksanakan reformasi birokrasi, tetapi kenyataannya tetap berada dalam paradigma lama administrasi: *legalistik, one size fit all*, dll. dan pada galibnya tetap mendahulukan kepentingan mereka (*bureau-cracy oriented*) ketimbang kepentingan publik (*customer*) yang merupakan hal paling esensial dalam reformasi birokrasi. Bahkan mereka meraup banyak keuntungan pribadi dan berlindung di balik kata “*legal-formal*”.

Secara teknis organisasi dan manajemen, hulu semua itu adalah organisasi kabinet yang gemuk. Penyebabnya adalah kepentingan politik produsen, yaitu Presiden dan partai pendukungnya. Untuk mengamankan kepentingan mereka, kabinet yang sejatinya bisa dibuat dalam jumlah 15-17 saja digandakan menjadi 34 plus 4 orang pejabat setingkat menteri sehingga berjumlah 38 orang, diluar wakil menteri yang turut meramaikan percaturan birokrasi. Masing-masing memimpin birokrasi kementerian atau Badan/institusi seperti Kepala Staf Kepresidenan dan Sekretaris Kabinet.

Argumentasi mudah penggemukan kabinet dan birokrasi adalah teori birokrasi Weber atau organisasi fungsional Henry Fayol<sup>9</sup>, bahwa agar organisasi efektif setiap fungsi harus dibagi dalam unit-unit organisasi secara berjenjang. Disain organisasi yang berumur seabad itu sejatinya hanya cocok untuk pabrik dengan sistem *assembly line*, setiap unit mengerjakan bagian-bagian dari satu produk kemudian disatukan (*assembly*) di ujung menjadi produk utuh.

Dengan disain organisasi seperti itu Indonesia seakan dibagi dalam sektor-sektor dan masing-masing sektor dibagi lagi dalam sub-sub sektor, manakala masing-masing unit dan sub unit itu bekerja, diasumsikan akan terajut sebuah bentuk tertentu dari Indonesia. Jelas ini sangat absurd.

8) Lihat Medrial Alamsyah, “Bureaucracy Oriented vs Public Focus”, (<http://tilik.id, 09/04/2020/bureaucracy-oriented-vs-public-focus/>)

9) Teori birokrasi Marx Weber dan organisasi fungsional Henri Fayol ini dibahas dalam buku *The Classic of Public Administration (ibid)*. Jenis-jenis organisasi ini juga diuraikan dengan jelas dalam *Peter F Drucker with Joseph A. Maciariello, (ibid): 442-455*

Absurditas itu meningkat ketika pada tingkatan kementerian, organisasi disusun kembali berorientasi pada kepentingan produsen, yakni birokrat. Lumrah terjadi di setiap penyusunan struktur birokrasi pemerintah, pertanyaannya bukan pada apa yang dibutuhkan rakyat dalam sektor tersebut, melainkan berapa jumlah pejabat pada setiap eselon kemudian jumlah struktur disesuaikan agar semua kebagian atau setidaknya sesedikit mungkin yang -- meminjam istilah mereka -- *non job*.

Eksistensi institusi yang tidak perlu atau melebihi kebutuhan (*Parkinson Law*)<sup>10</sup> akan melahirkan masalah koordinasi dan anggaran yang tidak perlu pula (inefisiensi). Inefisiensi itu bukan saja diakibatkan oleh biaya rutin pejabatnya atau masalah koordinasi dan inefektivitas yang ditimbulkannya, tetapi juga karena cabang-cabang birokrasi yang tidak perlu itu pasti melahirkan program yang diada-adakan pula.

Sebab, dalam birokrasi setiap cabang birokrasi yang eksis (tentu saja punya legalitas) menjaga eksistensi mereka dengan merebut anggaran sebanyak-banyaknya. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa struktur kabinet yang gemuk beserta akibatnya itu menular -- bahkan ditularkan dengan berbagai alasan dan cara oleh pejabat pusat -- ke daerah.

Obesitas dan irasionalitas birokrasi di atas menimbulkan kesulitan implementasi aspek paling esensial dalam manajemen: kontrol.

10) Parkinson's law diartikulasikan oleh Cyril Northcote Parkinson dalam essay di *The Economist* (1955) mengatakan "work expands so as to fill the time available for its completion". Juga menjelaskan kecenderungan birokrat menggandakan jumlah bawahan (unit, pen) sehingga jumlah pegawai tumbuh 5-7% per tahun. Lihat: [https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parkinson's\\_law](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parkinson's_law)

11) *New Public Management (NPM)* lahir sebagai kritik terhadap kegagalan paradigma administrasi. Para proponennya diantaranya David Osborne, Barzelay, June Pallet (pengagas performance budgeting bagi pemerintah) bergabung dalam IPMN (*International Public Management Network*) beranggotakan akademisi dan praktisi (penulis juga menjadi anggotanya) menerbitkan jurnal *Public Management Review*. IPMN mengadakan konferensi setiap dua tahun dan penulis pernah mengikuti beberapa kali. Perkembangan berikutnya *New Public Management* disebut juga *Public Management* saja seiring dengan pandangan bahwa manajemen publik itu sangat dekat dengan manajemen swasta. Lihat juga Michael Barzelay, "The New Public Management, Improving Research and Policy Dialogue" (*The Regents of the University of California*, 2001)

12) Konsep kesatuan ruang ini dibahas dengan apik oleh Kenichi Ohmae, "The Next Global Stage, Challenges and opportunity in Our Borderless World" (*Wharton School Publishing*, 2005). Dia mengaggas konsep region state untuk kesatuan ekonomi dalam suatu negara untuk menghindari reaksi emosional terhadap konsep nation state. Konsep itu merupakan kritik terhadap ekonom yang menjadikan wilayah administratif negara bangsa sebagai unit analisa mereka, yang menurut Ohmae tidak menggambarkan hal sebenarnya.

13) Salah satu contohnya adalah Tempat Lelang Ikan (TPI) yang terbengkalai karena dibangun terlambat setelah bantuan kapal penangkap ikan (untuk meningkatkan produksi) sudah rusak, atau karena jalan ke TPI terlambat dibangun oleh Kementerian/Dinas PUPR. Contoh lain adalah bangunan sekolah yang tidak bisa dipakai dan terlanjur rusak karena pemda tidak menganggarkan pembuatan jalan pada saat dibutuhkan.

Esensi kontrol adalah ukuran, baik dalam bentuk target maupun standar. Sistem target dan standar (kinerja) itu *inherent* dalam manajemen (swasta), sebaliknya -- dalam pandangan paradigma administrasi -- dikatakan sulit (jika bukan mustahil). Sementara reformasi birokrasi dalam berbagai konsepnya seperti *reinventing government*, (*New*) *Public Management*<sup>11</sup> dengan tegas mengatakan bahwa birokrasi harus meniru, atau sangat dekat dengan, (manajemen) swasta; termasuk di dalamnya konsep manajemen berbasis kinerja dengan berbagai bentuknya.

Pada umumnya kinerja (*outcome*) instansi pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan agregat dari berbagai sektor dalam kesatuan ruang tertentu.<sup>12</sup> Ruang tersebut tidak melulu berhimpitan dengan wilayah administratif, tetapi -- seringkali -- irisan dari beberapa wilayah administratif. Kondisi ini jelas tidak kompatibel dengan struktur birokrasi yang bersifat sektoral dan berbasis wilayah administratif. Masalah utamanya dalam konteks ini adalah koordinasi antar sektor dalam satu kesatuan ruang dimana -- agar efektif -- ketika dituntut semua sektor terkait bekerja bersamaan ada saja sektor yang tidak menganggarkan sektornya di ruang tsb.

Akibatnya pembangunan dalam satu ruang tidak pernah tuntas dan seringkali mubazir karena ketika sektor yang tidak menganggarkan sebelumnya dan melaksanakan proyeknya dua tiga tahun kemudian, pekerjaan sektor terdahulu sudah rusak.<sup>13</sup> Masalah koordinasi tersebut

secara konsepsional di tingkat pusat diatasi dengan cara membentuk kementerian koordinator, tetapi alih-alih mengatasi masalah koordinasi antar sektor, kementerian ini malah kesulitan mengkoordinasikan unit-unit di internalnya sendiri.

Uraian di atas menjelaskan kepada kita mengapa berbagai kebijakan terkait manajemen berbasis kinerja seperti anggaran berbasis kinerja, renumerasi, LAKIP, ds sebagainya, pada kenyataannya hanya menjadi perubahan bentuk dari paradigma lama administrasi. Hal-hal yang dikritik oleh konsep reformasi birokrasi, *reinventing government* dan (*New*) *Public Management* seperti pendekatan legalistik, keseragaman (*one size fit all*), membiayai kegagalan, dll. tetap menjadi keseharian birokrasi.<sup>14</sup>

Apa solusi yang mungkin dilakukan pemerintah? Idealnya pemerintah melakukan apa yang disebut *reengineering* birokrasi<sup>15</sup>. Artinya pemerintah mendisain ulang secara radikal keseluruhan kementerian (kabinet) beserta proses bisnisnya sehingga jadi ramping. Mantan Wapres Budiono pada suatu kesempatan pernah mengatakan birokrasi kita bisa dipotong sampai 50 persen. Angka ini relatif aman karena, berdasarkan beberapa studi dan *professional judgement*<sup>16</sup> penulis, mungkin jauh lebih besar. Akan tetapi ide ini mustahil dilakukan karena bisa menimbulkan gejolak politik yang belum tentu bisa dikendalikan seperti dialami Presiden Abdulrahman Wahid saat membubarkan Kemensos dan Kemenpen.

Jalan tengah yang relatif realistik adalah dengan mengubah struktur birokrasi kementerian dan dinas-dinas di daerah menjadi berbasis ruang. Artinya, terlebih dahulu Indonesia dibagi dalam beberapa wilayah atau beberapa kesatuan ruang, subruang dan sub-sub ruang, dst. Nomenklatur direktorat jenderal kementerian kemudian *bukan* lagi berbasis subsektor melainkan wilayah/kesatuan ruang, direktorat berbasis sub-wilayah/sub-ruang, baru kemudian pada eselon III nomenklaturnya berbasis subsektor sesuai dengan potensi di sub-ruang/wilayah tersebut. Demikian juga bidang-bidang di struktur dinas di daerah, dibagi berdasarkan sub-ruang di wilayahnya dan berbasis subsektor pada unit-unit di bawahnya.

Dalam model struktur berbasis ruang ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di pusat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di daerah harus diperkuat dengan menggabungkan Direktorat Jenderal/Dinas Tata Ruang ke Bappenas/Bappeda karena mereka yang berwenang membagi ruang, menetapkan target-target setiap ruang dan sub-ruang, mengkoordinasikan perencanaan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di setiap ruang/sub ruang. Dengan demikian organisasi mereka juga harus dipecah berdasarkan ruang dan sub ruang pula seperti kementerian/dinas teknis.

Dengan struktur demikian menetapkan target-target hasil (*outcome*) yang berdampak positif pada masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang<sup>17</sup>, dan dirumuskan

14) Contoh klasik yang masih terjadi sampai saat ini adalah program pengentasan kemiskinan, baik dari berbagai kementerian maupun daerah, yang biasanya seragam (bantuan langsung tunai/BLT, umpamanya). Orang miskin karena tua renta dan lumpuh total memang butuh BLT, tetapi yang miskin karena mengangur diberi BLT justru “melumpuhkan” mereka. Pada sisi lain kemiskinan adalah bentuk kegagalan daerah, tetapi program ini justru memberikan bantuan lebih banyak pada daerah yang penduduk miskinnya lebih banyak (membiayai kegagalan). Kedua contoh tsb. menjadi topik bahasan buku “*Reinventing Government*” (*ibid*).

15) Untuk memahami konsep ini lihat: Michael Hammer & James Champhy, “*Reengineering The Corporation, A Manifesto for Business Revolution*” (Collins Business Essential, 2001).

16) Penulis pernah menghitung penggunaan waktu efektif pegawai di Inspektorat Wilayah DKI tahun 1998 (tidak dipublikasi) hasilnya 25% dan di Pemda Tapanuli Selatan dengan hasil 20,55%, Lihat: Medrial Alamsyah, “*Reformasi Birokrasi: Mengakhiri Inefisiensi dengan Rekayasa Ulang*” (*Media Indonesia*, 5 September 2006). Sebagai konsultan productivity penulis dkk sering membuat dugaan profesional sebelum perhitungan dilakukan (setelah berkeliling di kantor/pabrik obyek studi) dan hasilnya meleset sekitar 5%. Berdasarkan kunjungan (profesional judgement) ke banyak kantor pemerintah itu, efektivitas waktu pegawai pemerintah menurut penulis sekitar 30%.

17) Bagaimana target-target (goals) strategis terukur dioperasionalkan dan diintegrasikan pada target-target individual pegawai dapat menggunakan konsep Balanced Scorecard (BSC) lihat: Rober S. Kaplan & David P. Norton, “*Translating Strategi Into Action, Balanced Scorecard*” (*Harvard Business Press*, 1996). Sistem renumerasi yang diberlakukan untuk ASN sekarang ini secara konsepsional mirip dengan BSC, akan tetapi target dibuat lebih berfungsi sebagai alat menaikkan “take home pay” pegawai ketimbang mendongkrak kinerja.

secara *SMART* (*Specific, Measurable, Agreed upon, Realistic, and Trackable*), lebih mudah; dan alasan bahwa ukuran keberhasilan program pemerintah itu sulit -- seperti doktrin paradigma administrasi -- jadi sirna. Sebab, hubungan antar sektor dalam satu kesatuan ruang lebih nyata, tidak seperti dalam wilayah administratif yang menggiring mereka mengabaikan ruang lain karena faktor administrasi. Pengendalian juga bisa lebih efektif dan terjangkau karena pendataan -- dengan bantuan teknologi saat ini -- memungkinkan secara biaya dan waktu mengandalkan sensus ketimbang teknik sampling (survey).<sup>18</sup>

Karena semua sektor memiliki target *outcome* yang sama di setiap ruang yang relatif lebih terkendali (tidak seperti sekarang berbasis program dan kegiatan dalam ruang yang tidak terdefinisi secara jelas), pejabat birokrasi bisa bekerja fokus pada satu kesatuan ruang wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Tidak seperti sekarang fokus pada sektor atau sub sektor dalam wilayah administratif yang luas. Ego sektoral juga bisa dieliminasi karena koordinasi

antarkementerian/dinas dan unit-unit terkait menjadi tuntutan semua pejabat birokrasi.

Lebih jauh, sistem remunerasi bisa berfungsi mendongkrak kinerja publik, tidak seperti selama ini hanya sebagai ajang menambah pendapatan pegawai. Organisasi dan sistem manajemen kinerja ini juga dapat mengeliminasi budaya inefisiensi seperti membuat program dan kegiatan dengan rumusan tujuan normatif, kegiatan yang sah menurut aturan tetapi sejatinya hanya dimaksudkan untuk meraup keuntungan pegawai, bukan manfaat untuk publik, menjadi lebih sulit. Sebab, semua pekerjaan dalam sistem ini mesti tersambung secara konkret pada *outcome*, punya jangka waktu yang jelas, dan bisa ditelusuri. Ketika organisasi dan sistem menggiring perilaku SMART secara konsisten, dalam jangka panjang upaya mengikis budaya korupsi menjadi lebih nyata.

Ketika secara teori, konsep dan teknologi sudah sangat mungkin, persoalan berpulang pada *political will* para penyelenggara negara belaka. []

18) Salah satu metode pendataan praktis, murah dan akurat sudah dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University. Metode ini menggunakan GIS (Geographic Information System) dan dapat dilakukan dengan telepon genggam oleh anak-anak karang taruna yang dilatih. Menggunakan metode partisipatif dan Artificial Intelligent (AI) tsb. di beberapa desa uji coba, mereka menemukan penyimpangan data formal di atas 50%. Lihat: Sofyan Sjaf, dkk, "Data Desa Presisi" (IPB Press, 2020).



Sejalan dengan perkembangan peradaban Islam, para ilmuwan Muslim memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu Astronomi. Beberapa penemuan dalam Astronomi mencatatkan nama-nama astronom Muslim dalam sejarah keilmuan, seperti antara lain, Al-Battani, yang bukunya *Kitāb az-Zīj*, menjadi referensi bagi para astronom dunia, termasuk Copernicus.

Sumber gambar : <https://wikipedia.org/>



## Pancasila dan *Social Market Economy*

Oleh : Faisal Afiff \*)

*Ekonomi pasar sosial bertujuan menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip sosial. Ordo-liberalism yakin bahwa hal ini penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial disamping kekuatan pasar yang dikendalikan negara.*

Dalam artikel terdahulu penulis mengangkat beberapa tema kepemimpinan yang dapat mengukuhkan postur kepemimpinan yang solid dan efektif, yang terbentuk oleh daya energi, kreatifitas dan inovasi, kepemimpinan yang berbekal falsafah dan integritas, sehingga pemimpin memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam konteks tulisan ini, digambarkan sepiantas tentang bagaimana kisah keberhasilan Jerman dalam mengelola perekonomiannya sehingga negara tersebut berhasil mencapai tingkat kemakmuran yang signifikan, berkat kepemimpinan yang konsisten, penuh integritas, pemanfaatan daya energi yang optimal berikut adanya terobosan yang kreatif dan inovatif. Setiap kebijakan ekonomi yang dirancang pemimpin negara tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Kepemimpinan seperti ini sangat diperlukan dalam era Indonesia dewasa ini, perdebatan sesengit apapun di Indonesia - tentang apa saja - ternyata sering terhenti di tingkat wacana, diakibatkan pemimpin Indonesia sering tersandera oleh kepentingan-kepentingan pragmatis, yang memunculkan kesan kepemimpinan yang lamban, tidak tegas dan kompromistik. Indonesia memiliki landasan falsafah dan moral yang luhur, konstitusi dan undang-undang yang memihak pada kesejahteraan, namun semuanya seolah menjadi "tumpul" karena belum lahir kualitas kepemimpinan yang paripurna, apalagi menghadapi medan tantangan ke depan yang semakin berat, sebagaimana tergambar dalam

refleksi arah ekonomi Indonesia berikut ini, dengan memetik pengalaman dari beberapa negara maju, seperti halnya Jerman.

Berkat dilaksanakannya Konsep Social Market Economy (Soziale Marktwirtschaft-Ekonomi Pasar Sosial), Republik Federasi Jerman dewasa ini boleh dikatakan sebagai salah satu negara termakmur di dunia. Sistem ekonomi ini telah befungsi dan teruji dengan sangat baik selama beberapa dekade. Hal yang menarik dalam konsep ini adalah merupakan kombinasi sektor material komersial berbasis pasar dan sektor sosial non komersial berbasis kemanusiaan.

Ekonomi pasar sosial bertujuan menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip sosial. Ordo-liberalism yakin bahwa hal ini penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial disamping kekuatan pasar yang dikendalikan negara. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh ekonomi pasar sosial adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai ideologi sehingga berbagai kekuatan didalam masyarakat dapat terfokus pada tugas bersama menjamin kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali perekonomian. Inilah sebabnya kita dapat melihat bahwa ekonomi pasar sosial merupakan kompromi pada masa-masa awal pemerintahan Republik Federasi Jerman.

Undang-undang mengenai Bank Federal Jerman (German Bundesbank) dan undang-undang larangan terhadap hambatan kompetisi adalah dua diantara undang-undang penting yang

\*) Almarhum adalah guru besar Ilmu Manajemen di FEB UNPAD

dibuat pada saat itu. Tahun 1950 dapat dikatakan sebagai tahun pencapaian sukses dari sistem ekonomi pasar sosial, dimana salah satu indikatornya adalah tersedianya lapangan kerja yang memadai.

Pada tahun 1970-an pemerintah Jerman berupaya untuk memainkan peran yang lebih penting dalam perekonomian. Selama tahun 1980 Kanselir Helmut Kohl mencoba mengurangi peran negara yang sebagian besar telah berhasil dengan baik, namun reunifikasi Jerman membuat pemerintah Jerman kembali memperkuat peran negara dalam menata ekonomi mereka. Karenanya, kontradiksi antara istilah "sosial" dan "pasar" tetap menjadi faktor penting dalam dinamika perdebatan di negara tersebut.

Mengacu pada dualisme filosofis yang dianutnya, perekonomian Jerman sesungguhnya memiliki sifat konservatif sekaligus dinamis. Dikatakan konservatif dalam arti sistem tersebut dirancang berdasarkan tradisi Jerman yang memberikan porsi bagi peran negara dalam ekonomi dan sikap ke hati-hatian dalam menangani investasi dan pengambilan resiko. Dikatakan dinamis dalam arti sistem tersebut mengarah pada pertumbuhan, meskipun hal tersebut dinilai lambat dan kurang spektakuler. Inilah realita model kombinasi antara keunggulan suatu sistem pasar dengan keunggulan dari sistem kesejahteraan sosial.

Pada tahun 1982, diskusi tentang bagaimana ekonomi pasar sosial seharusnya berubah, dan hal ini mencakup tiga aspek; pada sisi kelompok Keynesian, mereka mempertahankan "Globalsteuerung" dan ekonomi pasar sosial; pada sisi kelompok Milton Friedman, mereka menyatakan kegagalan dari peran negara dan menginginkan pengurangan dari "Globalsteuerung" serta ekonomi pasar sosial bersama-sama dengan penguatan kekuatan pasar; sedangkan pada posisi yang ketiga, kelompok kecil yang berfikir bahwa pasar telah gagal dan oleh karenanya mereka memilih perluasan sektor negara berikut intervensinya di sektor ekonomi.

Hasil perpaduan diskusi dari kelompok-kelompok tersebut dapat dijelaskan sebagai kombinasi antara Keynes dan Friedman. Pada tahun-tahun berikutnya perusahaan milik negara seperti Pos dan Telkom Jerman diswastanisasi dan kadar sosialnya pun diturunkan lebih ramping. Kemajuan ekonomi

pada periode tersebut dapat dilihat sebagai hasil dari kombinasi kebijakan itu namun juga disebabkan oleh situasi positif ekonomi dunia serta keberhasilan dari integrasi Eropa, suatu masa yang diakhiri dengan reunifikasi Jerman.

Reunifikasi Jerman tercatat sebagai perubahan besar yang menarik bagi proses pembelajaran dan analisis dinamika sejarah pembangunan perekonomian Jerman, khususnya tentang bagaimana pemerintah Jerman mengambil kebijakan ekonomi dan sosial, tidak hanya berfokus pada reunifikasi tahun 1990 sebagai momentum yang penting, namun terlebih pada penyatuan ekonomi dan keuangan pada waktu sebelumnya. Hal ini terjadi pada situasi pertumbuhan ekonomi dan angka hutang negara yang rendah, yang pada awalnya diwarnai oleh euphoria unifikasi secara umum dan terbukanya pasar baru di Jerman bagian Timur dan Eropa.

Pertanyaan besar yang muncul: Apakah Model Ekonomi Pasar Sosial ala Jerman dapat diadopsi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi tanah air untuk keberhasilan perekonomian di Indonesia?

Secara ideologis-konstitusional sebetulnya Indonesia memiliki undang-undang yang berpihak pada kemakmuran rakyat, dimana negara lebih dituntut peranannya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketiga prinsip tersebut tersirat betapa sangat besarnya peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal ini, dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan meliputi antara lain lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi; (2) mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yang layak; dan (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Pertanyaan berikut, sejauh manakah ekonomi kerakyatan sebagai amanat konstitusi telah dilaksanakan di Indonesia. Bagaimana jalan keluar bagi perekonomian Indonesia agar tidak didominasi oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini?

Kita coba kembali berkaca pada keberhasilan sistem ekonomi pasar sosial yang diterapkan di Jerman. Pada awalnya, konsep "pasar" menjadi penting setelah pengalaman buruk yang dialami semasa rezim Nazi, sehingga masyarakat ingin agar ekonomi dibebaskan dari intervensi dan dominasi negara. Pada awal penerapan sistem ini di Jerman Barat, peran negara adalah memberikan perlindungan terhadap suasana kompetisi dari tendensi monopolistik dan oligopolistik, termasuk yang mungkin akan muncul dari mekanisme kompetisi itu sendiri. Sementara itu, konsep "sosial" mendapat penekanan penting karena Jerman yang pada saat itu bernama Jerman Barat, menginginkan suatu sistem perekonomian yang mampu mendorong munculnya kemakmuran, akan tetapi juga dapat memberikan perlindungan terhadap kalangan buruh dan kelompok masyarakat lain yang mungkin tak mampu mengikuti tuntutan kompetisi yang berat didalam ekonomi pasar. Disamping itu situasi ekonomi sosial masyarakat Jerman yang hancur pasca Perang Dunia II memberikan andil terhadap pilihan konsep tersebut. Konsep "sosial" dipilih daripada konsep "sosialis" untuk membedakan sistem ini dari suatu sistem dimana negara memiliki hak untuk menentukan sistem perekonomian atau melakukan intervensi terhadapnya.

Ada suatu konsep lain yang memiliki keterkaitan erat dengan konsep ekonomi pasar sosial, suatu konsep di dalam tradisi pemikiran Jerman, yaitu "Ordnung," yang dapat diartikan sebagai "tatanan". Dalam pemahaman ini, ekonomi, masyarakat, dan politik, menjadi suatu kesatuan struktur pemerintahan, namun bukan dalam bentuk diktatorial. Dalam pemahaman ini, para pemimpin pemerintahan di Indonesia dituntut memiliki kemauan yang kuat untuk mampu memadukan sistem ekonomi, politik, hukum dan sosio-budaya kedalam kesatuan struktur yang kuat dan dinamis, sehingga dalam mengambil ide-ide pemikiran

dari luar tidak diiplak mentah-mentah saja, namun disaring oleh jiwa nasionalisme yang kuat, sehingga gagasan yang hidup di tanah air memiliki ciri-ciri khas ke-Indonesiaan.

Kita lihat, para pengagas konsep ekonomi pasar sosial melihat konsep tersebut dalam suatu sistem tatanan yang utuh, tidak seperti sistem ekonomi "campuran" yang seolah-olah berjalan masing-masing tanpa saling menyapa. Disamping itu, mereka juga berpijak pada konsep "Ordo-Liberalismus," yang berarti konsep tersebut harus bebas memilih tatanannya, dan bukan suatu tatanan yang bersifat komando. Pada pasca perang Dunia II muncul berbagai argumen dan perdebatan mengenai bagaimana membangun kembali perekonomian Jerman yang terpuruk akibat perang. Kelompok politisi sosialis berpendapat tentang pentingnya sistem distribusi terpusat, perluasan kendali negara, serta nasionalisasi sektor perbankan dan industri lainnya. Penentang utama dari ide ini adalah Ludwig Erhard, seorang ekonom liberal yang menjabat sebagai kepala kantor urusan ekonomi di Bizon, yang kemudian menjadi menteri perekonomian dan seterusnya menjadi Kanselir Republik Federasi Jerman (1963-1966), menggantikan Konrad Adenauer. Ludwig Erhard tercatat dalam sejarah sebagai pencetus konsep ekonomi pasar sosial dan menerapkannya dalam sistem perekonomian Jerman Barat.

Pada awalnya, langkah tersebut bertujuan memungkinkan berbagai kekuatan bermain secara bebas di dalam pasar dengan meningkatkan kesempatan konsumen, memotivasi produsen untuk melakukan inovasi dan kemajuan teknik, dan pembagian pendapatan serta keuntungan berdasarkan pencapaian masing-masing individu. Diatas semua hal itu, terdapat pembatasan akumulasi yang berlebihan dari kekuatan pasar. Tugas negara adalah menciptakan mekanisme bagi berfungsinya kompetisi, disamping mempromosikan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk memiliki tanggung jawab dan kemandirian.

Konsepsi teori ekonomi pasar sosial mengacu pada pemikiran liberal klasik dengan sedikit perubahan. Kita dapat menyebutnya sebagai variasi pemikiran neo-liberal Jerman, namun biasanya disebut dengan Ordo-Liberalisme. Pemikiran ini dibangun sejak tahun 1940-an, terutama melalui aliran pemikiran kelompok Freiburg. Dua pemikir kelompok ini adalah

Walter Eucken dan Andreas Muller-Armack, dan memberikan nama dengan sebutan Ekonomi Pasar Sosial. Dalam pemikiran ini aspek yang diperhatikan bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga persoalan kebebasan dan keadilan sosial. Menurut Muller-Armack tanggung-jawab memerlukan kebebasan sebagai kondisi yang penting bagi seseorang untuk memilih tanggung-jawab diantara pilihan yang berbeda.

Konsep ekonomi pasar liberal memiliki tiga prinsip utama, yakni, pertama, Prinsip Individualitas: yang bertujuan pada ideal liberal bagi kebebasan individu. Kedua, Prinsip Solidaritas: yang mengacu pada ide bahwa setiap individu terikat dengan masyarakat yang saling tergantung sama lain dengan tujuan menghapus ketidakadilan. Ketiga, Prinsip Subsidiaritas: yang berarti sebuah tugas institusional bertujuan menajamkan hubungan antara individualitas dan solidaritas. Aturan tersebut harus memberikan jaminan hak individu dan menempatkannya sebagai prioritas utama, yang berarti apa yang mampu dilakukan oleh individu harus dilakukan oleh individu dan bukan oleh negara.

Hak-hak kebebasan dari setiap individu dan kebebasan ekonomi dapat dilihat sebagai kerangka dimana keadilan sosial dan solidaritas diterapkan. Ekonomi pasar sosial bertujuan menyeimbangkan prinsip-prinsip pasar dan prinsip-prinsip sosial. Ordo-liberalism percaya bahwa sistem ini penting untuk menciptakan mekanisme perlindungan sosial disamping kekuatan pasar, yang dikendalikan oleh negara. Tujuan lain yang ingin dicapai oleh ekonomi pasar sosial adalah menciptakan dan membangun tatanan ekonomi yang dapat diterima oleh berbagai ideologi sehingga berbagai kekuatan didalam masyarakat dapat terpusat pada tugas bersama untuk menjamin kondisi kehidupan dasar dan membangun kembali perekonomian. Inilah sebabnya kita dapat melihat bahwa ekonomi pasar sosial merupakan kompromi pada masa-masa awal pemerintahan Republik Federasi Jerman.

Semakin terlihat bahwa keberhasilan Jerman dengan ekonomi pasar sosialnya adalah adanya suatu keinginan moral yang kuat dari penyelenggara negara untuk mewujudkan sistem tersebut kedalam tatanan masyarakat, dengan melakukan langkah-langkah sistematis dan mampu mewujudkannya dengan konsekuensi. Di Indonesia sendiri pernah terjadi polemik dan

diskusi tentang arah ekonomi Indonesia ke depan, diantaranya dengan mencari landasan sistem perekonomian yang sesuai untuk Indonesia. Mengingat Pancasila sudah disepakati sebagai falsafah dasar yang menjadi pandangan dan pegangan hidup bangsa, maka Pancasila telah menjadi moral kehidupan bangsa, menjadi Ideologi yang menjawab permasalahan bangsa di segala bidang, baik di bidang sosial budaya, sosial politik, hukum dan tentu saja di bidang sosial ekonomi. Moralitas Pancasila inilah yang seyogyanya menjadi landasan berpijak bagi tumbuh-kembangnya sistem perekonomian Indonesia. Jika moralitas teori ekonomi Adam Smith berbasis pada prinsip kebebasan (liberalisme) dan moralitas teori ekonomi Karl Marx berbasis pada prinsip mayoritas (kaum proletar), maka moralitas Ekonomi Pancasila harusnya dinafasi oleh prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Meskipun Ilmu Ekonomi atau teori Ekonomi Pancasila belum terwujud atau katakanlah sedang berproses, tetapi ilmuwan ekonomi Indonesia wajib percaya bahwa hal itu ada atau paling tidak, diyakini akan ada. Dan justru pengembangannya yang sungguh-sungguh akan bergantung pada keyakinan para pakar ekonomi bersama penyelenggara negara, dengan melakukan penelitian dan kajian serius bagi lahirnya teori ekonomi Pancasila yang utuh. Walaupun belakangan ini orang lebih menyukai dengan menggunakan istilah ekonomi kerakyatan, sebagai ketidakberdayaan atas kepungan dua faham dunia, yakni kapitalis-liberal dan sosialis-komunis, sehingga yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila dalam prakteknya adalah "ekonomi campuran", yang tidak berakar dalam filosofinya.

Kita bisa menarik pelajaran dari keberhasilan Jerman dalam mengimplementasikan moralitas teori ekonominya ke dalam praktik secara dinamis dan konsekuensi, maka dengan moralitas Pancasila, Indonesia perlu belajar dari Jerman, yakni bagaimana menata dan mengimplementasikan teori ekonominya ke dalam tatanan praktis, sehingga kepentingan sosial masyarakat lebih dilindungi dalam menggapai kesejahteraan sosial.

Pertanyaan selanjutnya, sejauh manakah ekonomi kerakyatan atau Pancasila sebagai amanat konstitusi telah dilaksanakan di Indonesia? Bagaimana jalan keluar bagi perekonomian Indonesia agar tidak didominasi

oleh pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal sebagaimana banyak diperbincangkan belakangan ini? Persoalannya, jika Jerman memiliki fakta empiris atas keberhasilan konsep ekonominya, fakta empiris tersebut sulit ditemukan dalam penerapan sistem ekonomi di Indonesia selama ini, karena moralitas yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dalam membangun tatanan negara dijalankan dengan setengah hati - untuk tidak mengatakan diabaikan - khususnya dalam membangun tatanan di bidang ekonomi. Dalam sistem perekonomian di Indonesia, boleh dikatakan bahwa sistem bergulir lebih karena perjalanan sejarah secara "alami", sejak pengambil-alihan usaha swasta Belanda oleh negara, dan seterusnya sektor swasta yang kuat kemudian diambil alih lagi oleh negara, kelihatannya bukan karena mau menerapkan UUD 1945 pasal 33 semata, tetapi karena memang sektor swasta nasional belum ada. Birokrat pemerintahan baik dari kalangan sipil maupun ABRI yang notabene nonprofesional dan kurang berbekal pengalaman ditugaskan untuk mengelola sektor perkebunan, manufaktur, perbankan dan perdagangan. Oleh karena itu, lumrah jika kepemimpinan ekonomi ini mengarah ke etatisme, khususnya pada periode 1959 - 1965. Baru setelah masuk ke periode orde baru - dengan diberlakukannya UU PMA dan PMDN periode 1967-1968, struktur perekonomian Indonesia mulai berubah secara radikal. Periode 1973 -1980 merupakan periode pertumbuhan sektor swasta dan negara yang luar biasa. Kenaikan harga ekspor minyak bumi yang amat tinggi, yang menaikkan hasil devisa 23 kali lipat (dari US\$ 913,1 juta menjadi 20.663,3 juta pada periode 1972 -1981) dengan laju kenaikan 52% per tahun, telah memungkinkan pemerintah menggelembungkan peranan sektor swasta. Singkatnya, baik sektor swasta maupun negara, keduanya berkembang dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam konteks ini, belum terlihat adanya konsep teori ekonomi khas Indonesia yang akan dijadikan fondasi, meskipun wacana-wacana pembicaraan tentang ekonomi Pancasila mulai digelar. Adanya perbedaan pendapat tentang pengertian "adil" dan "makmur", yakni, yang satu lebih menekankan aspek pertumbuhan, sementara yang lain lebih ke aspek pemerataan. Suatu kompetisi yang bersifat individual agaknya sulit disandingkan dengan kerjasama yang bersifat kekeluargaan. Sementara kinerja perusahaan negara (BUMN) dan koperasi (BUMK)

pada akhirnya ternyata juga tidak lebih baik dari kinerja sektor swasta (BUMS), untuk tidak mengatakan ketiga pilar ekonomi itu bekerja dengan tidak efisien sehingga Indonesia rentan krisis dibarengi dengan maraknya praktik-praktek KKN pada waktu itu, akibatnya terdapat pertumbuhan dan kesejahteraan semu dalam penggambaran keberhasilan dengan permainan angka-angka statistik semata. Menjelang akhir kekuasaannya, mantan presiden Soeharto merasa perlu mengumpulkan para konglomerat swasta berkumpul di Tapos, mengantisipasi ketimpangan ekonomi yang terjadi.

Dalam sistem ekonomi pasar sosial, persaingan bukanlah tujuan, melainkan merupakan alat untuk meraih kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat melalui suatu peraturan hukum sosial yang jelas dan tegas. Sistem ekonomi pasar sosial memposisikan dirinya diantara sistem ekonomi "laissez-faire" dan sistem ekonomi perencanaan dengan kerangka kerja regulasi yang jelas dan tegas oleh negara dalam kebijakan ekonominya, termasuk kebijakan moneter dan stabilitas mata uang. Tentu saja pemerintah akan melakukan intervensi sepanjang hal itu menghasilkan manfaat secara sosial. Terdapat perbedaan yang jelas antara persaingan di satu sisi, dan perlindungan sosial di sisi yang lain, dimana adanya pembedaan atau pemilahan yang tegas inilah yang menciptakan efek kesejahteraan yang optimal. Dengan dibangunnya model kerangka berfikir berupa kesinambungan antara aspek ekonomi, ekologi dan demografi; sistem keamanan sosial yang cocok, dalam bidang jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lainnya, Jerman dapat memetik keberhasilan ekonomi yang substansial. Di Indonesia, perlindungan kepentingan orang banyak dan peningkatan kemakmuran rakyat sering masih dipertanyakan pemenuhannya. Baik karena pelayanan publik yang tidak efisien maupun karena distribusi pendapatan dan kekayaan nasional yang tidak adil.

Suatu teori ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan - apapun namanya - hanya akan berhasil diwujudkan apabila para penyelenggara dan para pakar ekonomi benar-benar menghayati dan mencintai falsafah Pancasilanya, sehingga memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Pengalaman sejarah telah membuktikan suatu teori ekonomi klasik lahir

pada abad ke 18 dalam suasana keinginan kuat akan adanya kebebasan (liberalisme) di dunia barat yang kemudian terbukti menyebar-luas, sehingga Adam Smith kemudian dianggap sebagai pemimpin dan anak zaman kala itu. Ekonomi pasar sosial di Jerman mencoba menggabungkan ide tentang kebebasan dan persaingan pasar dengan sistem sosial beserta perangkat hukumnya, untuk mencapai kemakmuran bersama. Keberhasilannya didukung oleh kemauan dari pemerintahan yang kuat, ditunjang oleh kerangka kerja ekonomi yang jelas dan tegas dalam memberikan perlindungan, disamping membangun alat analisis yang adekuat guna mendeteksi sejumlah kelemahan terus-menerus sepanjang waktu, sambil menemukan kemungkinan-kemungkinan solusi baru, suatu kebiasaan yang harus diakui kurang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Meskipun faham ekonomi neoliberalisme terus menerus dikritisi oleh masyarakat karena dianggap dapat melemahkan perekonomian masyarakat dan jebakan hutang bagi pemerintah terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Faktanya, kehadiran ekonomi ini tidak mudah dibendung, yang mana di Indonesia sendiri saat ini pengaruh neoliberalisasi ekonomi semakin sangat terasa. Namun demikian kita patut bersyukur karena ekonomi liberal di negara Indonesia masih dapat disaring dan aspek yang diliberlisasi hanyalah kegiatan ekonomi yang akan lebih efektif dan efesien jika ditangani oleh swasta. Privatisasi BUMN juga tak selamanya buruk, khususnya dalam konteks korporasi, swastanisasi justru dibutuhkan untuk

meningkatkan kapasitas usaha BUMN, di tengah keterbatasan pemerintah untuk menyuntikkan tambahan modal. Dalam beberapa kasus, rakyat justru mendapatkan manfaat dari liberalisasi. Sebagai contoh, ketika sektor telekomunikasi belum diliberlisasikan, rakyat sangat dirugikan karena tarif telepon relatif mahal, akibat duopoly Telkom dan Indosat. Setelah diliberlisasikan dan banyak perusahaan yang masuk ke sektor telekomunikasi, kini tarif telepon menjadi lebih terjangkau. Jadi liberalisasi ekonomi tidak selamanya berdampak buruk tetapi juga bisa mendatangkan manfaat serta bisa merangsang jiwa usaha seseorang, dengan kewaspadaan dan kendali yang tetap terjaga oleh pemerintah, yang tidak mengarah pada persaingan sempurna yang sering dikhawatirkan banyak orang belakangan ini.

Keberhasilan di Jerman bukanlah suatu keberhasilan suatu teori ekonomi yang dihasilkan secara spektakuler, melainkan bagaimana seluruh unsur masyarakat sepakat dan sungguh-sungguh dalam mewujudkan cita-cita ekonominya. Pemikir dan para ahli teori ekonomi Indonesia haruslah mampu untuk terus-menerus menggali berbagai pikiran orisinal tentang ekonomi Indonesia, dengan ragam kajian dan penelitian yang tekun, disertai komitmen pemimpin pemerintah Indonesia yang memang berjiwa nasionalis yang serius ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.

Jakarta, 20 September 2011

Faisal Afiff



Selama masa-masa gemilang Kekhalifahan Abassiyah, terdapat dua Bayt al-Hikmah, yakni di kota Harran, wilayah Turki saat ini, dan di Baghdad. Bayt al-Hikmah merupakan sebuah perpustakaan, akademi, sekaligus biro penerjemahan. Di sinilah catatan-catatan penting pemikiran Yunani kuno diterjemahkan, didiskusikan dan dipertajam untuk kemajuan.

Sumber gambar : <https://wikipedia.com/>



## Syair Perahu dari Hamzah Fansuri

Oleh : Syaiful Rahman Soenaria

Hamzah Fansuri adalah seorang ulama sufi dan penyair yang hidup di Kesultanan Aceh pada abad ke-16, puluhan tahun sebelum Sultan Iskandar Muda berkuasa. Beliau berasal dari kota Barus, kota bandar besar pada zaman dulu yang terkenal dengan produk kapur barusnya. Kapur Barus saat itu diperdagangkan sebagai produk mewah hingga ke Yunani dan Mesir. Saat Hamzah Fansuri hidup, Barus merupakan bagian dari Kesultanan Aceh.

Hamzah Fansuri sangat produktif menulis karya sastra berupa kumpulan syair, yang sebagian besar berisi nasihat-nasihat keislaman dan pandangan sufistik tentang kehidupan. Diantara kumpulan syair yang dibuatnya, Syair Perahu termasuk yang paling populer.

Dengan perantaraan karya karyanya, Bahasa Melayu menjadi semakin luas digunakan di wilayah nusantara sebagai bahasa sastra, di samping sebagai bahasa perdagangan yang dibawa para pedagang Muslim. Dapatlah dikatakan bahwa disamping Raja Ali Haji, Hamzah Fansuri adalah bapak Bahasa Indonesia.

### SYAIR PERAHU\*

*Inilah gerangan suatu madah  
mengarangkan syair terlalu indah,  
membetuli jalan tempat berpindah,  
di sanalah i'tikad diperbetuli sudah*

*Wahai muda kenali dirimu,  
ialah perahu tamsil tubuhmu,  
tiadalah berapa lama hidupmu,  
ke akhirat jua kekal hidupmu*

*Hai muda arif-budiman,  
hasilkan kemudi dengan pedoman,  
alat perahumu jua kerjakan,  
itulah jalan membetuli insan.*

*Perteguh jua alat perahumu,  
hasilkan bekal air dan kayu,  
dayung pengayuh taruh di situ,  
supaya laju perahumu itu*

*Sudahlah hasil kayu dan ayar,  
angkatlah pula sauh dan layar,  
pada beras bekal jantanlah taksir,  
niscaya sempurna jalan yang kabir.*

*Perteguh jua alat perahumu,  
muaranya sempit tempatmu lalu,  
banyaklah di sana ikan dan hiu,  
menanti perahumu lalu dari situ.*

*Muaranya dalam, ikanpun banyak,  
di sanalah perahu karam dan rusak,  
karangnya tajam seperti tombak  
ke atas pasir kamu tersesak.*

*Ketahui olehmu hai anak dagang  
riaknya rencam ombaknya karang  
ikanpun banyak datang menyarang  
hendak membawa ke tengah sawang.*

*Muaranya itu terlalu sempit,  
di manakan lalu sampan dan rakit  
jikalau ada pedoman dikapit,  
sempurnalah jalan terlalu ba'id.*

*Baiklah perahu engkau perteguh,  
hasilkan pendapat dengan tali sauh,  
anginnya keras ombaknya cabuh,  
pulaunya jauh tempat berlabuh.*

*Lengkapkan pendarat dan tali sauh,  
derasmu banyak bertemu musuh,  
selebu rencam ombaknya cabuh,  
La ilaha illallah akan tali yang teguh.*

*Barang siapa bergantung di situ,  
teduhlah selebu yang rencam itu  
pedoman betuli perahumu laju,  
selamat engkau ke pulau itu.*

*La ilaha illallahu jua yang engkau ikut,  
di laut keras dan topan ribut,  
hiu dan paus di belakang menurut,  
pertetaplah kemudi jangan terkejut.*

*Laut Silan terlalu dalam,  
di sanalah perahu rusak dan karam,  
sungguhpun banyak di sana menyelam,  
larang mendapat permata nilam.*

*Laut Silan wahid al kahhar,  
riaknya rencam ombaknya besar,  
anginnya songsongan membelok sengkar  
perbaik kemudi jangan berkisar.*

*Itulah laut yang maha indah,  
ke sanalah kita semuanya berpindah,  
hasilkan bekal kayu dan juadah  
selamatlah engkau sempurna musyahadah.*

*Silan itu ombaknya kisah,  
banyaklah akan ke sana berpindah,  
topan dan ribut terlalu 'azamah,  
perbetuli pedoman jangan berubah.*

*Laut Kulzum terlalu dalam,  
ombaknya muhit pada sekalian alam  
banyaklah di sana rusak dan karam,  
perbaiki na'am, siang dan malam.*

*Ingati sungguh siang dan malam,  
lautnya deras bertambah dalam,  
anginpun keras, ombaknya rencam,  
ingati perahu jangan tenggelam.*

*Jikalau engkau ingati sungguh,  
angin yang keras menjadi teduh  
tambahan selalu tetap yang cabuh  
selamat engkau ke pulau itu berlabuh.*

*Sampailah ahad dengan masanya,  
datanglah angin dengan paksanya,  
belajar perahu sidang budimannya,  
berlayar itu dengan kelengkapannya.*

*Wujud Allah nama perahunya,  
ilmu Allah akan [dayungnya]  
iman Allah nama kemudinya,  
"yakin akan Allah" nama pawangnya.*

*"Taharat dan istinja" nama lantainya,  
"kufur dan masiat" air ruangnya,  
tawakkul akan Allah jurubatunya  
tauhid itu akan sauhnya.*

*Salat akan nabi tali bubutannya,  
istigfar Allah akan layarnya,  
"Allahu Akbar" nama anginnya,  
subhan Allah akan lajunya.*

*"Wallahu a'lam" nama rantaunya,  
"iradat Allah" nama bandarnya,  
"kudrat Allah" nama labuhannya,  
"surga jannat an naim nama negerinya.*

*Karangan ini suatu madah,  
mengarangkan syair tempat berpindah,  
di dalam dunia janganlah tam'ah,  
di dalam kubur berkhalwat sudah.*

*Kenali dirimu di dalam kubur,  
badan seorang hanya tersungkur  
dengan siapa lawan bertutur?  
di balik papan badan terhancur.*

*Di dalam dunia banyaklah mamang,  
ke akhirat jua tempatmu pulang,  
janganlah disusahi emas dan uang,  
itulah membawa badan terbuang.*

*Tuntuti ilmu jangan kepalang,  
di dalam kubur terbaring seorang,  
Munkar wa Nakir ke sana datang,  
menanyakan jikalau ada engkau sembahyang.*

*Tongkatnya lekat tiada terhisab,  
badanmu remuk siksa dan azab,  
akalmu itu hilang dan lenyap,  
tanpa ada tujuan yg tetap,*

*Munkar wa Nakir bukan kepalang,  
suaranya merdu bertambah garang,  
tongkatnya besar terlalu panjang,  
cabuknya banyak tiada terbilang.*

*Kenali dirimu, hai anak dagang!  
di balik papan tidur telentang,  
kelam dan dingin bukan kepalang,  
dengan siapa lawan berbincang?*

*La ilaha illallahu itulah firman,  
Tuhan itulah pergantungan alam sekalian,  
iman tersurat pada hati insan,  
siang dan malam jangan dilalaikan.*

*La ilaha illallahu itu terlalu nyata,  
tauhid ma'rifat semata-mata,  
memandang yang gaib semuanya rata,  
lenyapkan ke sana sekalian kita.*

*La ilaha illallahu itu janganlah kauper mudah-mudah,  
sekalian makhluk ke sana berpindah,  
da'im dan ka'im jangan berubah,  
khalak di sana dengan La ilaha illallahu.*

*La ilaha illallahu itu jangan kaulalaikan,  
siang dan malam jangan kau sunyikan,  
selama hidup juga engkau pakaikan,  
Allah dan rasul juga yang menyampaikan.*

*La ilaha illallahu itu kata yang teguh,  
memadamkan cahaya sekalian rusuh,  
jin dan syaitan sekalian musuh,  
hendak membawa dia bersungguh-sungguh.*

*La ilaha illallahu itu kesudahan kata,  
tauhid ma'rifat semata-mata.  
hapuskan hendak sekalian perkara,  
hamba dan Tuhan tiada berbeda.*

*La ilaha illallahu itu tempat mengintai,  
medan yang kadim tempat berdamai,  
wujud Allah terlalu bitai,  
siang dan malam jangan bercerai.*

*La ilaha illallahu itu tempat musyahadah,  
menyatakan tauhid jangan berubah,  
sempurnalah jalan iman yang mudah,  
pertemuan Tuhan terlalu susah. [ ]*

\*Naskah Syair Perahu diambil dari buku “*Sastras Sufi: Sebuah Ontologi*” karya Abdul Hadi W.M. Penerbit Pustaka Firdaus tahun 1985



Salah satu gambar rekaan dari Hamzah Fansuri



## KPK: Lembaga yang (Dibuat) Mati Muda

Oleh : Darmawan Sepriyossa \*)

*Sejak awal, bayi KPK memang anak yang tak dikehendaki lahir oleh sebagian kalangan elit di negeri ini*

Jumat malam, 5 Oktober 2012. Tujuh orang, sebagian berseragam polisi dengan *epaulet* perwira di bahu, merangsek, mencoba membuka pintu menuju ruangan dalam gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Penanggung jawab keamanan bangunan, seorang pensiunan perwira Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dengan tenang namun gigih terus menahan mereka.

“Kami menjalankan tugas negara,” kata salah seorang perwira polisi yang datang dan mendesak masuk itu. Sang pensiunan perwira Kopassus tetap bergeming bertahan. “Tanpa izin pimpinan, saya tak bisa membuka pintu dan menyilakan siapa pun masuk,” kata dia. Ia tetap mempertahankan pintu kaca transparan tebal yang dilengkapi kunci berpengaman digital itu. Mereka terus adu argumen dibatasi kaca tebal, sampai seorang penyidik senior KPK, Komisaris Bhakti Suhendrawan datang. Sebagai sesama korp baju cokelat ia mengenali sebagian tamu KPK malam itu. Benar, koleganya di Polri.

Saat Bhakti bertanya apa keperluan mereka datang malam-malam, rombongan polisi yang dipimpin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Komisaris Besar Dedy Irianto, segera menyorongkan surat. Isinya perintah penangkapan Komisaris Polisi Novel Baswedan, perwira polisi yang sejak 2007 menjadi penyidik di KPK.

Bhakti membaca dan mengangguk-angguk. “Ada yang lain?” ia bertanya. Komisaris Besar Dedy kembali menyorongkan surat kedua, kali ini perintah penggeledahan gedung KPK. Bhakti mengamati surat itu lebih seksama. “Sudah

dilengkapi surat pengadilan?” ia kembali bertanya. Dedy menjawab belum. Mata Bhakti yang terlatih dan berpengalaman melihat bahwa surat itu tidak dilengkapi nomor laiknya sebuah dokumen resmi.

“Belum,” kata Kombes Dedy, pendek.

“Kalau begitu tidak bisa dipakai,” ia kemudian menyilakan para tamu tak diundang itu tetap menunggu di ruang lobi.

Kira-kira seperti itu majalah *TEMPO* merekonstruksi apa yang terjadi malam itu, berdasarkan wawancara majalah itu dengan sumber-sumber utama mereka yang langsung menyaksikan peristiwa itu di tempatnya terjadi.

Jumat malam itu Novel Baswedan baru selesai memeriksa Inspektur jenderal Polisi Djoko Susilo, mantan Kepala Korps lalu Lintas (Korlantas) Markas Besar Polri, sebagai tersangka kasus korupsi proyek simulator kemudia untuk ujian Surat Izin Mengemudi (SIM) senilai Rp 196,87 miliar. Djoko merupakan perwira tinggi polisi aktif pertama yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Novel sejauh awal merupakan motor penyidikan kasus yang juga diduga melibatkan banyak perwira tinggi Kepolisian itu.

Sejak kasus itu bergulir, seolah melancarkan pukulan balasan, Mabes Polri mengumumkan Novel sebagai tersangka perkara “penembakan pencuri sarang burung walet” di Bengkulu, yang terjadi pada 2004, delapan tahun sebelum hari itu.

Perseteruan seperti itu, antara KPK dengan institusi pemerintah lainnya—dalam kasus di atas dengan Polri—bukanlah yang pertama, dan bukan

\*) Jurnalis, anggota Dewan Redaksi KASYAF

pula yang terakhir. Dalam catatan media massa, perseteruan antara KPK dengan Kepolisian RI pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di masa pemerintahan SBY pernah dua kali terjadi kasus perseteruan KPK dengan polisi, yang lazim disebut "cicak vs buaya".

Kasus cicak vs buaya pertama terjadi pada Juli 2009. Perseteruan tersebut berasal dari isu yang beredar adanya penyadapan oleh KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri saat itu, Komjen Susno Duadji. Susno dituduh terlibat pencairan dana dari nasabah Bank Century, Boedi Sampoerna. Susno-lah orang yang pertama kali menyodorkan analogi cicak vs buaya. Ia mengibaratkan KPK sebagai cicak yang kecil, sedangkan Polri ialah buaya, karena besar. "Cicak kok mau melawan buaya?" kata Susno saat itu.<sup>1</sup>

Puncak kasus cicak vs buaya jilid I terjadi ketika Bareskrim Mabes Polri menahan dua Wakil Ketua KPK; Bibit Samad Riyanto dan Chandra Martha Hamzah. Penahanan dua komisioner KPK ini memantik reaksi keras dari aktivis antikorupsi.

Dua pekan setelah Bibit dan Chandra ditahan polisi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun angkat bicara. Menurut SBY, ada sejumlah permasalahan di ketiga lembaga penegak hukum saat itu, yakni Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

"Karena itu, solusi dan opsi lain yang lebih baik yang dapat ditempuh adalah pihak kepolisian dan kejaksaan tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan tetap mempertimbangkan azas keadilan, namun perlu segera dilakukan tindakan-tindakan korektif dan perbaikan terhadap ketiga lembaga penting itu, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK," kata SBY saat memberikan pidato terkait kasus cicak vs buaya pada 23 November 2009 di Istana Negara. Setelah itu, perseteruan KPK dengan Polri pun meredup.

Tiga tahun kemudian kasus cicak vs buaya kembali terjadi, yakni pada cerita yang mengawali tulisan ini, awal Oktober 2012. Sebagaimana disebutkan, kasus itu dipicu langkah KPK mengusut kasus dugaan korupsi simulator SIM yang menjerat mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektor Jenderal Djoko Susilo.

Untuk kasus tersebut, para pegiat antikorupsi kembali beraksi melawan aparat Kepolisian yang mengepung gedung KPK. Para aktivis antikorupsi datang berduyun-duyun ke Gedung KPK, membuat pagar betis, dan mendesak agar Presiden SBY turun tangan. Tiga hari kemudian, Presiden SBY angkat bicara.

"...Insiden itu terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012 dan hal itu sangat saya sesalkan," kata SBY saat memberikan pidato di Istana Negara pada Senin, 8 Oktober 2012. "Saya juga menyesalkan berkembangnya berita yang simpang siur sedemikian sehingga muncul masalah politik yang baru." Menurut SBY, apabila KPK dan Polri bisa memberikan penjelasan yang jujur dan jelas, kasus cicak vs buaya jilid II tidak akan terjadi. Perkataan Presiden SBY benar-benar bertuah karena kasus itu pun kontan kembali redup, tetapi tetap menyisakan bara yang belum sepenuhnya padam.

Cicak vs buaya kembali muncul di era Presiden Joko Widodo pada 2015. Sebelas hari setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, Kepolisian menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto pada Jumat, 23 Januari 2015.

Lima jam setelah penangkapan Bambang Widjajanto, Presiden Jokowi memanggil Ketua KPK dan Wakapolri. Tiga jam kemudian, Jokowi memberikan pernyataan singkat.

"Saya meminta kepada institusi Polri dan KPK memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan Undang-undang," kata Jokowi di Istana Bogor, hari itu juga. Ratusan aktivis pro-pemberantasan korupsi mendukung KPK memprotes tindakan Polri tersebut. Konflik itu pun disebut sebagai sengketa "cicak vs buaya jilid 3". Sebagaimana dua sengketa sebelumnya, kasus terakhir pun meredup begitu saja, tanpa akhir yang jelas.

### Upaya Penguasaan KPK yang TSM

Di negeri ini, tampaknya koruptor telah menjadi komunitas yang memiliki solidaritas tinggi di antara mereka. Dengan lahirnya KPK, kepentingan mereka tentu terbelenggu, terhambat dan terganggu. Untuk itu mereka tidak diam, melainkan melawan dan berontak.

1) <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/130792/susno-duadjicicak-kok-mau-melawan-buaya>?

Upaya itu dilakukan terutama dengan terus berusaha untuk melemahkan musuh bersama dan ikon anti-korupsi, KPK. Paling tidak menurut salah seorang pegawai KPK yang terpental melalui tes wawasan kebangsaan (TWK), Harun Al Rasyid, hal itu telah berlangsung bahkan sejak awal lembaga anti-rasuah itu berdiri, 2003.

"Sejak awal KPK berdiri, perlemahan itu telah terjadi," kata Harun kepada *JPNN* di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, awal Juni lalu. Tetapi di masa-masa awal itu, menurut dia, sifat gangguan itu masih kecil dan belum massif. Harun mencontohkan bahwa sejumlah pegawai KPK sempat mengalami ancaman saat menanganai perkara korupsi. Hal itu merupakan salah satu cara melemahkan KPK.

Namun seiring waktu, konsolidasi di antara pihak yang melihat KPK sebagai ancaman itu kian kuat, dan perlemahan yang mereka lakukan pun akhirnya sebagaimana jargon Pilpres tentang kecurangan, "TSM: terstruktur-sistematis-masif".

Hal tersebut dibenarkan peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mochammad Nurhasim. Nurhasim mengatakan, berdasarkan perjalanan KPK dari periode ke periode, dirinya melihat jelas bahwa KPK telah cenderung disusutkan atau dilemahkan.

"Kalau kita lihat KPK dari tahun 2001-2014 itu ada kecenderungan bahwa KPK memang *superbody*. Para politisi dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan korupsi selalu mengatakan ini lembaga yang tidak bisa dikontrol," kata Nurhasim.

Hal itu, kata Nurhasim, terkait erat dengan paradigm KPK di awal pendirian yang membentuknya menjadi lembaga '*super body*', yakni berdasarkan UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Karena kuatnya pemikiran bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka dibutuhkan lembaga yang kuat untuk memberantasnya. Dalam pasal 3 UU no 30/2002 itu memang termaktub posisinya yang independen, "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun."

Hal itu wajar, mengingat pengalaman Indonesia sebagai negara yang pernah morat-

marit akibat korupsi, sehingga salah satu amanat Reformasi 1998 pun menyalah korupsi. Amanat itulah yang kemudian pada masa kepemimpinan Presiden BJ Habibie dituangkan ke dalam Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" serta UU No. 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Kedua undang-undang yang lahir dari amanat Reformasi 1998 itulah yang kemudian menjadi cikal bakal UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Alhasil, KPK pun tak pelak merupakan buah dari amanat reformasi 1998 untuk menjamin penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan soal TSM tersebut secara lebih eksplisit. Menurut Zainal, "pembunuhan KPK", yang salah satunya dilakukan dengan Test Wawasan Kebangsaan merupakan kejahatan yang sempurna karena melibatkan upaya yang sudah terstruktur dan politik tingkat tinggi.

"Pembunuhan KPK adalah *perfect crime* (kejahatan sempurna). Disusun sedemikian rupa, kekuasaan tingkat tinggi, manajemen canggih, melampaui hukum, moralitas, kemampuan akal sehat, nilai budaya," ujar Zainal dalam diskusi virtual Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, bertema "Akhir Kisah Komisi Pemberantasan Korupsi", awal Mei 2021.

Upaya perlemahan yang TSM tersebut terlihat jelas dengan berbagai upaya yang kalau disederhanakan bisa dibagi menjadi beberapa 'jalur gangguan'.

#### -Jalur kriminalisasi-intimidasi

Di awal-awal, pada masa pemerintahan Presiden SBY, perlemahan dengan cara kriminalisasi banyak dialami para komisioner dan pejabat-pejabat KPK seiring dilakukannya pengusutan kasus korupsi yang melibatkan pengusaha dan politisi berpengaruh.<sup>2</sup>

Pada 2009, misalnya, Ketua KPK Antasari Azhar didakwa melakukan pembunuhan terhadap pengusaha Nasrudin Zulkarnaen. Ia kemudian divonis 18 tahun penjara pada 2010 dan ia dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan untuk membunuh Nasrudin. Setelah

2) [https://id.wikisource.org/wiki/Laporan\\_Tim\\_Independen\\_Verifikasi\\_Fakta\\_dan\\_Proses\\_Hukum\\_atas\\_Kasus\\_Sdr.\\_Chandra\\_M.\\_Hamzah\\_dan\\_Sdr.\\_Bibit\\_Samad\\_Rianto](https://id.wikisource.org/wiki/Laporan_Tim_Independen_Verifikasi_Fakta_dan_Proses_Hukum_atas_Kasus_Sdr._Chandra_M._Hamzah_dan_Sdr._Bibit_Samad_Rianto)

bebas, ia mengatakan bahwa kasusnya direkayasa dan bahwa SBY adalah dalam kriminalisasi terhadap dirinya. Namun pernyataan Antasari tersebut tidak pernah dapat dibuktikan.<sup>3</sup>

Yang pasti, salah satu kasus yang menjadi sorotan selama era Antasari adalah penangkapan dan pemenjaraan Aulia Pohan, deputi gubernur Bank Indonesia yang juga merupakan besan SBY, dalam kasus korupsi aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia senilai Rp 100 miliar kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat kejaksaan.

Juga pada 2009, Kepolisian Republik Indonesia menetapkan dua orang wakil ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka. Bibit menjadi tersangka dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan surat cekal untuk pengusaha Joko S. Tjandra. Chandra menjadi tersangka tuduhan yang sama dalam menerbitkan surat permohonan cekal untuk pengusaha Anggoro Widjojo.

Kriminalisasi pada pejabat KPK terus berlangsung, hingga juga terjadi pada masa pemerintahan Jokowi. Pada 2015, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen Kartu Tanda Penduduk, paspor dan Kartu Keluarga.

Di tahun yang sama, komisioner KPK Bambang Wijojanto juga ditangkap polisi atas tuduhan menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Antara 2015 dan 2019, ada dua komisioner, tiga penyidik, dan seorang penyelidik KPK yang dilaporkan ke polisi dengan berbagai tuduhan. Komisioner Agus Rahardjo dan Saut Situmorang berulang kali dilaporkan ke Kepolisian. Mereka dilaporkan dengan tuduhan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang.

Kriminalisasi terhadap pemimpin KPK tersebut jelas berdampak buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari beberapa kasus, setelah penetapan komisioner KPK menjadi tersangka, penanganan kasus yang sedang ditangani KPK pun serta-merta terhambat.

Tidak hanya itu, kekerasan, fitnah dan intimidasi terhadap pejabat KPK juga berulang

kali terjadi. Mulai dari tabrak lari, kekerasan, pelemparan air keras, hingga teror bom molotov.

Pada April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras oleh dua pria bersepeda motor usai melaksanakan salat subuh di mesjid dekat rumahnya. Novel bahkan nyaris kehilangan penglihatan.

#### -Jalur legislasi

Upaya kedua yang lebih sistematis dan 'sabar', adalah lewat jalur legislasi, via Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Caranya, melalui proses penyusunan regulasi (legislasi) dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (Revisi UU KPK).

Sejak 2011 upaya merevisi UU KPK sudah mulai digagas. Namun karena di DPR sendiri sampai 2014 itu kekuatan-kekuatan politik di DPR masih belum terkooptasi kekuasaan, maka upaya tersebut sejauh gagal.

Upaya untuk merevisi UU KPK itu makin agresif dilakukan pemerintah dan DPR pada tahun 2015, seiring makin terkumpulnya suara partai-partai politik di tangan kekuasaan pemerintah. Tercatat ada tiga kali upaya pembahasan Revisi UU KPK dilakukan, yaitu pada Juni, Oktober dan Desember 2015.

Pada naskah Revisi UU KPK per 2015, ICW mencatat sedikitnya terdapat 17 (tujuh belas)<sup>4</sup> hal krusial yang berpotensi melemahkan KPK<sup>4</sup>. Beberapa diantaranya adalah pembatasan usia KPK hanya 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, memberikan kewenangan penghentian penyidikan, mereduksi kewenangan penyadapan, membatasi proses rekrutmen penyidik hingga membatasi kasus korupsi ditangani.

Menurut ICW, jika Revisi UU KPK disahkan, maka tidak saja KPK yang terancam namun juga agenda pemberantasan korupsi di negeri ini. Beruntung, akibat banyaknya penolakan, proses pembahasan Revisi UU KPK hingga penghujung tahun 2015 itu gagal dilaksanakan.

Upaya itu menguat kembali, ditandai dengan diketuknya palu pada Kamis, 17 September 2019 untuk mulai melakukan proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Padahal, rancangan revisi UU tersebut menuai

3) <https://www.voaindonesia.com/a/antasari-sebut-sby-dalangi-kasusnya-/3724689.html>

4) <https://antikorupsi.org/id/article/menggagalkan-upaya-peleman-kpk>

berbagai polemik karena diyakini banyak kalangan masyarakat berujung pada perlemahan KPK.

Tercatat ada enam orang anggota DPR yang menjadi pengusul dilakukannya revisi atas UU KPK tersebut. Mereka adalah Masinton Pasaribu (PDIP), Risa Mariska (PDIP), Achmad Baidowi (PPP), Saiful Bahri Ruray (Golkar), Taufiqulhadi (Nasdem) dan Ibnu Multazam (PKB).<sup>5</sup>

Akan halnya mengapa revisi UU KPK tersebut bergulir, mayoritas masyarakat memang mempertanyakannya, terutama kepada Presiden Jokowi. Mereka tahu bahwa sebelumnya Jokowi bahkan berulang kali berjanji untuk memperkuat KPK—bahkan ada yang menyitir pernyataan beliau secara verbatim: “10 kali lipat”.<sup>6</sup> Publik kecewa karena pasal-pasal revisi yang diajukan, umumnya justru memperlemah KPK, bukan menguatkan posisinya.

Misalnya, *TEMPO.CO* merinci sejumlah pasal dalam UU hasil revisi justru berpotensi membuat kelembagaan KPK dan upaya pemberantasan korupsi makin lemah. Berikut rincian *TEMPO*<sup>7</sup>:

## 1. Korupsi kini dianggap sebagai perkara biasa, bukan extraordinary crime

Dalam Pasal 46 UU KPK yang lama disebutkan bahwa pemeriksaan tersangka oleh KPK merujuk pada ketentuan UU KPK. Namun dalam UU baru, pasal itu diubah dan pemeriksaan tersangka merujuk pada ketentuan yang ada di kitab hukum acara pidana.

Menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, perubahan itu menyebabkan UU KPK kehilangan status sebagai aturan yang berlaku khusus. Dampaknya, tindak pidana korupsi hukum acaranya sama dengan tindak pidana biasa. "Korupsi menjadi dianggap perkara biasa, bukan extraordinary lagi," kata Fickar.

## 2. Kewenangan pimpinan KPK dibatasi

Dalam Pasal 21 ayat (4) dan (6) UU KPK yang lama, pimpinan KPK merupakan penanggung jawab tertinggi yang berwenang menerbitkan surat perintah penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan.

Namun dalam UU baru kewenangan pimpinan sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik, dan penuntut umum dihapus. Di UU yang baru, hampir semua kewenangan pimpinan KPK diambil alih oleh dewan pengawas.

## 3. Kewenangan menggeledah, menyita, dan menyadap dipangkas

Merujuk Pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Pasal 12B mengatur penyadapan juga harus melalui izin tertulis dewan pengawas. Jangka waktu penyadapan dibatasi hanya selama 1x6 bulan dan dapat diperpanjang 1x6 bulan.

## 4. Kewenangan merekrut penyelidik independen dihilangkan

Pasal 43 UU KPK baru mengatur bahwa penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Namun Pasal 43A menyebutkan penyelidik tersebut harus lulus pendidikan di tingkat penyelidikan. Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, pembinaan terhadap penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil berada di bawah naungan kepolisian.

## 5. Pegawai KPK tunduk pada UU ASN

Pasal 24 UU KPK yang baru menetapkan status kepegawaian KPK harus aparatur sipil negara (ASN). Hal ini dinilai akan mengganggu independensi pegawai KPK.

"Ini mendegrade KPK dari lembaga independen menjadi lembaga di bawah pemerintah, sebagai pegawai negeri atau ASN yang berada di bawah garis komando subordinasi," kata pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.

## 6. Peran dewan pengawas terlalu dominan

Keberadaan dewan pengawas dinilai akan mendominasi dan mengganggu independensi KPK. Wewenang dewan pengawas juga bukan cuma mengawasi dan mengevaluasi, tetapi masuk dalam keseharian teknis penanganan perkara. Peran dewan pengawas ini tertuang

5) <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/06/ini-nama-sejumlah-anggota-dpr-pengusul-revisi-uu-kpk>

6) <https://www.suara.com/news/2021/06/08/144511/amnesty-dulu-janji-memperkuat-jokowi-kini-apatis-saat-kpk-dilemahkan?page=all>

7) <https://nasional.tempo.co/read/1249932/pasal-pasal-revisi-uu-kpk-yang-potensial-lemahkan-kpk>

dalam Pasal 37B. "Dewan pengawas ini pemborosan, tak efektif, dan bisa menjadi alat intervensi," kata Abdul Fickar Hadjar.

## 7. Kewenangan menerbitkan SP3

UU KPK yang baru mengatur kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan apabila penyidikan dan penuntutan suatu perkara tak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Aturan ini ada di Pasal 40 UU KPK hasil revisi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai aturan ini diskriminatif dengan UU Kepolisian dan Kejaksaan. UU Kepolisian, misalnya, tak mengatur batas waktu tertentu dalam penghentian penyidikan. Pembatasan hanya berdasarkan kadaluwarsa perkara sesuai dengan ancaman hukuman.

## 8. Perkara korupsi yang sedang ditangani bisa tiba-tiba berhenti

UU KPK ini langsung berlaku setelah diundangkan. Akibatnya, penanganan perkara yang saat ini tengah berlangsung di komisi antikorupsi bisa tiba-tiba berhenti dengan berlakunya UU ini. Padahal, KPK masih menangani sejumlah kasus korupsi seperti e-KTP, Bank Century, BLBI, Pelindo II, dan sebagainya.

### -Jalur infiltrasi

Yang dimaksud perlemahan melalui jalur infiltrasi adalah cara-cara pihak yang anti-KPK untuk menguasai lembaga anti-rasuah itu dengan memasukkan tokoh atau figur dengan kualitas 'kebersihan' yang tidak memadai, kalau pun tidak tersohor figur yang kotor. Figur-figur tersebut, karena rekam jejak dan masa lalu mereka, diyakini akan mudah disetir dan dikendalikan kepentingan yang mendukung dan mengendorsernya.

Tanpa harus menunjuk figur-figur tertentu, kalangan pegiat anti-korupsi melihat bahwa cara ini sudah sukses mengupayakan naiknya figur-figur tertentu sebagai tokoh atau pengambil kebijakan yang strategis di KPK.

Banyak kalangan publik melihat cara ini berkaitan erat dengan proses seleksi pimpinan

KPK. Sebagaimana beredar luas dalam pemberitaan media massa, dari konon ratusan nama yang diseleksi tim yang diketuai Yenti Garnasih, dengan wakil ketua Indriyanto Seno Adji dan para anggota yakni Marcus Priyo Gunarto, Hendardi, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Al Araf, Mualimin Abdi, serta Hamdi Moeloek, terpilih 10 nama.<sup>8</sup> Kesepuluh nama itu adalah Alexander Marwata, Firli Bahuri, I Nyoman Wara, Johanis Tanak, Lili Pintauli Siregar, Luthfi Jayadi Kurniawan, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, Roby Arya B, dan Sigit Danang Joyo.

Terhadap nama-nama capim KPK tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, mengkritik kinerja Pansel Capim KPK. Mereka menilai Pansel tidak selektif karena ada beberapa capim yang memiliki rekam jejak buruk masih lolos seleksi hingga 20 besar, bahkan 10 besar.<sup>9</sup>

"Cicak vs Buaya 4 terjadi secara parallel, mulai dari revisi UU KPK, beriringan dengan pemilihan panitia seleksi KPK yang bermasalah karena memiliki konflik kepentingan dengan pihak yang menyerang KPK. Pansel ini juga meloloskan orang bermasalah. Ini menunjukkan indikasi bahwa demokrasi Indonesia sudah runtuh," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati.<sup>10</sup>

### -Jalur perubahan status pekerja KPK

Salah satu yang paling penting dan berdampak signifikan terhadap independensi dan kekuatan KPK dalam melaksanakan fungsinya memberantas korupsi, adalah status para pekerja yang tergabung di dalamnya.

Menurut peneliti politik di LIPI, Mochammad Nurhasim, UU No.19 tahun 2019—yang pembuatannya tergolong super cepat dalam keriuhan politik yang mengiringinya--adalah bagian awal dari upaya untuk mengubah atau mengontrol KPK sebagai sebuah organisasi. "Termasuk di dalam konteks desain itu adalah alih status pegawai KPK," kata Nurhasim.<sup>11</sup> Dia menjelaskan, mengubah status pegawai KPK menjadi ASN akan menimbulkan masalah karena

8) <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/02/05200071/pansel-serahkan-10-nama-capim-kpk-ke-jokowi-senin-sore-masukan-publik?page=all>

9) <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/09443411/capim-kpk-hasil-seleksi-pansel-menuai-kritik-jokowi-akan-mengoreksi?page=all>

10) <https://news.harianjogja.com/read/2021/05/07/500/1071117/dosen-ugm-sebut-pelemahan-kpk-sebagai-kejahatan-sempurna>

11) <https://www.gatra.com/detail/news/513589/hukum/runut-sejarah-pelemahan-kpk-hingga-polemik-twtk>

sistem organisasi KPK selama ini terbilang jauh lebih efektif dibandingkan dengan model kerja birokrasi ASN.

Keyakinan Nurhasim tersebut diamini Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman dan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Bonyamin mengatakan, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN akan mereduksi independensi lembaga antirasuah itu, lantaran posisi KPK akan berada di bawah Presiden dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Setelah menjadi pegawai negeri sipil, maka independensi pegawai KPK akan berubah, mengingat mereka adalah bagian dari pemerintah itu sendiri," ujar Boyamin kepada *Lokadata.id*. Sayangnya, untuk persoalan tersebut, sebelumnya Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. PP tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

Sementara Kurnia mengatakan, sejak PP yang disetujui Jokowi itu berlaku, independensi KPK semakin terkikis. Alasannya, dengan PP tersebut, KPK tak lagi memiliki sistem kepegawaian yang dikelola secara mandiri.<sup>12</sup>

"Salah satu ciri lembaga independen tercermin dari sistem kepegawaianya yang dikelola secara mandiri. Ini juga merupakan implementasi dari *self regulatory body* yang ada pada lembaga negara independen," kata Kurnia.

Sebagai catatan, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK. Dengan UU tersebut, KPK tak lagi menjadi lembaga negara, melainkan lembaga pemerintah pusat.

#### Enam tahap pelemahan KPK

Keyakinan bahwa KPK memang sengaja dilemahkan tersebut tidak hanya berdasarkan kacamata WNI dengan segala rasa keberpihakan dan rasa memiliki yang dimilikinya. Pengamat luar, yakni pengajar pada University of Sydney, Australia, Thomas Power, menilai ada enam

tahapan pelemahan KPK yang terjadi di era Presiden Joko Widodo.

Tahapan pertama adalah menempatkan sebagian elit politik di luar jangkauan KPK. Thomas membandingkan, di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana orang yang berada di lingkarannya masih 'bisa' diselidiki dan disidik.

"Sedangkan di era Jokowi, ada perubahan. Terutama ketika ingin menyelidiki 'orang besar'," ujar Thomas dalam diskusi daring berjudul "*Pengkerdilan KPK dan Membaca Arah Politik Antikorupsi di Indonesia*" awal Juni lalu.<sup>13</sup>

Tahapan selanjutnya, menurut Thomas, adalah beragam intimidasi terhadap penyidik KPK. Salah satunya adalah insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Kemudian, fase selanjutnya melakukan delegitimasi diskursif terhadap penyidik-penyidik yang independen. "Caranya melalui pendengungan isu-isu taliban," kata Thomas.

Tanda pelemahan keempat, kata Thomas, yakni pengangkatan perwira aktif Kepolisian menjadi pimpinan KPK. "Kelima saat revisi UU KPK terjadi dan yang keenam implementasi dari UU KPK itu sendiri, yang mana salah satunya adalah alih status pegawai menjadi ASN (aparatur sipil negara)," kata dia.

Thomas juga menambahkan adanya faktor struktural dan agential juga menjadi faktor perlemahan terhadap KPK terjadi di era Jokowi. Untuk struktural, ada tiga faktor yang melatarbelakangi. "Korupsi bersifat terlembaga, politisasi aparat hukum, dan lembaga independen menjadi ancaman," ujar Thomas.

Sementara faktor agential adalah politisasi KPK pada 2014, dinamika koalisi pemerintah, dan sikap presiden terhadap agenda anti-korupsi. "Di mana presiden lebih mengutamakan agenda pembangunan daripada pemberantasan korupsi," kata Thomas, menunjuk faktor perlemahan KPK di era Jokowi.

#### Apa kabar Presiden Jokowi?

Banyak kalangan yakin, sukar untuk menafikan bahwa pada tahun 2021 ini KPK sejatinya telah mati. Memaksakan diri mengakui

12) <https://lokadata.id/artikel/pegawai-kpk-jadi ASN-ancaman-pelemahan-kembali-menguat>

13) <https://nasional.tempo.co/read/1469864/dosen-universitas-sidney-paparkan-6-tahap-pelemahan-kpk-di-era-jokowi>

keberadaannya dalam kondisi dan keterbatasan kemampuan sesuai tata aturan yang membelenggunya saat ini, sebenarnya hanya basa-basi. Mungkin pula patut kita curigai sebagai bagian dari mereka yang sejak awal dirugikan oleh keberadaan lembaga anti-rasauh itu, dan berkeras meyakinkan publik tentang keberadaannya kini tidak lain hanya untuk menjaga agar lembaga yang dulu menjadi harapan rakyat banyak itu tetap menjadi zombie.

Bagaimana tidak demikian, bila secara asasi pun keberadaan KPK saat ini tidak bisa tidak untuk senantiasa berada dalam paradigm bahwa korupsi hanyalah kejahatan biasa. Bukan lagi kejahatan luar biasa (*extraordinary*) seperti tatkala lembaga itu lahir, sebagai amanat rakyat yang mereka ekspresikan lewat Reformasi 1998, sehingga untuk memberantasnya pun (kalau keinginan itu masih dibuat seperti ada) tak perlu lewat cara-cara yang *extraordinary* pula. Alhasil, dengan tiadanya kelebihan dan perbedaan apa pun dengan lembaga penegak hukum lainnya, KPK praktis tak lagi memiliki arti dan fungsi apa-apa.

Kepada siapa rakyat bisa menyatakan kekecewaan mereka seiring mati-(suri)nya lembaga anti-rasauh yang sempat menjadi tumpuan harapan mereka untuk tegaknya keadilan di Tanah Air itu? Berat kerongkongan kita mengatakannya, tetapi memang sejatinya, bila yang dimaksud adalah sebuah lembaga politik di negara ini, barangkali pihak itu tidaklah ada.

Bukankah bahkan wakil rakyat di DPR—lembaga resmi demokrasi kita—pun bahkan secara ironis justru menjadi titik awal dari hancurnya KPK? Bukankah selama proses 'pembunuhan' lembaga tersebut, para anggota dewan yang terhormat itu tak pernah sekali pun mendengar dan mengindahkan suara publik, suara rakyat yang hanya mereka anggap suara Tuhan hanya pada saat pemilihan?

Sementara kita tahu, lembaga perwakilan lain—DPD--, sampai saat ini pun masih berjuang keras menegaskan keberadaan mereka dalam demokrasi negeri ini. Alhasil, tak mungkin rakyat meminta bantuan kepada para anggota sebuah lembaga yang posisinya dalam demokrasi kita masih dipandang sebelah mata.

Presiden? Pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi ini memang menarik. Menarik, karena di awal-awal kemunculannya untuk menjadi orang pertama negeri ini, janji berisi mimpi akan sosok KPK yang kuat, mandiri dan tegak dihormati, sempat keluar dari lisan beliau. Bisa jadi, janji itu tak hanya diucapkan sekali.

Setidaknya Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, ingat hal itu. Usman mengatakan, dulu, di masa yang telah berlalu seiring beranjaknya waktu, Jokowi sempat berjanji memperkuat lembaga antirasauh itu. Tapi kini, realitasnya beliau justru seolah tenang, diam dan abai pada saat KPK dilemahkan sampai pada titik "tak potent".

Usman juga mengingatkan, dulu, Jokowi bahkan tak rikuh mengandeng KPK dalam kerja-kerja konstitusionalnya. Misalnya, Mas Joko pernah menyambangi KPK untuk berkonsultasi mengenai daftar calon menteri. Jokowi juga pernah mengembalikan gitar bas pemberian personel band rock Metallica, Robert Trujillo, ke KPK, karena kuatir hal itu dimaknai sebagai gratifikasi. Pokoknya, saat itu, manstablah!

"Kita juga tahu Jokowi menjanjikan penguatan KPK 10 kali lipat!" kata Usman,. Mengingatkan pada diskusi "Menyikapi Situasi KPK" yang digelar secara virtual pada awal Juni 2021 lalu.<sup>14</sup>

Tetapi begitu waktu berlalu, menurut Usman, kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi justru menjauhkan sejumlah elite politik yang terindikasi korup dari jangkauan KPK. Jokowi dianggap Usman membiarkan tidak adanya proses hukum yang benar, serta tetap anteng, tidak mencegah serangan-serangan terhadap penyidik, penyelidik, anggota serta pimpinan KPK.

Secara tidak langsung, kata Usman, Jokowi juga seperti ikut mengamini delegitimasi diskursif bahwa di dalam tubuh KPK terdapat orang-orang radikal. Lebih jauh bahkan pemerintahan Jokowi membentuk panitia seleksi (pansel) yang tidak kredibel, yang ujung-ujungnya juga menghasilkan pimpinan KPK yang banyak dipertanyakan publik.

Usman juga mempertanyakan langkah Jokowi yang terus memasukkan perwira-perwira aktif ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun figure

14) <https://www.suara.com/news/2021/06/08/144511/amnesty-dulu-janji-memperkuat-jokowi-kini-apatis-saat-kpk-dilemahkan?page=all>

tersebut sudah terindikasi memiliki reputasi buruk. Bukan hanya itu, Jokowi juga dianggap Usman kerap mengabaikan suara-suara masyarakat yang menolak revisi UU KPK. Sisi legislasi itulah yang pada akhirnya menjadi senjata ampuh perlemahan KPK.

"Terakhir, ia seperti atau bahkan cenderung mengabaikan perlemahan KPK dalam bentuk alih status pada ASN," kata Usman.<sup>15</sup>

Pengamat ekonomi dan sosial Faisal Basri melihat hal yang sama. Ia mempertanyakan pernyataan Presiden yang seolah "tak punya tuah" terkait 75 pegawai KPK. Jokowi sempat meminta agar hasil TWK tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai yang tidak lolos tes. Sesuatu yang pada realitasnya tak memberikan dampak apa pun kepada ke-75 orang pegawai KPK tersebut.

"Kalau saya sih melihat, bahasa Pak Jokowi itu bukan bahasa perintah, cuma imbauan," kata Faisal dalam *Youtube Harian Kompas*. Menurut Faisal, posisi Presiden Jokowi sebenarnya ikut menghendaki proses perlemahan KPK. Ia pun menilai, pernyataan Presiden Jokowi yang ingin KPK dikuatkan, hanya merupakan upaya pemerintah untuk meredam kontroversi di masyarakat. "Secara sadar, langsung atau tidak langsung, Pak Jokowi dalam posisi menghendaki perlemahan KPK," kata Faisal. Mantan politisi PAN itu berpandangan, seharusnya Jokowi di awal-awal polemik ini segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu KPK, apabila memang serius ingin memulihkan marwah KPK.<sup>16</sup>

Sebenarnya, sikap Jokowi tersebut sudah ramai menjadi pembicaraan publik sejak akhir era pertama ia memerintah. Pas pada lima tahun masa kerja Presiden Jokowi, kalangan aktivis memberikan rapor buruk dalam hal kebebasan sipil dan perlemahan KPK. Pada September 2019 itu, terjadi gelombang unjuk rasa di DPR, salah satunya seruan agar pemerintah menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>17</sup>

15) Ibid.

16) <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/11572201/faisal-basri-nilai-jokowi-dalam-posisi-sadar-menghendaki-pelemahan-kpk?page=all>

17) <https://nasional.tempo.co/read/1261508/wajah-5-tahun-jokowi-kebebasan-sipil-rendah-dan-pelemahan-kpk>

18) <https://antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-agenda-pemberantasan-korupsi-2019-indonesia-corruption-watch>

Padahal, baru beberapa bulan sebelumnya, Juni 2019, Jokowi mengumpulkan para tokoh dan budayawan, membicarakan berbagai hal, termasuk isu revisi UU KPK. Pada Kamis malam 26 juni 2019 itu Jokowi meminta agar komitmennya terhadap kebebasan pers tidak diragukan. Menurut dia kebebasan menyampaikan pendapat harus dipertahankan dalam kehidupan demokrasi. "Jangan sampai bapak ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini," ujar dia.

Saat itu bukan hanya isu kebebasan sipil yang mengkhawatirkan. Beberapa kalangan pun meragukan komitmen Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto, mengatakan ada upaya perlemahan gerakan antikorupsi di kalangan masyarakat sipil.

Agus menekankan, baru di era Jokowi, masyarakat sipil yang fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi merasakan teror yang masif. Teror itu terjadi ketika isu seleksi capim dan revisi UU KPK mencuat, mulai dari telepon gelap dan upaya peretasan terhadap gawai yang mereka miliki.<sup>18</sup>

Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, bahkan dengan tegas mengatakan Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan bertanggung jawab atas perlemahan KPK saat ini. KPK dinilainya telah hancur atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru-baru ini menolak permohonan uji formil dan materil yang diinisiasi para ahli dan akademisi.

Feri menyesalkan mengapa pada 2019 lalu, alih-alih mengeluarkan Perppu yang diminta banyak kalangan masyarakat, Presiden Jokowi dan DPR malah kompak mempersilakan masyarakat sipil untuk mengajukan *judicial review* UU tersebut ke MK. Setelah itu, kita tahu, pada gilirannya MK menolak permohonan tersebut.

Padahal, kata Feri, jauh-jauh hari Presiden punya wewenang untuk membatalkan pembentukan UU KPK tersebut. Karena itulah,

Feri menilai Presiden terlibat dalam proses pengusulan, perancangan, pembahasan, penetapan/pengesahan, dan pengundangan UU tersebut. "Andai sejak tahap pertama, yakni tahap pengusulan, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mau adanya UU KPK baru ini, otomatis UU tersebut tidak akan eksis hingga saat ini dan tidak akan menimbulkan banyak perdebatan dan kontroversi berkepanjangan," ujarnya.<sup>19</sup>

Artinya, kata dia, Presiden terlibat dalam pembentukan UU, dan turut bertanggung jawab. "Apalagi Presiden mayoritas absolut di parlemen. Presiden adalah orang yang bisa menentukan untuk tidak ikut dalam pembahasan," kata dia.

Dengan segala catatan kuat tersebut, wajar bila Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan mantan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas, menyebut perlemahan KPK merupakan kisah sukses kerja sama pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dengan DPR RI.

Busyro mengatakan, perlemahan KPK sudah dimulai dari revisi terhadap Undang-undang KPK yang kini telah disahkan. "Itu melumpuhkan KPK dengan sempurna. Ini bisa dikatakan sebagai *success story* dari Pak Jokowi," kata Busyro dalam diskusi daring "Agenda Mendesak

Penguatan KPK" yang digelar Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Juni lalu.

Menurut Busyro, bukti kerja sama pemerintah ini juga terlihat jelas dalam kisruh Test Wawasan Kebangsaan (TWK), yang 'membuang' 75 pegawai KPK, banyak yang integritas dan kemampuannya tergolong tinggi dan langka. Hingga saat ini, kata dia, tak ada satu pun partai politik yang menunjukkan sensitivitasnya terhadap 75 pegawai KPK tersebut, membuktikan tak ada satu pun parpol yang benar-benar peduli dengan penguatan KPK.

Bila kekuatan moral masyarakat tidak bangkit, dan terus membiarkan KPK diobrak-abrik hingga tak lagi memiliki fungsi dan manfaat, barangkali memang lembaga itu sengaja dibuat mati muda. Sayangnya, mati mudanya lembaga ini tak sebagaimana mati mudanya seorang manusia yang sering dikatakan sebagai nasib baik. Kita juga tak akan tega mengucapkan ironi, bahwa memang yang terbaik adalah lembaga itu tak pernah dilahirkan. Tidak, tentu tidak demikian.

Mungkin, kita juga bisa mengetuk hati mantan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam hal ini. Kita tahu, KPK berdiri atas gagasan di era Presiden BJ Habibie. Lembaga itu lahir secara resmi di era Presiden Megawati. Masak mau mati di era Presiden Jokowi, kader PDIP yang dibanggakan Ibu Megawati? [ ]

19) <https://www.gatra.com/detail/news/511293/hukum/kpk-dilemahkan-pengamat-presiden-bertanggung-jawab>



Jika berpikir operasi Caesar dan operasi katarak adalah kemajuan mutakhir, Anda khilaf besar. Abū al-Qāsim Khalaf ibn al-Abbās al-Zahrāwī al-Ansari yang lebih dikenal sebagai Al-Zahrawi atau Abulcasis di dunia Barat, adalah dokter, ahli bedah, dan ahli kimia dari Andalusia, yang menemukannya. Dia dianggap sebagai ahli bedah terbesar Abad Pertengahan, sehingga disebut sebagai "bapak operasi modern".

Sumber gambar : <https://wikipedia.org/>

**REGIONAL & RURAL BANK  
(BPD & BPR)**

**COMMERCIAL & SHARIA BANK  
CAPITAL/STOCK MARKET**

**STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN & BUMD)  
GOVERNMENT INSTITUTIONS**

**SELF REGULATED ORGANIZATION (SRO)**

**FINANCIAL TECHNOLOGY & TECHNOLOGY PROVIDER**



 **vedapraxis**

*The Leading Business Governance Advisor with 15 Years of Experience*

## JAKARTA

**AD Premier, 8<sup>th</sup> floor**

Jl. TB. Simatupang No.5

Pasar Minggu - Jakarta 12540

## SEMARANG

Jl. Batan Miroto III No. 392H, Miroto,  
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang  
Jawa Tengah 50134

**“Being Relevant and  
Leading with Empathy”**



info@vedapraxis.com



@veda\_praxis



Veda Praxis